



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015 - 2019



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015



“ Pendidikan dan Kebudayaan

sebagai **Gerakan Pencerdasan dan Pembentukan**

Generasi Berjiwa Pancasila ”

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019, juga arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berkarya di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Nawa Cita.

Penyusunan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

Jakarta, 8 April 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



ANIES BASWEDAN

DAFTAR ISI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015—2019

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Istilah dan Singkatan (<i>Glossary</i>)	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	5
D. Kondisi Umum	6
E. Potensi dan Permasalahan	12
1. Analisis Lingkungan Strategis	12
2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2015—2019	15
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
A. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	32
B. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	36
C. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	38
D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43
E. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	52
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	54
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud	74
C. Kerangka Regulasi	101
D. Kerangka Kelembagaan	103
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	107
B. Kerangka Pendanaan.....	126
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi.....	133
BAB V PENUTUP.....	138
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemendikbud	
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	
SALINAN PERATURAN	
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	
Nomor 22 Tahun 2015	
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015—2019	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025.....	2
Gambar 1.2	Pilar Pembangunan Kebudayaan	3
Gambar 1.3	Pencapaian Pembangunan Pendidikan 2005—2014	6
Gambar 1.4	Pencapaian Pembangunan Kebudayaan 2009—2014	7
Gambar 1.5	Bonus Demografi.....	14
Gambar 1.6	APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012	17
Gambar 1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013	18
Gambar 1.8	Capaian Mutu Pendidikan Indonesia	19
Gambar 1.9	Persentase Penduduk Menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010	24
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kemendikbud	104
Gambar 4.1	Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan.....	108
Gambar 4.2.	Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pendidikan.....	133
Gambar 4.3.	Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012.....	19
Tabel 2.1	Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif	32
Tabel 3.1	Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan	57
Tabel 3.2	Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan	57
Tabel 3.3	Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.....	58
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Akses Pendidikan	60
Tabel 3.5	Struktur Program dan Eselon I Kemendikbud	91
Tabel 3.6	Sasaran Program dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	92
Tabel 3.7	Sasaran Program dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	94
Tabel 3.8	Sasaran Program dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah	94
Tabel 3.9	Sasaran Program dan IKP Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat	96
Tabel 3.10	Sasaran Program dan IKP Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	97
Tabel 3.11	Sasaran Program dan IKP Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	98
Tabel 3.12	Sasaran Program dan IKP Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	99
Tabel 3.13	Sasaran Program dan IKP Program Pelestarian Budaya.....	101
Tabel 3.14	Kerangka Regulasi.....	101
Tabel 3.15	Penanggungjawab Eselon I dan Eselon II	104
Tabel 4.1	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1....	109
Tabel 4.2	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T2....	109
Tabel 4.3	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3....	110
Tabel 4.4	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4....	111
Tabel 4.5	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T5....	113
Tabel 4.6	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T6....	114
Tabel 4.7	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P1.....	114
Tabel 4.8	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P2.....	117
Tabel 4.9	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P3.....	118
Tabel 4.10	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P4.....	120
Tabel 4.11	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P5.....	121
Tabel 4.12	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P6.....	123
Tabel 4.13	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P7.....	124

Tabel 4.14 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P8.....	126
Tabel 4.15 Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola.....	127
Tabel 4.16 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	128
Tabel 4.17 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat.....	129
Tabel 4.18 Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019	131

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (*GLOSSARY*)

A

ACDP	=	<i>Analytical Capacity Development Program</i>
AEC	=	<i>ASEAN Economic Community</i>
AKIP	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMH	=	Anugrah Media Humas
ANRI	=	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
Arkenas	=	Arkeologi Nasional
<i>ASEAN</i>	=	<i>Assosiation of South East Asia Nations</i>
ASN	=	Aparatur Sipil Negara
Atdik	=	Atase Pendidikan

B

BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAN-PNF	=	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BAN-SM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
Bawasda	=	Badan Pengawas Daerah
BIPA	=	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
BMN	=	Barang Milik Negara
BNSP	=	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOMM	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BSM	=	Bantuan Siswa Miskin
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara

C

CPI	=	<i>Corruption Perceptions Index</i>
CPNS	=	Calon Pegawai Negeri Sipil

D

D4	=	Diploma 4
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum
Dewatap	=	Dewan Perwakilan Tetap
Dikdas	=	Pendidikan Dasar
Dikdasmen	=	Pendidikan Dasar dan Menengah

Dikmas	= Pendidikan Masyarakat
Dikmen	= Pendidikan Masyarakat
Ditjen	= Direktorat Jenderal
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
DN	= Dalam Negeri
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DUDI	= Dunia Usaha Dunia Industri
E	
EDI	= <i>Education Development Index</i>
EFA	= <i>Education for All</i>
ESD	= <i>Education for Sustainable Development</i>
G	
GCI	= <i>Global Competitiveness Index</i>
GDP	= <i>Gross Domestic Product</i>
Gender	= Kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya
GPR	= <i>Government Public Relations</i>
GTK	= Guru dan Tenaga Kependidikan
H	
HAKI	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	= <i>Human Development Index</i>
I	
IKK	= Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	= Indikator Kinerja Program
IKSS	= Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKU	= Indikator Kinerja Utama
ILEG	= <i>Indonesian Local Education Governance</i>
IPA	= Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPS	= Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEKS	= Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni
IRDI	= <i>The Indonesian Research and Development Institute</i>
ISO	= <i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	= Inspektorat Jenderal
J	
Jardiknas	= Jejaring Pendidikan Nasional
K	
K/L/D	= Kementerian/Lembaga/Daerah

KASN	=	Komisi Aparatur Sipil Negara
KBK	=	Kurikulum Berbasis Kompetensi
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
KIM	=	Kelompok Informasi Masyarakat
KIP	=	Kartu Indonesia Pintar
Kemendikbud	=	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKN	=	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKNI	=	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KPJM	=	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
L		
LAM	=	Lembaga Akreditasi Mandiri
LAKIP	=	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHE	=	Laporan Hasil Evaluasi
Life Skills	=	Kecakapan Hidup
Litbang	=	Penelitian dan Pengembangan
Literasi	=	Melek Aksara
LNS	=	Lembaga Non Struktural
LK	=	Laporan Keuangan
LPNK	=	Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
LPTK	=	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSP	=	Lembaga Sertifikasi Profesi
M		
MA	=	Madrasah Aliyah
MAK	=	Madrasah Aliyah Kejuruan
Mapel	=	Mata Pelajaran
MBS	=	Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	=	<i>Millennium Development Goals</i>
Mendikbud	=	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MI	=	Madrasah Ibtidaiyah
MIPA	=	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
N		
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
O		
OECD	=	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
P		
PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD-HI	=	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
PDB	=	Produk Domestik Bruto
Permendikbud	=	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Perpres	=	Peraturan Presiden
PGSD	=	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PIP	=	Program Indonesia Pintar
PIRLS	=	<i>Progress in International Reading Literacy Study</i>

PISA	=	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PKBM	=	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKN	=	Pendidikan Kewarganegaraan
PNF	=	Pendidikan Nonformal
POD	=	Pendidikan Orang Dewasa
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPB	=	Pengembangan Profesional Berkesinambungan
PPID	=	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PTK	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
R		
RA	=	Raudhatul Athfal
RB	=	Reformasi Birokrasi
RBI	=	Rumah Budaya Indonesia
RBN	=	Reformasi Birokrasi Nasional
RKA	=	Rencana Kerja dan Anggaran
RKB	=	Ruang Kelas Baru
RKA-KL	=	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Renstra	=	Rencana Strategis
Renja	=	Rencana Kerja
RI	=	Republik Indonesia
RKB	=	Ruang Kelas Baru
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RPS	=	Rencana Pengembangan Sekolah
S		
S1	=	Strata Satu
SAKIP	=	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	=	Satuan Kerja
SD	=	Sekolah Dasar
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SEAMEO	=	<i>The Southeast Asian Ministers of Education Organization</i>
Setjen	=	Sekretariat Jenderal
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional
SISP	=	Survey Integritas Sektor Publik
SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKKNI	=	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKL	=	Standar Kompetensi Kelulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SLN	=	Sekolah Luar Negeri
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah Luar Biasa

SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	= Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	= Standar Nasional Pendidikan
SOP	= Standar Operasi dan Prosedur
SP	= Sasaran Program
SPM	= Standar Pelayanan Minimal
SS	= Sasaran Strategis
Susenas	= Survei Sosial Ekonomi Nasional
T	
Tata Nilai	= Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	= Taman Bacaan Masyarakat
Tendik	= Tenaga Pendidik
TIK	= Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	= <i>Trends in International Mathematic and Science Study</i>
TK	= Taman Kanak-Kanak
TKLB	= Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
TUK	= Tempat Uji Kompetensi
U	
UKBI	= Uji Kompetensi Bahasa Indonesia
UKP4	= Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
ULT	= Unit Layanan Terpadu
UN	= Ujian Nasional
UNESCO	= <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
UPTD	= Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
USAID	= <i>United State Agencies for International Development</i>
USB	= Unit Sekolah Baru
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
V	
Vokasi	= Keahlian Terapan
W	
WBK	= Wilayah Bebas Korupsi
Wajar	= Wajib Belajar
WCF	= <i>World Culture Forum</i>
WDP	= Wajar Dengan Pengecualian
WHC	= <i>World Heritage Convention</i>
WTP	= Wajar Tanpa Pengecualian
3T	= Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

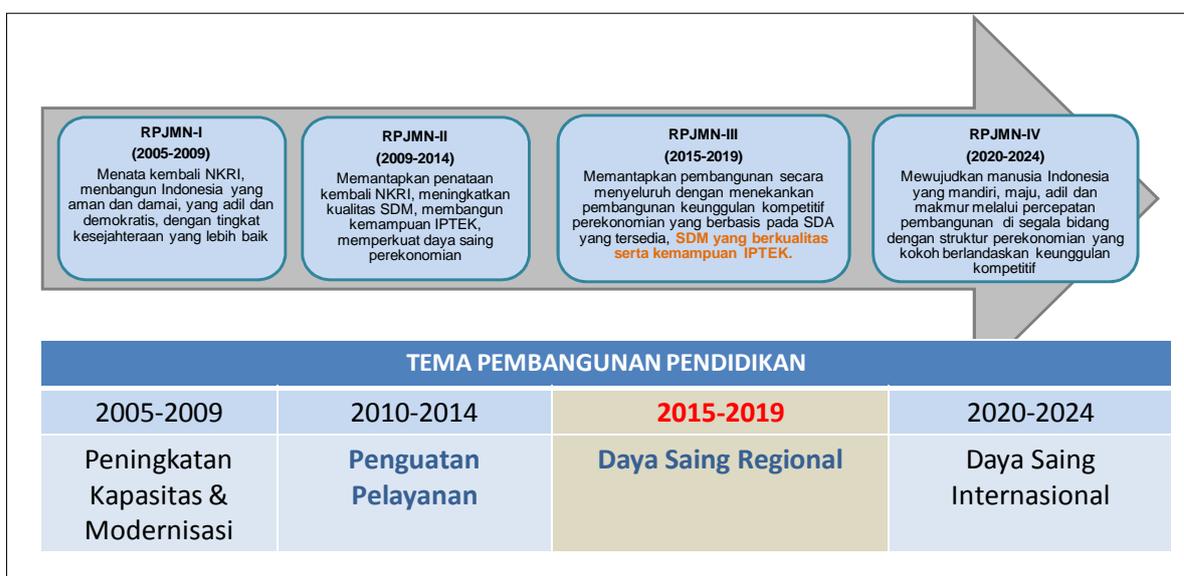
Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih

dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.



Gambar 1.1 Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Konstruksi pembangunan nasional kebudayaan itu ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Pilar Pembangunan Kebudayaan

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis

dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019; dan
20. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

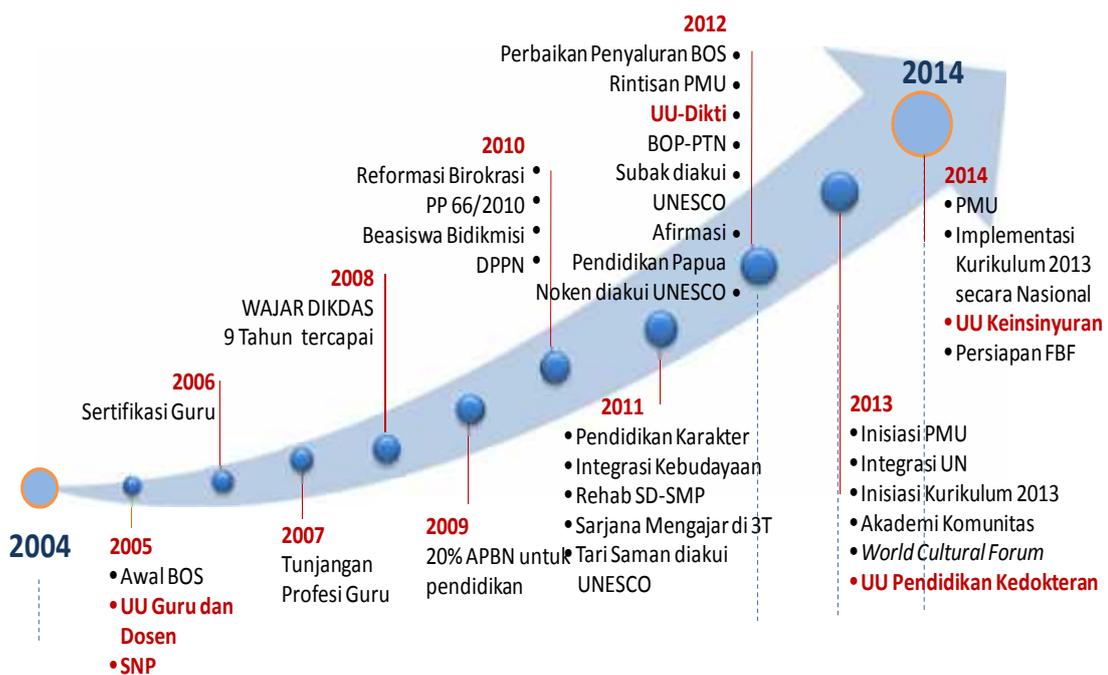
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

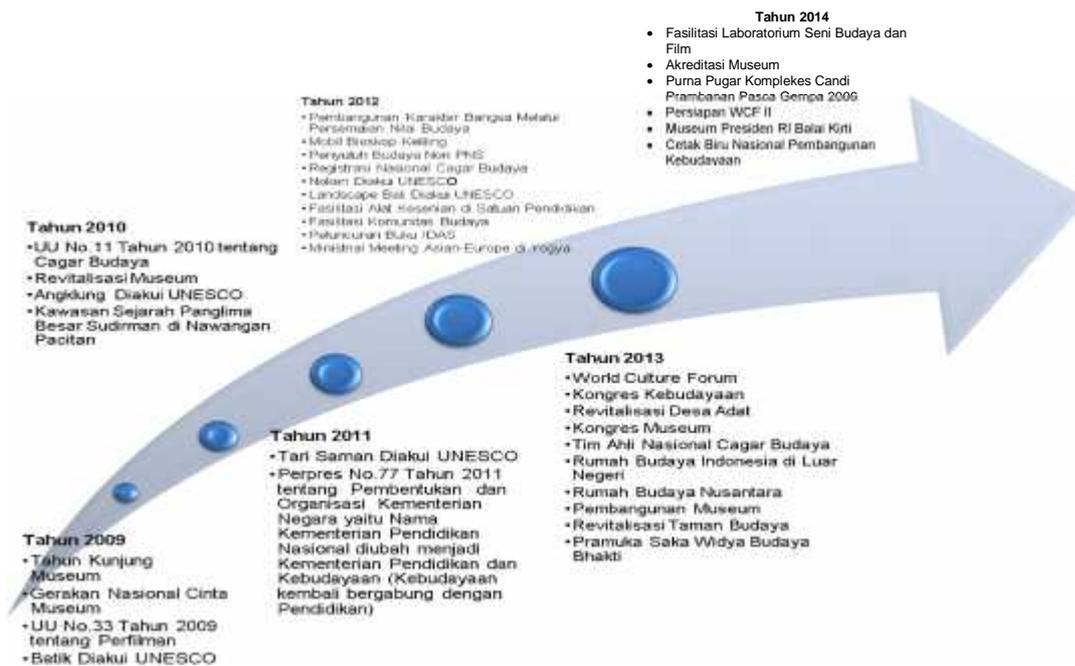
D. Kondisi Umum

Berbagai terobosan dan capaian pembangunan pada periode 2005—2009 seperti implementasi UU guru dan dosen, standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, penyediaan tunjangan profesi, serta komitmen dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun sampai tingkat kabupaten dan kota tetap menjadi agenda prioritas dalam pembangunan tahun 2010—2014. Disamping itu, Kemendikbud menginisiasi berbagai terobosan baru untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia. Berbagai terobosan dalam bentuk kebijakan selama periode 2004—2014 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Pencapaian Pembangunan Pendidikan 2005—2014

Beberapa tonggak pencapaian pembangunan kebudayaan periode 2009—2014 dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Pencapaian Pembangunan Kebudayaan 2009—2014

Berikut diuraikan capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada periode 2010—2014.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Selama periode 2010—2014, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (usia 3-6 tahun) menjadi 68,10% pada tahun 2014 atau naik 17,89% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%. Capaian tersebut didukung oleh Program Paudisasi yang merupakan gerakan pemerintah untuk mewujudkan perluasan akses PAUD dengan sasaran satu desa memiliki minimal satu satuan pendidikan PAUD. Untuk mendukung program ini, Kemendikbud mengalokasikan bantuan untuk 25.774 rintisan PAUD baru dengan alokasi bantuan rata-rata sebesar Rp45 juta untuk setiap satuan pendidikan PAUD. Program ini juga didukung melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan organisasi mitra untuk mengembangkan PAUD.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pada pengembangan akses dan mutu PAUD, pada tahun 2013 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang bertujuan menjamin (a) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD.

Selanjutnya sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD telah di terbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan anak usia dini dalam kapasitas semula sebagai sekolah internasional telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. Saat ini telah diterbitkan 106 izin Satuan Pendidikan Kerjasama TK dan Kelompok Bermain.

2. Pendidikan Dasar

Fokus pembangunan akses pendidikan dasar pada tahun 2010—2014 adalah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun sampai di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun yaitu meningkatkan harga satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah pada tahun 2009 sebesar Rp397.000,00, naik menjadi Rp450.000,00 pada tahun 2012 dan direncanakan naik menjadi Rp800.000,00 pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2009 sebesar Rp570.000,00, naik menjadi Rp710.000,00 dan pada tahun 2015 dan direncanakan naik menjadi Rp1.000.000,00 pada tahun 2015. Terobosan lain yaitu meningkatkan kuota sasaran BSM untuk menjamin pendidikan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan.

Dampak kedua terobosan tersebut mendorong naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar yaitu APK SD/SDLB/Paket A menjadi 97,31% dan APK SMP/SMPLB/Paket B menjadi 74,29%. Terobosan tersebut juga mempengaruhi turunnya disparitas antarkabupaten dan kota dimana pada tahun 2014 disparitas APK SD/MI antarkabupaten/kota turun menjadi 1,9% dari sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 2,15%. Demikian pula halnya dengan disparitas APK SMP/MTs antarkabupaten/kota turun dari 15% pada tahun 2010 menjadi 12,75% pada tahun 2014. Tercapainya target angka partisipasi pendidikan mendorong pemerintah secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang masih perlu peningkatan angka partisipasi. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian kepada daerah-daerah Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar (3T) yang merupakan kantong-kantong putus sekolah dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan serta menyelesaikan permasalahan keterbatasan guru dengan program “Sarjana Mendidik di Daerah 3T”.

Seiring dengan peningkatan akses pendidikan dasar, pemerintah berusaha mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar. Diterbitkannya SPM Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 23 Tahun 2013 merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan dasar agar peningkatan akses pendidikan dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. SPM ini dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju kepada pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dasar ditujukan untuk mendorong meningkatnya rata-rata kualitas layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

3. Pendidikan Menengah

Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Untuk itu pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014. Melihat kebutuhan akan tenaga kerja trampil dan peningkatan input pendidikan tinggi, Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan pendidikan menengah dengan menginisiasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan langkah awal menuju dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMU, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi pendidikan menengah dengan satuan biaya per siswa Rp1.000.000,00 per tahun dan direncanakan naik menjadi Rp1.200.000,00 pada tahun 2015. Disamping BOS, bagi siswa tidak mampu masih diberikan BSM. BOS pendidikan menengah ini sebelumnya merupakan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang diterapkan dengan mengikuti mekanisme BOS pada pendidikan dasar.

Peningkatan akses pendidikan menengah wajib diselaraskan dengan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK memiliki ketrampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan trampil. Dari segi peningkatan kualitas layanan

pendidikan menengah, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Pemerintah secara kontinu berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

4. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan Orang Dewasa (POD) merupakan pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas yang meliputi pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca. Selama periode 2010—2014, pemerintah berhasil menurunkan angka niraksara menjadi 3,76% pada tahun 2014 dari 4,75% pada tahun 2010.

Penurunan angka niraksara terjadi secara cukup signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2004, terdapat 12 provinsi dengan persentase niraksara di atas 10%, saat ini tinggal 2 provinsi. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk niraksara dan menyempitnya disparitas gender. Pada tahun 2005 angka niraksara 14,89 juta (9,55%) dengan disparitas gender 6,56%. Sementara itu, pada tahun 2014, angka niraksara adalah 6,00 juta (3,76%) dengan disparitas gender 2,17%.

Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus bertujuan untuk menjamin kualitas peserta pelatihan dan kursus sehingga dapat diterima oleh pasar kerja atau termotivasi untuk menjadi pengusaha. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi mencapai 1.275 dari 18.458 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Upaya akreditasi ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, pemagangan, dan penilaian kinerja lembaga sebagai persiapan menuju akreditasi. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai landasan dalam menyusun kerangka materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan mutu penyelenggara kursus berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah peserta didik dan mutu lulusan. Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan pada tahun 2014 telah mencapai 2.818.505 orang, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 1.433.147 orang. Pemerintah mempertegas upaya untuk meningkatkan mutu kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah; Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

5. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa, dan Sastra

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Kemendikbud bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait membentuk tim ahli nasional untuk mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kabupaten/kota. Hingga 16 Oktober 2013, sebanyak 2.632 warisan budaya tak benda telah teregistrasi. Hasil registrasi warisan budaya tersebut akan diseleksi dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional yang selanjutnya direkomendasi sebagai bentuk diplomasi budaya Indonesia ke luar negeri. Tujuannya, agar warisan-warisan budaya itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.

Kemendikbud meluncurkan program Rumah Budaya Indonesia (RBI) untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Ruang budaya didirikan di delapan negara yang dianggap strategis bagi Indonesia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Perancis, Turki, Jepang, Australia, dan Singapura. RBI diharapkan dapat berperan sebagai pusat jaringan koordinasi untuk seluruh pusat-pusat budaya Indonesia, universitas-universitas, dan konservatori yang memiliki bidang studi Indonesia. Komitmen dalam melakukan diplomasi budaya ditunjukkan pula dengan penyelenggaraan *World Culture Forum* pada tahun 2013 di Bali. Forum ini menghasilkan "Janji Bali" atau "*Bali Promise*" yang dilakukan sebagai kesepakatan yang sungguh-sungguh untuk secara berasma-sama membangun dunia baru yang lebih beradab dan lebih berbudaya.

Pelestarian dan pengembangan bahasa antara lain dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri. Dalam hubungan itu, jumlah penutur bahasa Indonesia merupakan jumlah terbesar kelima di dunia, yakni sebesar 4,5 juta orang (Kemenlu, 2011). Sedikitnya 45 negara mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Di beberapa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang cukup populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau dijadikan sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan penutur bahasa Indonesia, pemerintah menerapkan terobosan kebijakan *Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)* khusus bidang pengajaran BIPA di samping menyiapkan pusat layanan bahasa.

6. Tata Kelola Kementerian

Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi merupakan salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemendikbud. Pada tahun 2012 berdasarkan *Survey Integritas Sektor Publik* (SISP) oleh KPK, Kemendikbud menempati peringkat pertama dengan nilai 8,06. Penghargaan itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan KPK terhadap komitmen Kemendikbud dalam menjalankan program kerja terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi.

Dalam hal keterbukaan informasi, Kemendikbud mendapatkan tiga penghargaan yaitu *Open Government* dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk penyelenggaraan program Bidik Misi, Terbaik I kategori advertorial Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anugrah Media Humas (AMH) pada tahun 2013, serta sertifikat akreditasi A untuk Unit Kearsipan Kementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam bidang keuangan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2013 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendikbud mendapat kategori B (Baik) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013. Capaian ini tentunya menjadi pemicu bagi Kemendikbud untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pengelolaan lembaga.

E. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010—2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing. Sebagai contoh, *McKinsey Global Institute* pada tahun 2012, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada

tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.

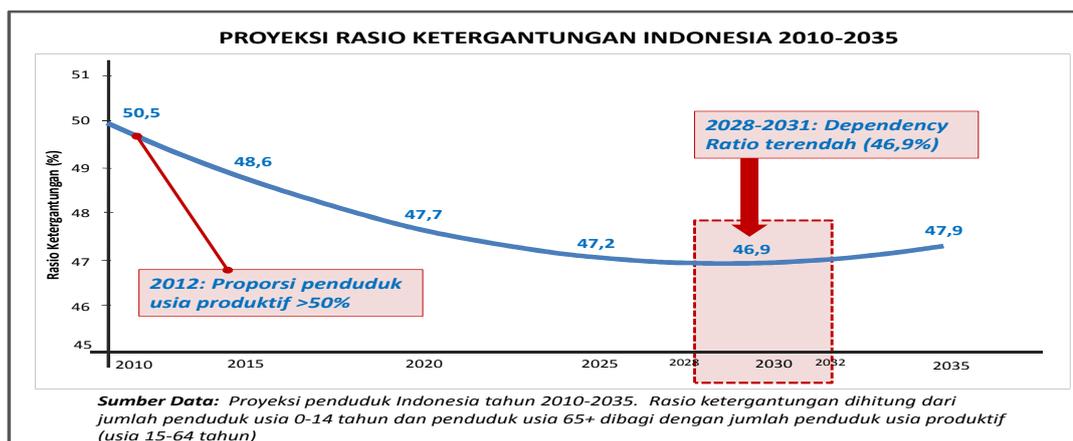
b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*, Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009—2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013—2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index (HDI)* Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028—2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.



Gambar 1.5 Bonus Demografi

d. Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Sebagai catatan pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagai catatan, ASEAN akan menerapkan ASEAN *economic community* atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai “pasar terbesar dan basis produksi” paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya

yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2015—2019

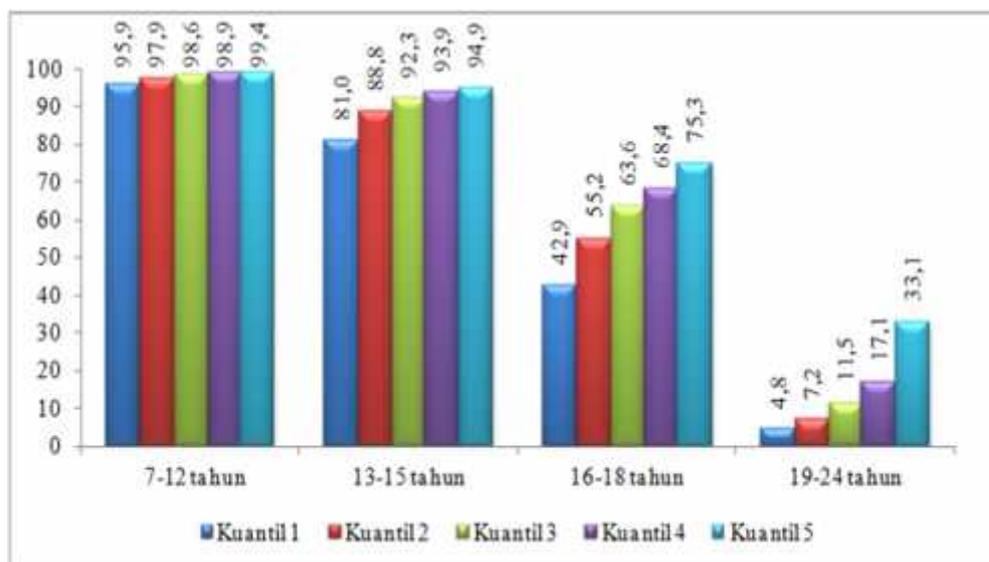
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan pada bagian C di atas. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.

a. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

- 1) **Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal**, meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
- 2) **Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan Kebudayaan**
Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.
- 3) **Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD yang Berkualitas**
Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.
- 4) **Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal**
Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.
 - a) **Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal**
Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012—2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat

dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di bawah.



Sumber: Susenas, BPS

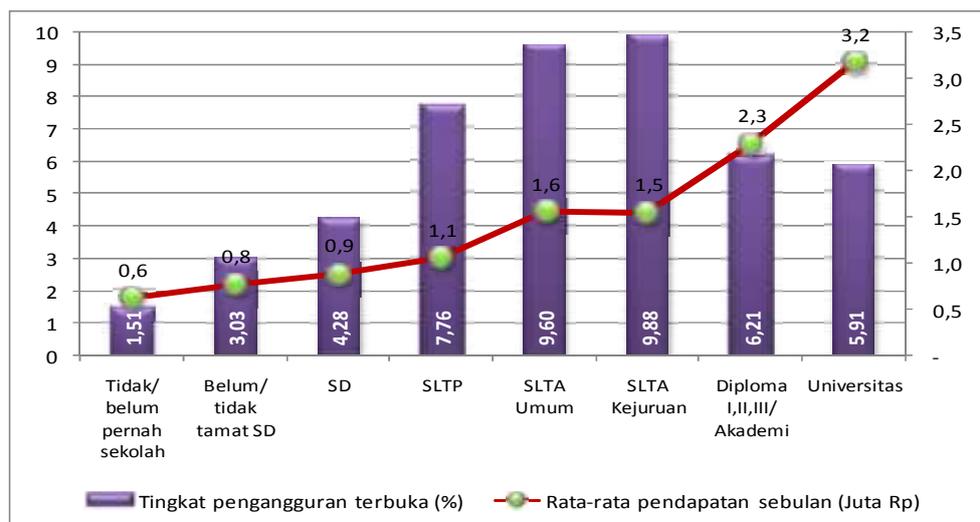
Gambar 1.6 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012

b) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantong-kantong putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6 di atas.

c) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.7. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.



Sumber: Susenas 2013

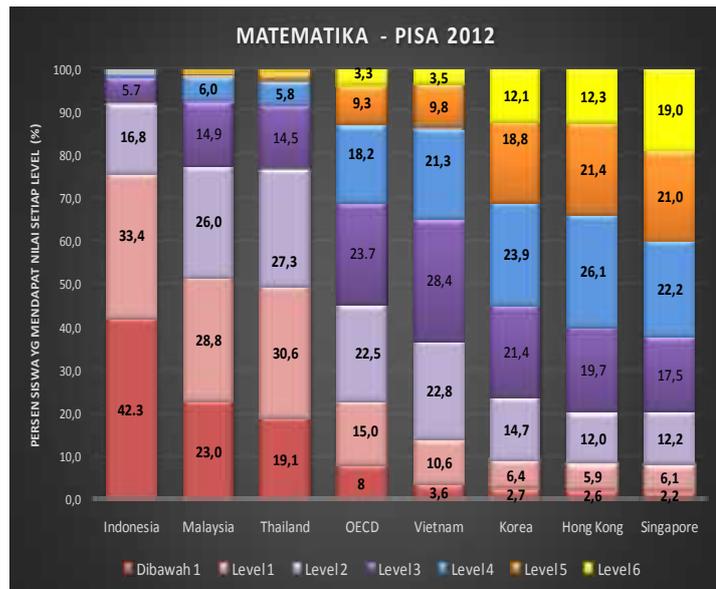
Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2013

5) Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum mengembirakan. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66% siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik dilihat secara antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender.

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukkan rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8.

Tingkat Kompetensi	Score min.
Rata-rata	
6	698
5	626
4	553
3	480
2	407
Kecakapan di bawah Tingkat 2	
1	335
1(b)	262
Di bawah 1 (b)	0-261



Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*
 Gambar 1.8 Capaian Mutu Pendidikan Indonesia

Sementara itu, dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)
Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Sumber: *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2013*

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal berikut.

a) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM

sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah, sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/MA sudah terakreditasi minimal B sementara hanya 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

b) Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

c) Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

6) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antardaerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan (iv) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata.

b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan disain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru.

Salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja guru adalah tingkat rata-rata ketidakhadiran guru yang pada tahun 2013 mencapai 10% (Studi ACDP), dimana angka ketidakhadiran guru lebih tinggi pada (i) guru laki-laki; (ii) guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah; (iii) guru yang mengajar di sekolah terpencil; (iv) sekolah yang sarana-prasarananya tidak memadai; (v) sekolah yang belum mencapai SPM; (vi) kepala sekolah yang juga sering absen dan tidak menjadi panutan; (vii) sekolah yang jarang dikunjungi oleh pihak dinas pendidikan kabupaten; dan (viii) sekolah yang komite sekolahnya kurang aktif. Sekolah di mana angka ketidakhadiran guru tinggi, tingkat ketidakhadiran murid juga tergolong tinggi, dan hal ini

berkaitan dengan rendahnya kemampuan membaca di kelas 1, dan 2 siswa sekolah dasar.

c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas

Terbatasnya kualitas layanan pendidikan oleh LPTK berdampak belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum adanya reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (ii) minimnya keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota); (iii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; (iv) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; (v) belum dikembangkannya kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (vi) belum dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

7) Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa (Pendidikan Masyarakat) belum Maksimal

Banyaknya lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh (i) belum diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (ii) belum adanya revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (iii) rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; (iv) belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; (v) belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan DUDI.

8) Pengentasan Keniraksaraan belum Merata

Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk niraksara secara signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar tentang *education for all*, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebagai contoh, dapat disebutkan masih tingginya angka niraksara di Provinsi Papua yang mencapai 30,93%. Terbatasnya kemampuan insan penyelenggara program niraksara, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan niraksara.

9) **Peningkatan Pendidikan Keluarga belum Seperti yang Diharapkan**

Saat ini program keluarga yang dilaksanakan melalui pendidikan keorangtuaan baru berhasil menjangkau 45% kabupaten dan kota. Selain itu, capaian keberhasilan itu pun belum memadai karena baru terbatas pada pemangku kepentingan untuk memberikan peningkatan wawasan. Wawasan tentang pentingnya peran ayah dan bunda dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah perilaku destruktif, memahani gizi dan pola hidup sehat serta menerapkan pengarusutamaan gender. Program belum menyentuh sasaran akhir serta belum meningkatkan peran orang tua dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

10) **Rendahnya Mutu Kemahiran Membaca dan Semakin Punahnya Penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah**

Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441). Kendala peningkatan mutu kemahiran membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan sastra. Lebih lanjut, studi USAID (2014) menunjukkan bahwa rata-rata 47,2% murid kelas 1 dan 2 di Indonesia yang siap naik kelas 3 karena membaca lancar dan paham artinya. Sisanya sebanyak (i) 26,3% meski membaca lamban namun mengerti arti bacaan (ii) 20,7% tergolong pemula yakni gabungan pembaca lancar dan lamban namun tidak mengerti artinya; dan (iii) 3% tergolong non-pembaca (*non-reader*) karena walau telah dua tahun bersekolah, mereka belum mengenal huruf. Secara nasional, kemampuan membaca murid rendah yang diperparah oleh kondisi lebarnya ketimpangan literasi antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia serta antara perkotaan dan pedesaan di dalam kabupaten. Mereka pada umumnya murid dari keluarga miskin yang orangtuanya pun buta huruf, komunitasnya adalah penutur tunggal bahasa ibu, dan bersekolah di sekolah dasar di pedesaan dan daerah terpencil.

Ada masalah terkait penanganan pembelajaran bahasa di dunia pendidikan. Ada kecenderungan jika pembelajaran bahasa berlangsung dengan baik dapat memacu bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Akibatnya, penutur muda bahasa daerah semakin berkurang. Padahal, bahasa dan sastra daerah masih perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa yang multibahasa. Perlu diperhatikan tentang pengembangan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan. Semangat penggunaan bahasa Indonesia itu harus seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

Di sisi lain, sebagai salah satu unsur pemersatu bangsa, bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi antarkelompok etnis dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antarbudaya sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai media penyelesaian konflik antaretnis.

Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010

Dengan demikian, pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di daerah perlu tetap dilakukan dengan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga dan melindungi kekayaan budaya lokal (bahasa daerah) serta berupaya agar unsur-unsur bahasa daerah dapat diangkat menjadi unsur pembentuk bahasa Indonesia. Studi ACDP (2014) menunjukkan di sejumlah

Gambar 1.9 Persentase Penduduk menurut Bahasa Sehari-hari Tahun 2010

sekolah di daerah-daerah terpencil, guru tidak bisa mengajar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, karena murid masih bertutur dalam bahasa ibu. Guru diharapkan untuk menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bagi murid sekolah dasar hingga kelas tiga, sehingga murid menjadi lebih mudah memahami mata pelajaran.

Bertambahnya jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia dan yang berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia tidak terlepas dari posisi strategis bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia, baik dalam politik maupun ekonomi. Adapun yang menarik dari sensus penduduk tahun 2010 adalah munculnya fenomena penggunaan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari (0,35%). Kondisi itu bisa jadi muncul sebagai efek globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing warga negara di tingkat internasional. Sementara itu, kondisi riil yang ada pada tahun 2010 masih terdapat 16,1 juta (7,5%) penduduk yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kondisi yang sangat bertolak belakang. Sebagian kecil (0,35%) penduduk Indonesia sudah siap memasuki daya saing tingkat Internasional, tetapi di sisi lain sebagian penduduk Indonesia (7,5%) tidak siap memasuki daya saing bahkan, pada tingkat nasional sekalipun.

11) Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Demikian pula halnya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan serta menurunnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas keseharian yang disertai dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong. Keterbukaan informasi memang membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuka akses yang luas ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain, adanya kecenderungan: (i) menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (v) menguatnya nilai-nilai *primordialisme* dan *fundamentalisme* yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

12) Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan.

13) Pelestarian Warisan Budaya belum Efektif

Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja.

14) Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya

Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.

15) Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, (i) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; (vi) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

16) Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien

Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir tiga kali sejak tahun 2001, masih terjadi inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain, (i) pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (ii) rasio guru dan murid yang makin rendah; (iii) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran; (iv) penggunaan belanja transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal; dan (v) pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi).

17) Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Kemendikbud

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

b. Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

1) Penguatan Insan atau Pelaku Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan

Tantangannya antara lain adalah: mendorong peran aktif semua pelaku di masing-masing jenjang pendidikan; meningkatkan kemampuan para pelaku pendidikan; membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama; serta mensinergikan peran mereka sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan.

2) Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

Tantangannya antara lain adalah: menyadarkan pelaku budaya akan peran penting mereka; meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan masyarakat pendukung; meningkatkan peran pemerintah dalam dukungan kepada inisiasi para pelaku budaya; serta mensinergikan kerja pelaku budaya, masyarakat dan pemerintah sebagai satu kesatuan ekosistem kebudayaan.

3) Menyediakan Pelayanan PAUD yang Berkualitas

Tantangannya antara lain, (i) meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) memperluas pemenuhan standar pelayanan PAUD; (iv) meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif.

4) Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas

a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (ii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus.

- b) Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan; (ii) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (iii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus; (iv) menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah; (v) meningkatkan peran masyarakat/swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.
- c) Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara, (i) menyelaraskan ketersediaan bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja; (ii) mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/sesuai dengan KKNI.

5) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

- a) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; (ii) meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; (iii) memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
- b) Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dilakukan dengan cara, (i) mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; (ii) mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; (iii) memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.
- c) Penguatan sistem penilaian pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; (ii) memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; (iii) memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.

6) Meningkatkan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

- a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) mengawasi proses proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah; (iii) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah.

- b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kualifikasi guru; (ii) memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; (iii) menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iv) meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.
- c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas yang dapat diatasi dengan cara, (i) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya LPTK; (ii) memperkuat sistem rekrutmen calon guru.

7) Meningkatkan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Masyarakat

Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan masyarakat antara lain dilakukan dengan cara, (i) menyelenggarakan pendidikan keaksaraan; (ii) menyelenggarakan proses akreditasi terhadap lembaga pelatihan dan kursus; (iii) menyelaraskan pengembangan lembaga pelatihan dan kursus dengan kebutuhan dunia kerja.

8) Memeratakan Pengentasan Keniraksaraan

Keberhasilan Indonesia dalam angka capaian keaksaraan masih perlu ditingkatkan dari sisi aspek pemerataannya, terutama daerah 3T. Selain itu, upaya perbaikan kemampuan sumber daya insani dalam penyelenggaraan program niraksara menjadi tantangan di masa yang akan datang.

9) Meningkatkan Pendidikan Keluarga

Tantangannya adalah agar program pendidikan keluarga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, ke daerah pinggiran dan perdesaan. Tantangan lain adalah memperluas cakupan pendidikan, tidak hanya sekadar peningkatan wawasan saja, tetapi juga pengenalan praktik yang baik.

10) Menyeimbangkan dan Mengharmonikan Penanganan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, tetapi seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

11) Menguatkan Karakter Siswa dan Jati Diri Bangsa

Tantangan Kemendikbud dalam rangka penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, di samping bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global

yang positif dan produktif. Relevan dengan semua itu adalah bagaimana memahami apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

12) Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah menyediakan sarana dan prasarana aktualisasi seni dan karya budaya; mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan pada produk dalam negeri; mempromosikan seni dan karya budaya di tingkat internasional.

13) Melestarikan Warisan Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meregistrasi seluruh warisan budaya bangsa; meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; meningkatkan potensi dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.

14) Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan promosi budaya antardaerah melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan kreativitas karya budaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional.

15) Mengembangkan Sumber Daya Kebudayaan

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan yang baik (*good governance*); serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

16) Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan yang Belum Efektif dan Efisien

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meninjau kembali berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.

17) Memperbaiki Tata Kelola Organisasi Kemendikbud

Tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 2.1
Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Bersemangat juang tinggi Jujur Mandiri Pantang menyerah Pembangunan dan pembinaan jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. • Beraktualisasi insan adiraga. 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

Visi Kemendikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia

industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

B. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;

4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

C. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015—2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Pelibatan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Semakin tinggi jenjang, semakin besar pula peran serta aktifnya. Pada jenjang pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

- 2. Tujuan Strategis 2: Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan**
Mendukung visi, tujuan strategis ini menegaskan fokus pembangunan kebudayaan adalah pemberdayaan pelaku budaya. Pemberdayaan bisa dikatakan sebagai awal dari penguatan peran mereka dalam melestarikan kebudayaan. Pencapaian tujuan strategis dimaksud dicirikan antara lain oleh meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.

Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya. Secara bersamaan akan terjadi peningkatan mutu karya dan pelaku budaya serta peningkatan mutu layanan dalam pelestarian warisan budaya.

- 3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus**

Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih

lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga. Peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan dilaksanakan melalui peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan akses pendidikan kursus dan pelatihan perlu diiringi dengan peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus yaitu dengan menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pendidikan keluarga difokuskan pada orang tua/wali bagi siswa PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga fokus peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD.

Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau *ASEAN economic community* yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah

mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKNI pada lebih banyak lembaga kursus dengan diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak 36 jenis kursus telah memiliki KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga-lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu disusun KKNI-nya serta kemampuan kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap tahunnya.

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan meningkatkan kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang dimiliki tidak hilang. Kebudayaan sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan mutu pembelajaran dan jati diri bangsa yang merupakan aspek penting dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mempererat persatuan bangsa. Pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya.

Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan lulusan, karena dengan kemampuan bahasa yang baik, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk dijadikan prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dan tendik.

Pemerintah juga harus meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang makin terbuka, di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan itu, dituangkan beberapa sasaran strategis, di antaranya adalah penyusunan kebijakan teknis; rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta pelaksanaan dan penguatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa.

6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan

strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

SS1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan siswa dari segi perilaku, integritas, dan sikap. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan, sedangkan SS3 lebih menitikberatkan pada kualitas sikap guru dan tendik dalam aspek kepribadian, spiritual, dan sosial. Pengukuran ketercapaian SS1 diantaranya melalui Indeks Integritas Siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diukur dari kualitas integritas siswa selama mengikuti UN.

Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS1, SS2, dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 sampai dengan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang

SS4 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T2 yang memfokuskan pada peningkatan peran pelaku budaya. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian SS4 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan ke delapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

3. **Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus**, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

SS5 merupakan sasaran yang berorientasi pada akses PAUD dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan SS6 merupakan sasaran yang memfokuskan pada angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS5 dan SS6. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Disamping itu, SS5 dan SS6 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah, rata-rata angka melek aksara, serta rasio antara 20% partisipasi penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya. Selanjutnya SS5 dan SS6 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antardaerah.

Selanjutnya SS5 difokuskan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing tenaga kerja dengan (a) mengembangkan standar kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN; dan (b) menetapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah. Di sisi lain, SS6 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah

bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang *difabel*.

4. **Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter**, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga

SS7 merupakan sasaran yang berorientasi pada mutu pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. SS8 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu layanan dan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. SS9 merupakan sasaran yang terkait profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga pendidikan, sedangkan SS10 memfokuskan pada lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.

Terwujudnya T4 dapat dilihat dari tercapainya empat sasaran strategis yaitu SS7 sampai dengan SS10. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur keberhasilan T4. Disamping itu, SS7 sampai dengan SS9 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; (b) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; (c) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; dan (d) meningkatnya dan

meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya SS7 dan SS8 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah serta akreditasi paket keahlian SMK. SS8 dan SS9 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian mutu layanan (a) pendidikan dasar melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan dasar (termasuk pemenuhan rasio guru) pada 68% kabupaten dan kota; dan (b) pendidikan menengah melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan menengah pada 90% kabupaten dan kota. SS8 ini mendukung pencapaian sasaran Program Indonesia Pintar (Nawacita 5) terkait sasaran meningkat dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

SS10 mencakup pendidikan keluarga bagi orang tua siswa yang dilaksanakan oleh lembaga/satuan pendidikan masyarakat. Dengan pelaksanaan pendidikan keluarga ini, orang tua/masyarakat akan memiliki pemahaman dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa. Oleh karenanya, SS10 juga mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, dengan sasaran diantaranya (a) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; dan (c) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan, yaitu dengan meningkatnya kualifikasi akademik seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) termasuk guru minimal S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*.

- 5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan,** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
		Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

SS11 merupakan sasaran pencapaian T5 dengan fokus pada pembangunan kebudayaan. Sedangkan SS12 dan SS13 merupakan sasaran pencapaian T5 dengan fokus pada pengembangan mutu dan peran bahasa. Terwujudnya T5 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS11, SS12, dan SS13. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T5. SS11, SS12, dan SS13 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang secara bersama-sama mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat diukur melalui kualitas gotong royong, toleransi, rasa aman, dan penurunan jumlah konflik sosial.

Selanjutnya, SS11 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kesembilan (Nawacita 9) yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; (b) menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa; dan (c) meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan

sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional.

Sedangkan SS12 dan SS13 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian siswa; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; (c) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial yang menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; dan (d) meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan siswa dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, diantaranya Bahasa Indonesia yang sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri siswa sebagai bangsa Indonesia.

Disamping itu, SS12 dan SS13 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang juga mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran tersedianya kurikulum yang andal, diantaranya kurikulum bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing SDM Indonesia. Selanjutnya SS12 dan SS13 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam pembangunan kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa serta pendukung adopsi budaya global yang positif dan produktif, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

6. **Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik** dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

SS14 merupakan sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja Kemendikbud, dan SS15 berorientasi pada pencapaian opini Laporan Keuangan Kemendikbud. Sedangkan SS16 adalah sasaran yang berorientasi pada pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Terwujudnya T6 dapat dilihat dari tercapainya tiga sasaran strategis yaitu SS14, SS15 dan SS16. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T6. Selanjutnya SS14 sampai dengan SS16 mendukung pencapaian:

- a) sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu pencapaian opini WTP Laporan Keuangan Kemendikbud dan pencapaian akuntabilitas kinerja Kemendikbud pada tingkatan yang baik; serta
- b) agenda prioritas pembangunan kedua (Nawacita 2) yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sub agenda meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik kemendikbud, dengan sasaran (i) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (iii) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

Dukungan SS14, SS15, dan SS16 tersebut berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

E. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2015—2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain bergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain bergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kemendikbud memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kemendikbud 2015—2019.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kemendikbud 2015—2019 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan RPJMN kepada Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis.

Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Tantangan dalam peningkatan kualitas insan Indonesia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan;
2. Tantangan dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antardaerah dan diplomasi budaya antarnegara; serta meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;

3. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah;
4. Tantangan dalam pengurangan kesenjangan antarwilayah ialah pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal (122 kabupaten), terdepan/terluar, dan terpencil.

Tantangan utama dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. memperluas pendidikan menengah universal;
2. meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja;
3. meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda; dan
4. melakukan pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja.

Strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan, di antaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter

yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharusan untuk menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3.

1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

Sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana terdapat dalam RPJMN memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

2. Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan (Pembangunan Masyarakat)

Sasaran pokok pembangunan masyarakat sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari berbagai bidang pembangunan, diantaranya pembangunan kebudayaan. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan kebudayaan memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	di atas 0,55 (2012)

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
2	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,49 (2012)
3	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,61 (2012)
4	Jumlah konflik sosial (per tahun)	di bawah 164 (2013)

3. Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi Kemendikbud memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Kualitas pelayanan publik: integritas pelayanan publik (pusat)	9.0
2	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik (Kategori B)	75%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
4	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kerjanya baik (Skor B)	85%

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Insan yang Berkeadilan

Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

2. Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain, didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

3. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional, selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawacita yang menjadi acuannya, yaitu sebagai berikut.

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat Pemerintah selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, tertuang dalam Nawacita nomor 5, 6, 8, 9, dan 2. Khusus agenda pembangunan pendidikan dibahas dalam Nawacita nomor 5, 6, dan 8. Pembangunan kebudayaan dibahas dalam Nawacita nomor 8 dan 9, sedangkan penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola terdapat dalam Nawacita nomor 2.

1. Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015—2019 yaitu sebagai berikut.

- 1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4;

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Akses Pendidikan

Indikator Kinerja Akses Pendidikan	Satuan	2014	2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,2	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2

Catatan: angka partisipasi merupakan angka perkiraan yang dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai dengan hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010

- 2) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
- 3) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah;
- 4) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- 5) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
- 6) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
- 7) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
- 8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
- 9) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; serta
- 10) tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui hal sebagai berikut:
 - a) peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b) penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - c) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - d) peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender;
 - e) peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pemberian dukungan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;

- b) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif;
 - c) penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
 - d) penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - g) penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
 - h) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru;
 - i) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
 - j) penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing;
 - k) penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
 - l) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
 - m) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - n) penyesuaian program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja;

- 4) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui hal sebagai berikut:
 - a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
 - b) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c) peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, kota, dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- 5) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui hal sebagai berikut:
 - a) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21;
 - b) diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c) penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e) peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i) peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- 6) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui hal sebagai berikut:
 - a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

- d) pemanfaatan hasil penilaian siswa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - e) pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel;
 - g) pengembangan sumber daya lembaga.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui hal sebagai berikut:
- a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
 - b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan kriteria mutu yang ketat serta kebutuhan aktual di kabupaten dan kota;
 - c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - d) penguatan kerja sama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
 - e) pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.

2. Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6): Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kemendikbud dalam melaksanakan pembangunan pendidikan ialah, (i) meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi; serta (ii) meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Sasaran, arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

Sasaran pembangunan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan manusia berkualitas, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan;
- 2) terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten, kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan taman tekno dan taman sains yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah pembangunan taman tekno kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai:

- 1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, dan perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
- 2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Dengan arah kebijakan di atas, strategi untuk mencapai sasaran tersebut di atas yaitu pembangunan taman tekno di kabupaten dan kota oleh Kemendikbud sesuai dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsinya.

Sasaran, arah kebijakan, dan strategi peningkatan daya saing tenaga kerja yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

- 1) meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4% menjadi 14,0% dan keahlian menengah dari 30,0% menjadi 42%;
- 2) mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement, MRA*) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), dan jasa logistik;
- 3) mengembangkan standar kompetensi regional (*regional competency standard framework*), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
- 4) menetapkan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
- 5) meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud ialah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui hal sebagai berikut.

- 1) melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;

- 2) mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan, yaitu sebagai berikut:
 - a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan industri;
 - b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; dan
 - c) sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai dengan ketentuan.
- 3) mengembangkan pola pendanaan pelatihan dilakukan melalui hal sebagai berikut:
 - a) menguatkan koordinasi antarpelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili kementerian/lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; dan
 - b) menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya pengelolaan dana pelatihan dengan pola *matching fund* melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan.

3. Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Pendidikan sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan.

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa yaitu sebagai berikut.

- 1) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 4) meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa ialah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui hal sebagai berikut:
 - a) penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), bahasa Indonesia;
 - b) penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - c) penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
 - d) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.

- 2) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui hal sebagai berikut:
 - a) peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik;
 - b) penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan populer *Do It Yourself* (DIY).
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui hal sebagai berikut:
 - a) pemberian penghargaan bagi temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b) peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi;
 - c) penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif, antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

4. Agenda Prioritas Pembangunan 9 (Nawacita 9): Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial merupakan pembangunan kebudayaan yang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespons tantangan perubahan zaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespons modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa, terutama yang terkait dengan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;

- 2) terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- 3) meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai dengan amanat konstitusi;
- 5) menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;
- 6) meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan serta penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional;
- 7) meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai *primordialisme* dan *fundamentalisme* dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
 - b) peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
 - c) perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai, serta tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.
- 2) Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa, melalui hal sebagai berikut:
 - a) pengembangan kepedulian sosial;
 - b) pengembangan pranata gotong-royong;
 - c) penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
 - d) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
 - e) pengembangan karakter dan jati diri bangsa;
 - f) peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum melalui cara berikut:
 - a) sikap tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak-hak warga dan nilai kemanusiaan;
 - b) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui cara berikut:
 - a) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
 - b) pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia);
 - c) pembangunan museum dan pusat kesenian.
- 5) Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui:
 - a) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
 - b) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
 - c) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan.

5. Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut.

a. Subagenda 1: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut.

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (a) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *e-government*

untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

- a) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, serta terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kebijakan yang mengatur kelembagaan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (iv) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
- c) penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (i) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (ii) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (iii) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing K/L/D; (iv) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (v) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (vi) penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (vii) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (viii) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

b. Subagenda 2: Penyempurnan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; (c) terimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- a) restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi (i) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS); (ii) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergis antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah;
- b) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (i) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- c) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain, (i) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (iv) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (v) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain, (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii)

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

c. Subagenda 3: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:

1) Sasaran

Sasaran yang akan dicapai yaitu, (a) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (c) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

- a) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (ix)

penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

- b) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya yang akan ditempuh dengan strategi yaitu, (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) penguatan literasi media terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2015—2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*-HDI), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*-AEC) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*—CSICH) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on*

the Protection and promotion of the diversity and cultural expression), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Perincian ada dalam uraian berikut ini.

1. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 5 (Nawacita 5): Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia (Pembangunan Pendidikan)

a. Sasaran Strategis 1, 2 dan 3 (SS1, SS2 dan SS3) dari (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya SS1, SS2, dan SS3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat mengekspresikan dirinya lebih baik dan mendorong siswa untuk membentuk perilaku positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya orang tua memiliki peran di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan perilaku positif yang terbentuk di sekolah.
- 2) Meningkatkan peran orang tua/keluarga dalam mendorong anak untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah serta menerapkan norma-norma/perilaku positif yang diajarkan di sekolah dalam bersosialisasi di lingkungan keluarga/masyarakat sekitar tempat tinggalnya.
- 3) Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tendik sehingga terbentuk guru dan tendik yang meningkat kinerjanya mampu memiliki pengetahuan di bidangnya dengan baik dan kualitas sikapnya dari waktu ke waktu meningkat yang antara lain tercermin dalam peningkatan kualitas sikap berupa kualitas kepribadian yang santun, kualitas spiritual yang mampu membimbing anak didik untuk dapat berakhlak/karakter baik, serta sikap sosial yang mampu menanamkan rasa sosial yang tinggi bagi anak didik, sehingga guru dan tendik dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi anak didik.

- 4) Meningkatkan peran guru sebagai pendidik/suri tauladan bagi siswa dengan cara memperbaiki tingkat kehadiran/partisipasi guru melalui: (i) pemberdayaan guru untuk mengajar lebih dari satu kelas dan/atau mengajar lebih dari satu mata pelajaran di sekolah yang sama; (ii) pengurangan tugas-tugas administrasi bagi guru; dan (iii) menumbuhkan gerakan/kampanye nasional tentang akuntabilitas guru sebagai pendidik dan panutan di sekolah dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini melalui pembagian kewajiban dan kewenangan yang jelas antarkementerian dan jenjang pemerintahan, memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Indonesia, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD, dan organisasi profesi untuk meningkatkan PAUD. Pembiayaan berasal dari berbagai sumber, termasuk dana desa, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

b. Sasaran Strategis 5 dan 6 (SS5 dan SS6) dari Tujuan 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Peningkatan akses difokuskan pada ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, sehingga diperlukan arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya SS5 dan SS6 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses PAUD dengan cara (a) perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung, tinggal di daerah 3T dan anak berkebutuhan khusus; dan (b) penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
- 2) Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas adalah melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas melalui (i) penyediaan bantuan bagi siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (ii) penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah pascakonflik, etnik minoritas, masyarakat yang mengalami masalah sosial; serta di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dengan tetap mempertahankan kesetaraan gender; (iii) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; (iv) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (v) pembudayaan/perluasan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (vi) penyediaan pendidikan kecakapan hidup/keterampilan adaptif sehingga anak dengan disabilitas dapat hidup lebih mandiri dan siap beradaptasi untuk berkarya dalam kehidupan bermasyarakat.

- 3) Meningkatkan akses pendidikan menengah melalui pencaangan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja, dengan menerapkan strategi (a) peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap; dan ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang maritim, pertanian, pariwisata, industri manufaktur serta ekonomi kreatif; (b) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh siswa; (c) pemihakan pada siswa miskin agar dapat melanjutkan ke pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (d) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (e) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan menengah serta masyarakat yang mengalami bencana alam dan masalah sosial; dan (f) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.
 - 4) Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi melalui (i) pembenahan penjurusan SMK sampai di tingkat kecamatan; (ii) pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat–pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah; (iii) penerapan KKNi untuk semua bidang kejuruan di SMK; (iv) peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri.
 - 5) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui (a) penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industri untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya, dan (b) penyediaan insentif bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.
 - 6) Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua, baik di sekolah maupun di rumah.
- c. **Sasaran Strategis 7, 8, 9 dan 10 (SS7, SS8, SS9 dan SS10) dari Tujuan 4 (T4): Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter**
- Peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, sehingga arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya SS7, SS8, SS9, dan SS10 ialah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan PAUD dengan menggunakan strategi (a) penjaminan bahwa standar nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD; (b) penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru; (c) penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya; (d) pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karier pendidik.
- 2) Melakukan penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui cara (a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar; (b) peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar; (c) penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah; (d) pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan (e) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.
- 3) Melaksanakan penataan kembali kurikulum dengan strategi berupa, (a) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21; (b) diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan keunggulan serta karakteristik lokal; (c) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan; (d) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (e) peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas; (f) pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah; (g) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru; (h) peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam penilaian berstandar nasional, misalnya ujian nasional maupun penilaian berstandar internasional; (i) peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi sebagai kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan keseharian untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin. Peningkatan kualitas pembelajaran siswa sekolah dasar (hingga kelas 3 SD) pada daerah 3T dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang minim dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Ibu sebagai pengantar

pendidikan; (j) peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni serta sikap (misalnya: kepemimpinan, toleransi, dan kewirausahaan); (k) penyiapan guru dan tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik; (l) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan; dan (m) peningkatan kompetensi kognitif siswa bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial;

- 4) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara (a) penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing; (b) penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (c) peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; (d) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta (e) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.
- 5) Meningkatkan tata kelola pendidikan menengah melalui strategi (a) pelaksanaan penilaian terhadap sekolah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya; (b) penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah baru; dan (c) penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah swasta dan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah.
- 6) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif melalui upaya: (a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif diantaranya dengan memperbaiki keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa; (c) pemantauan, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan melalui pemanfaatan hasil ujian nasional; (d) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; (e) meninjau kembali peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (f) pengembangan sumber daya lembaga penilaian

pendidikan di daerah; (g) pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; dan (h) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan penilaian formatif.

- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui cara (a) peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; (b) pendidikan kesetaraan; dan (c) penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta pemberdayaan masyarakat melalui program desa literasi, desa vokasi.
- 8) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, melalui penerapan strategi: (a) penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada BLK dan kursus nonformal; (b) penguatan kerja sama dengan BLK dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan; (c) peningkatan kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; dan (d) penguatan proses akreditasi yang lebih efisien dan efektif terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- 9) Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, dengan strategi penyalarsan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah, terutama kebutuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbasis kemaritiman.
- 10) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, melalui strategi: (a) penguatan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (b) pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (c) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan (d) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
- 11) Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui strategi: (a) pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; (b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten dan kota; (c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan tenaga kependidikan dengan

memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; (d) penguatan kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; dan (e) pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di daerah khusus (3T) dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.

12) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan orang tua/keluarga serta memperkuat peran orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, melalui pemberian dan peningkatan wawasan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan prakeaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

2. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 6 (Nawacita 6): Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (Pembangunan Pendidikan)

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, adalah SS5 dan SS6 dari Tujuan 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam hal ini, SS5 mendorong pencapaian T3 melalui peningkatan kapasitas akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, peningkatan kemampuan manusia dan Iptek untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri sangat diperlukan. Ketersediaan manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap kluster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK yang bersifat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi ini tentunya merupakan motivasi dalam pembangunan inovasi dan peningkatan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

1) meningkatkan akses pendidikan menengah, dengan menerapkan strategi (i) peningkatan ketersediaan SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan ketersediaan SMK yang mendukung

pembangunan bidang maritim, pertanian, pariwisata, industri manufaktur serta ekonomi kreatif; (ii) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh siswa SMK; (iii) pemihakan pada siswa SMK yang miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (iv) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan SMK untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (v) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMK yang berkualitas;

- 2) pembangunan taman tekno dan taman sains di kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai, (i) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan (ii) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;
- 3) menyelaraskan bidang studi/keahlian SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui: (i) pembenahan penjurusan SMK di tingkat kabupaten dan kota; (ii) pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah; (iii) penerapan KKNi untuk semua bidang kejuruan di SMK; dan (iv) peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
- 4) meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara (i) penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (ii) peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja; (iii) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta (iv) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.

3. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan)

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, adalah:

- a. Sasaran Strategis 4 (SS4) dari Tujuan 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan;
- b. Sasaran Strategis 7, 8, 9, dan 10 (SS7, SS8, SS9, dan SS10) dari Tujuan 4 (T4): Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter; dan
- c. Sasaran Strategis 11, 12, dan 13 (SS11, SS12, dan SS13) dari Tujuan 5 (T5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Revolusi karakter bangsa atau yang dikenal juga sebagai revolusi mental dapat dijalankan, baik melalui pendidikan maupun kebudayaan yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Beberapa mata pelajaran yang relevan antara lain, (i) sejarah yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian; (ii) geografi yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan; (iii) antropologi/sosiologi yang bermanfaat untuk memperkuat pemahaman *multikulturalisme*, *pluralisme*, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; (iv) bahasa Indonesia sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan yang memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didikan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru menjadi suri tauladan bagi siswa. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik jika diajarkan hanya melalui *instructional learning approach* semata. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- 1) Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan yaitu melakukan penguatan perilaku pelaku budaya yang mandiri dan berkepribadian melalui:
 - a) meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya;
 - b) meningkatkan mutu karya dan pelaku budaya serta meningkatkan mutu layanan dalam pelestarian warisan budaya;
 - c) memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

- 2) Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
- a) mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Strategi yang diperlukan berupa penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi) dan bahasa Indonesia);
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui: (i) penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; (ii) pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan (iii) peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *role model* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik;
 - c) membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter melalui, (i) pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan (ii) pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.
- 3) Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dilaksanakan dengan strategi, (i) pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (ii) pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra; (iii) pembinaan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra; (iv) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; (v) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah; serta (vi) pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, perlindungan dan sastra di daerah.

4. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 9 (Nawacita 9): Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Pembangunan Kebudayaan)

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah SS11, SS12 dan SS13 dari T5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan jati diri bangsa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

- a. memperkuat karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui cara, (i) pendidikan karakter dan pekeriti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (ii) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; (iii) pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (iv) perlindungan, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa; (v) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; (vi) peningkatan sensor film dan media informasinya; (vii) pembinaan dan pengembangan dan perlindungan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni; (viii) pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental; (ix) penayangan film/video bertema revolusi mental di layar *videotrone* atau layar tancap di tiap kecamatan; (x) penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan (xi) pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial budaya;
- b. meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya melalui (i) peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat; (ii) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan karya budaya; (iii) pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (iv) peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya; (v) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung, dan penghargaan; (vi) fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif; (vii) pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (viii) penancangan *pilot project* dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan; (ix) penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi *role model* dalam revolusi mental;

- c. melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) melalui cara, (i) peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (ii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi; (iii) pencatatan warisan budaya tak benda; (iv) penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (v) peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan (vi) sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya;
- d. mengembangkan promosi dan diplomasi budaya melalui cara, (i) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri; (ii) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; (iii) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; dan (iv) peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia;
- e. mengembangkan sumber daya kebudayaan melalui cara, (i) peningkatan kualitas insan kebudayaan; (ii) peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat; (iii) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iv) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (v) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan (vi) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.

5. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) pada Setiap Tujuan Strategis (T) dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2): Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya (Pembangunan Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola)

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 2, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, adalah SS14, SS15, dan SS16 dari T6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Sistem tata kelola dalam T6 ini terdiri atas dua aspek, yaitu (i) tata kelola pembangunan pendidikan; dan (ii) tata kelola Kemendikbud. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan, sehingga penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah perlu dilakukan. Di sisi lain, tata kelola Kemendikbud berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Kemendikbud yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yaitu (i) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; (ii)

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Kemendikbud dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis di atas difokuskan menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dirinci sebagai berikut.

- 1) Arah kebijakan dan strategi peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran yaitu:
 - a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, yang dilaksanakan melalui strategi: (i) perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru; (ii) pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan individu untuk memperbaiki distribusi guru di dalam kabupaten/kota; dan (iii) pemanfaatan momentum pensiun guru dan perluasan akses pendidikan menengah universal untuk meningkatkan rasio guru: murid dan mendapatkan guru yang berkualitas;
 - b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan dengan cara dilakukan peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
 - c) memperkuat kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah untuk mendukung efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan di daerah.
- 2) Arah kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola pendidikan, yaitu:
 - a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi dengan menerapkan strategi: (i) penguatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan; dan (ii) penguatan kemitraan antara pusat dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota;
 - b) memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah dengan cara (i) pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya; dan (ii) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan;
 - c) memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui strategi (i) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

- pendidikan di sekolah; (ii) peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam melaksanakan MBS; (iii) peningkatan kapasitas kabupaten dan kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan; dan (iv) penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel;
- d) memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui strategi (i) pengaturan secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas; (ii) peningkatan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan (iii) penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta;
- e) memperkuat sistem informasi pendidikan dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan; (iii) penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan; dan (iv) penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan kelembagaan Kemendikbud yang efektif, efisien, dan sinergis. Strategi yang ditempuh, antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan Kemendikbud; dan (ii) penataan kelembagaan internal kemendikbud yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergitas antarlembaga, baik di pusat maupun daerah;
- 2) menguatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi Kemendikbud melalui penerapan strategi (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola reformasi birokrasi Kemendikbud; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;

- 3) menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT), memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik Kemendikbud; (iii) mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standardisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- 5) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; (vi) penguatan pusat media, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia berkualitas bidang komunikasi dan informasi; dan (ix) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

- 6) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media;
- 7) menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- 8) menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; (iv) penetapan *quick wins* penerapan *e-government*; serta (v) pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh Kemendikbud;
- 9) menerapkan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara, (i) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii) penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel

melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi provinsi, kabupaten, dan kota; dan (iv) pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;

- 10) menguatkan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kemendikbud, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;
- 11) meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pendidikan dan kebudayaan; (ii) peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi pendidikan dan kebudayaan daerah.

Arah kebijakan Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode 2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015—2019, Kemendikbud menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Struktur program dan unit eselon I yang bertanggung jawab untuk mengelola program dan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 3.5. Perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3.5 Struktur Program dan Eselon I Kemendikbud

NO	PROGRAM	ESELON I
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	Inspektorat Jenderal
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Ditjen PAUD dan Dikmas
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM	ESELON I
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pelestarian Budaya	Ditjen Kebudayaan

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kemendikbud. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu. IKP yang sudah berisi angka capaian dan target di bab berikutnya.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 2) peningkatan efektivitas birokrasi serta Tata Kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya;
- 3) peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Sasaran Program dan IKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN
		Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang dikbud
2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud (LK)
3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi
4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tata laksana yang efektif	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan
		Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi
		Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif
		Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya
5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan	Persentase pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan
		Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK
		Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran
		Persentase e-layanan kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK
6	Meningkatnya akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO
		Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN
7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan
		Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik
		Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah
8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud
		Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif
9	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film Indonesia	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor
10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman, penyensoran film, dan iklan film Indonesia	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia
		Persentase perizinan dan peredaran film
		Persentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman
11	Terselenggaranya tata kelola setjen dan pengelolaan BMN kementerian yang akuntabel	Indeks kepuasan layanan Setjen
		Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi
12	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah aparatur Kemdikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan
13	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud. Perincian SP dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Sasaran Program dan IKP
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud WTP
		Tercapainya Skor LAKIP Kemendikbud menjadi baik
		Satker Kemendikbud WBK

c. Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
- 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
- 3) peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Sasaran Program dan IKP
Program Pendidikan Dasar dan Menengah

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	APM SD/SDLB
		APK SD/SDLB/Paket A
		Angka Putus Sekolah SD
		APM SMP/SMPLB

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
		APK SMP/SMPLB/Paket B
		Angka Putus Sekolah SMP
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP
		Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SD
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP
2.	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
		Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK
3.	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB/Paket C	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
		Angka putus sekolah SMA/SMK
4.	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah
5.	Peningkatan kualitas pembelajaran	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)
		Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah
		Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
		Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
		Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja
6.	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten dan kota	Persentase kabupaten dan kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model
		Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B
7.	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
8.	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan akses PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik, dan mental;
- 2) peningkatan jaminan kualitas pelayanan PAUD, pendidikan nonformal/dikmas/kesetaraan dan pembelajaran informal;
- 3) penyelarasan standar kompetensi pendidikan-pelatihan, dan kursus serta calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Sasaran Program dan IKP
Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
2.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
3.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	% Angka melek aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
		Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi
		Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
4.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota.	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga
5.	Terwujudnya tata kelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah model/program PAUD dan dikmas yang dibakukan dan diterapkan

e. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan dengan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan perbukuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- 2) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang pendidikan;
- 3) Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan;
- 4) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan bidang kebudayaan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan;
- 5) fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi;
- 6) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sasaran Program dan IKP
Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan	Persentase hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
		Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang digunakan
		Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang kebudayaan	Persentase rekomendasi kebijakan kebudayaan yang digunakan
		Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan
3.	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP
		Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
		Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai SNP
4.	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/skor LAKIP	Perolehan nilai LAKIP Balitbang

f. Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Perincian SP dan IKP Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Sasaran Program dan IKP
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya Skor PISA di tahun 2019 sebesar 414	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra
		Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul
		Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra
		Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan
2.	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik (persentase kabupaten dan kota penerima anugerah bahasa)	Jumlah masyarakat yang terlayani program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra
		Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
3.	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia	Jumlah akses diplomasi kebahasaan
4.	Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi
		Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
5.	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan	Nilai LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

g. Program Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Program ini bertujuan untuk mencapai:

- 1) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas;
- 2) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikdas;
- 3) peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikmen;
- 4) peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 5) peningkatan pengembangan karier, penghargaan, dan perlindungan serta kesejahteraan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan masyarakat;
- 6) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru, dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
- 7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 8) peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Perincian SP dan IKP Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Sasaran Program dan IKP
Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD-Dikmas dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i> , yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru bersertifikat pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual, dan sosial) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus

NO.	SASARAN PROGRAM	IKP
2.	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan Dikdasmen dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i> , yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru bersertifikat pendidik
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik
		Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan dikmas yang merata di seluruh kabupaten dan kota	Persentase PTK PAUD dan dikmas berkualifikasi S1/D4
		Persentase PTK PAUD dan dikmas memperoleh peningkatan kompetensi
		Persentase PTK PAUD dan dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan
		Persentase PTK PAUD dan dikmas yang meningkat kariernya
		Persentase PAUD dan dikmas yang memiliki PTK sesuai dengan SNP
4.	Peningkatan manajemen guru dan pendidikan keguruan	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki GTK sesuai dengan SNP
		Persentase GTK dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4
		Persentase GTK dikdas meningkat kariernya
		Persentase GTK dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan
5.	Tersedianya GTK di SM pada daerah khusus	Persentase GTK di SM pada daerah khusus
6.	Meningkatnya pengembangan karier, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan	Persentase GTK SM yang meningkat kariernya
		Persentase GTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4
		Guru SM sesuai dengan mapel/bidang keahlian
		Persentase GTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan
		Tersedianya GTK di SM pada daerah khusus
7.	Meningkatnya jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup
8.	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumber daya, dan tata kelolanya

h. Program Pelestarian Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan diplomasi kebudayaan. Perincian SP dan IKP Program Pelestarian Budaya dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Sasaran Program dan IKP
Program Pelestarian Budaya

NO	SASARAN PROGRAM	IKP
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Jumlah mata budaya yang dilestarikan Jumlah negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbud, dijelaskan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Kerangka Regulasi

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
1	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun).
2	RUU Kebudayaan	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan hasil budaya mempunyai arah yang jelas.
3	RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan.
4	RPP tentang Museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah diimplementasikan.

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
5	RPP tentang Pengelolaan Guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan.
7	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, baik lembaga maupun program studi.
8	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
9	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil risiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan.
10	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarnya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru.
11	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Memperjelas dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan, baik di satuan pendidikan maupun K/L.
12	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015—2019.
13	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

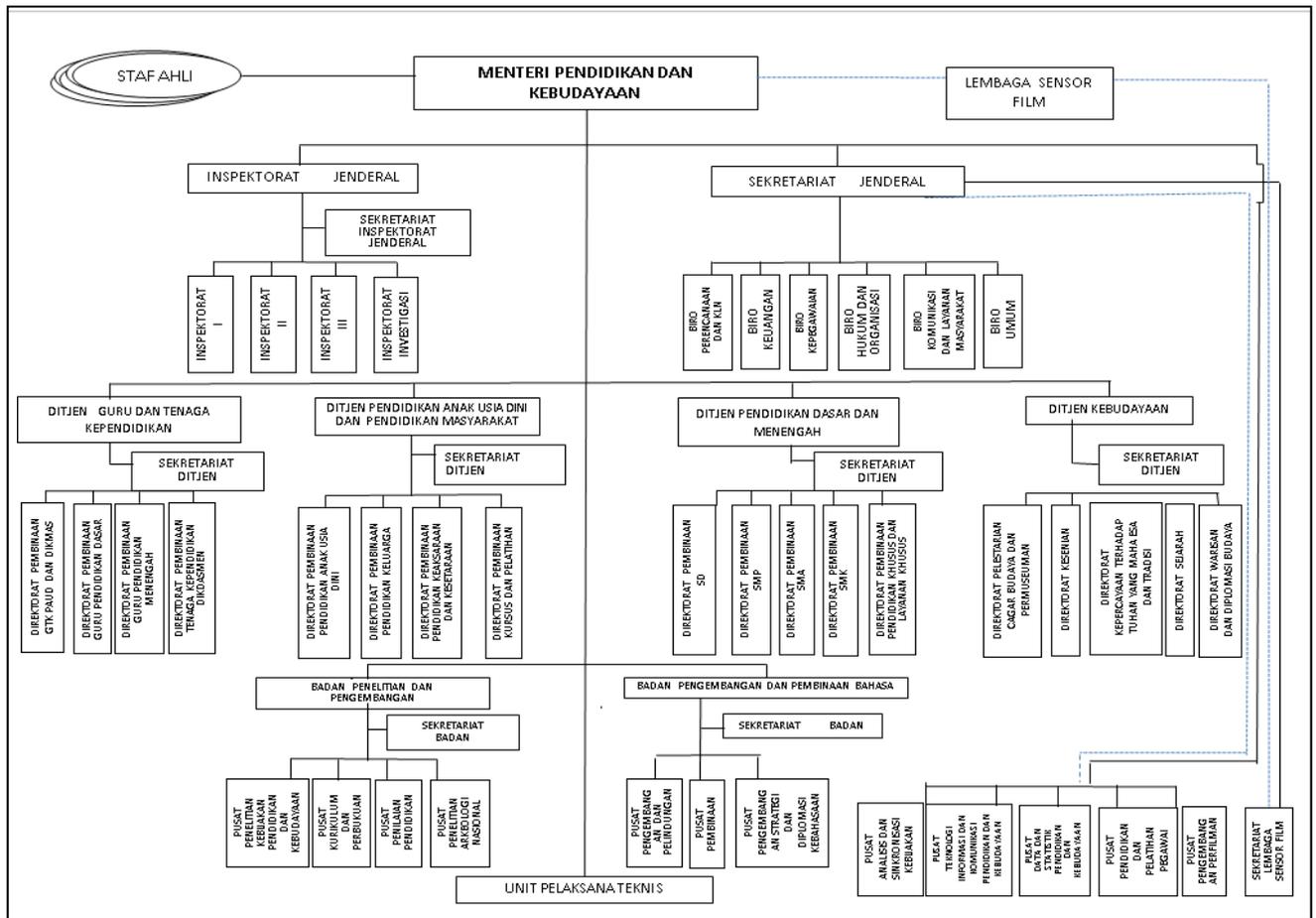
NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
14.	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.
15.	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru, dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan.
16	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaannya.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2015—2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019.

Struktur organisasi Kemendikbud 2015—2019 ditunjukkan pada gambar 3.1. Perincian program dan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap bagian struktur dapat dilihat pada Tabel 3.15



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Eselon I dan Eselon II Kemendikbud

Untuk memperjelas bagan organisasi, program, dan kegiatan serta penanggungjawab Eselon I dan Eselon II dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Penanggung jawab Eselon I dan Eselon II

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Sekretariat Jenderal
1.1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan KLN	Biro Perencanaan dan KLN
1.2	Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	Biro Keuangan
1.3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Biro Kepegawaian
1.4	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
1.5	Peningkatan Layanan Prima di bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
1.6	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	Biro Umum
	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
1.7	Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan	Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
1.8	Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pusat Teknologi Informasi dan komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.11	Pengembangan Perfilman	Pusat Pengembangan Perfilman
1.12	Pengembangan Perfilman, Penyensoran Film, dan Iklan Film Indonesia	Lembaga Sensor Film (LSF)
1.13	Penyediaan Layanan Pendidikan antarnegara Asean	Pusat Analisis Kebijakan
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	Inspektorat Jenderal
2.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal
2.2	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Inspektorat I
2.3	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Inspektorat II
2.4	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Inspektorat III
2.5	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	Inspektorat Investigasi
3	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Ditjen Dikdasmen
3.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dikdasmen	Setditjen Dikdasmen
3.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Dit. Pembinaan SD
3.3	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Dit. Pembinaan SMP
3.4	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Dit. Pembinaan SMA
3.5	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Dit. Pembinaan SMK
3.6	Peningkatan Akses dan Mutu PKLK	Dit. Pembinaan PKLK
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Ditjen PAUD dan Dikmas
4.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas	Setditjen PAUD dan Dikmas
4.2	Penyediaan Layanan Pendidikan PAUD	Dit. Pembinaan PAUD
4.3	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Dit. Pembinaan Pendidikan Keluarga
4.4	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Dit. Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
4.5	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDIKBUD	Balitbang
5.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Litbang Kemendikbud	Sekretariat Balitbang
	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ESELON I/ESELON II
5.2	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
5.3	Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
5.4	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Pusat Penilaian Pendidikan
5.5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	Pusat Penelitian Arkenas
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.2	Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan
6.3	Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan
6.4	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
7.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru dan Tendik Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tendik	Sekretariat Ditjen Guru dan Tendik
7.2	Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Dit. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
7.3	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
7.4	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
7.5	Pembinaan Tendik Dikdasmen	Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen
8	PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Ditjen Kebudayaan
8.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kebudayaan Pengembangan Galeri Nasional Pelestarian Nilai Budaya Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Pengelolaan Permuseuman	Sekretariat Ditjen Kebudayaan
8.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
8.3	Pembinaan Kesenian	Dit. Kesenian
8.4	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
8.5	Pengembangan Sejarah	Dit. Sejarah
8.6	Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	Dit. Warisan dan Diplomasi Budaya

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

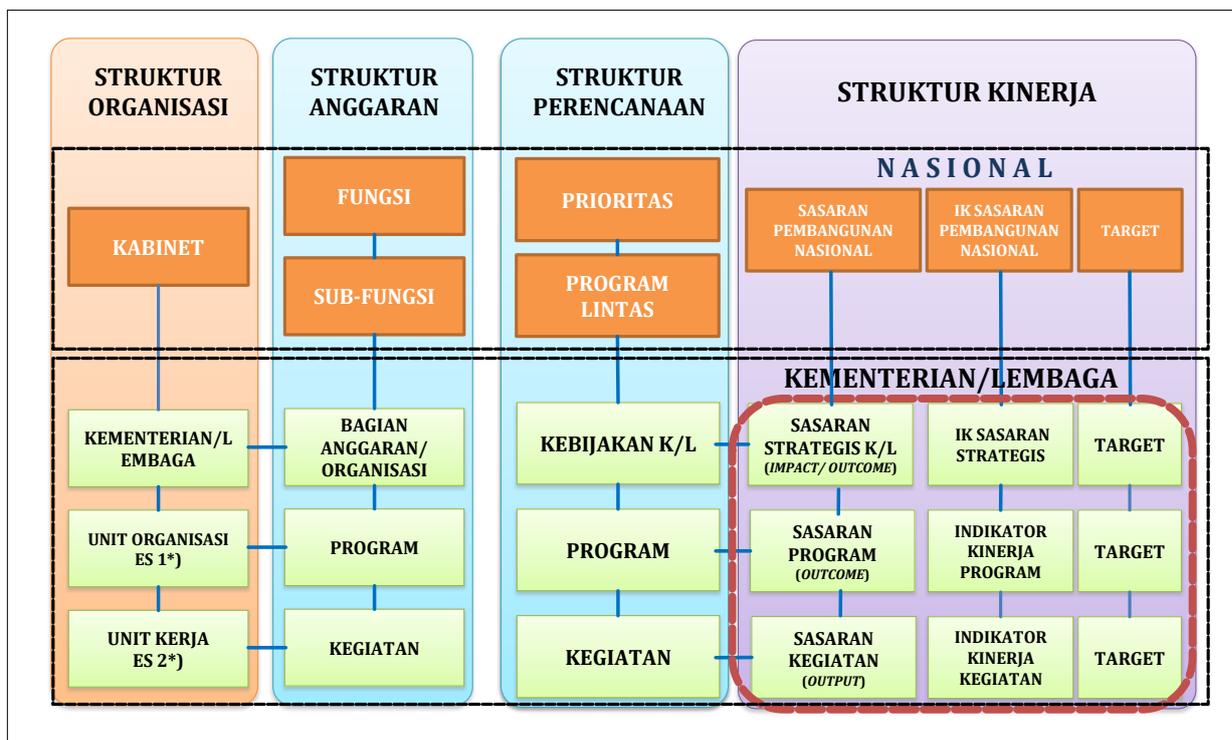
A. Target Kinerja

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Eselon I dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit Eselon I yang dikelola Kemendikbud sebagaimana dibahas dalam Bab III bagian D tentang Kerangka Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015—2019). Penjelasan dari setiap target kinerja Kemendikbud, adalah sebagai berikut:

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kemendikbud yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis 2015—2019 disajikan dalam tabel 4.1 sampai dengan 4.6.

a. T.1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Pendidikan

Tabel 4.1

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa							
IKSS 1.1	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik	Nilai	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik	Baik
IKSS 1.2	Indeks integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	indeks	67/67	68/69	70/72	72/74	74/76	77/78
IKSS 1.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan							
IKSS 2.1	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang	org	0	255.500	970.900	1.890.700	3.014.900	4.343.500
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial							
IKSS 3.1	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%	%	15.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0

b. T.2: Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

Tabel 4.2

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T2

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan							
IKSS 4.1	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000	org	800,000	900,000	1,200,000	1,400,000	1,530,000	1.720.000

c. T.3: Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Tabel 4.3

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota							
IKSS 5.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%	%	68,10	70,10	72,10	74,30	76,40	78,70
IKSS 5.2	Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	%	40.0	43.0	46.0	49.0	52.0	54.6
IKSS 5.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga	lbg	1.050	1.121	2.621	4.121	5.871	7.871
IKSS 5.4	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%	%	96,10	96,39	96,43	96,51	96,59	96,73
IKSS 5.5	Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	%	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	15,60
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah							
IKSS 6.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKSS 6.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKSS 6.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
IKSS 6.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72
IKSS 6.5	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71
IKSS 6.6	APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05
IKSS 6.7	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9	Rasio	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9
IKSS 6.8	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6	Rasio	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS 6.9	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Thn	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8

d. T.4: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Tabel 4.4
 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan							
IKSS 7.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga	lbg	33.801	34.801	36.051	37.851	40.126	42.926
IKSS 7.2	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%	%	51,38	55,00	59,3	63,1	67,2	71,38
SS 8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah							
IKSS 8.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20
IKSS 8.2	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%	%	50,50	56,00	62,00	68,00	75,00	81,00
IKSS 8.3	Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%	%	77,07	78,66	80,24	81,83	83,41	85,00
IKSS 8.4	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%	%	48,17	51,54	54,90	58,27	61,63	65,00
IKSS 8.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49
IKSS 8.6	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	73,50	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37
IKSS 8.7	Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	0	0	40,00	50,00	60,00	75,00
IKSS 8.8	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	%	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	68,00

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS 8.9	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1	%	0	60,00	65,00	75,00	80,00	90,00
IKSS 8.10	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 8.11	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 8.12	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5
IKSS 8.13	Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	%	55,00	65,00	70,00	73,00	76,00	80,00
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan							
IKSS 9.1	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%	%	60,70	65,60	71,70	77,80	83,90	95,00
IKSS 9.2	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,0%	%	11,00	16,0	21,0	26,0	31,0	37,0
IKSS 9.3	Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%	%	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00
IKSS 9.4	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%	%	45,00	50,00	55,00	59,00	64,00	68,43
IKSS 9.5	Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%	%	58,00	61,00	65,00	68,00	72	77,50
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga							
IKSS 10.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga	Lbg	0	39.724	52.628	64.224	75.82	87.417

e. T.5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Tabel 4.5

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T5

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya							
IKSS 11.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)	skor	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00	37,00
SS 12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia							
IKSS 12.1	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414	skor	396	399	402	406	410	414
IKSS 12.2	Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5	nilai	5,5 dan 6,0	5,8 dan 6,4	6,3 dan 6,8	6,6 dan 6,9	6,9 dan 7,2	7,2 dan 7,5
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean							
IKSS 13.1	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara	negara	2	2	3	4	5	6
IKSS 13.2	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang	org	600	980	1.310	2.100	2.300	2.500

f. T.6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Tabel 4.6
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T6

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud							
IKSS 14.1	Skor LAKIP minimal sebesar 80	Skor	72	80	80	80	80	80
SS15	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)							
IKSS 15.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan							
IKSS 16.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77	Indeks	72	73	74	75	76	77

2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) di tiap Eselon I di lingkungan Kemendikbud dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut dijabarkan dalam tabel 4.7 sampai dengan 4.14.

a. P1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 4.7
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P1

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 1.1	Terselenggaranya Sistem Perencanaan yang Andal							
IKP 1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	%	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00
IKP 1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SLN	%	89,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
IKP 1.1.3	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral bidang Dikbud	%	72,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel							
IKP 1.2.1	Opini BPK terhadap LK Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SP 1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)							
IKP 1.3.1	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30,00	47,00	56,00	66,00	77,00	85,00
SP 1.4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif							
IKP 1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang Dikbud yang dibutuhkan	Naskah	162	150	160	170	180	190
IKP 1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	Msl hkm	46	50	60	70	80	85
IKP 1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Unit	140	140	140	140	140	140
IKP 1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	Unit	140	140	140	140	140	140
IKP 1.4.5	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	Jabt	425	425	425	425	425	425
SP 1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan							
IKP 1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan	%	47,60	52,10	56,60	61,40	66,70	70,60
IKP 1.5.2	Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK	Jdl	9.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKP 1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	Sek	55.063	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800
IKP 1.5.4	Presentase e-layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 1.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN							
IKP 1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60,00	67,10	74,20	81,30	88,40	95,50
IKP 1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN	%	50,00	58,30	66,60	74,90	83,20	91,50
SP 1.7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan							
IKP 1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang dikbud	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IKP 1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
IKP 1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	%	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP 1.8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat							
IKP 1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	ind eks	72	73	74	75	76	77
IKP 1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25,00	50,00	65,00	80,00	90,00	100,00
SP 1.9	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film Indonesia							
IKP 1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00
SP 1.10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman							
IKP 1.10.1	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
IKP 1.10.2	Presentase perizinan dan peredaran film	%	40,00	46,00	52,00	58,00	64,00	70,00
IKP 1.10.3	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
SP 1.11	Terselenggaranya Tata Kelola Setjen dan Pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel							
IKP 1.11.1	Indeks Kepuasan Layanan Setjen	Ind eks	60	87	89	91	93	95

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 1.11.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SP 1.12	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai							
IKP 1.12.1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	%	20,00	30,00	41,00	50,00	60,00	100,00
IKP 1.12.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 1.13	Terselenggaranya Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan							
IKP 1.13.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	dok	1	1	1	1	1	1

b. P2: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud

Tabel 4.8
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P2

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 2.1	Menguatnya Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal Kemendikbud							
IKP 2.1.1	Tercapainya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 2.1.2	Tercapainya skor Lakip Kemendikbud menjadi baik	skor	80	80	80	80	80	80
IKP 2.1.3	Satker Kemendikbud WBK	%	3,00	3,00	11,00	18,00	25,00	32,00

c. P3: Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 4.9

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P3

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 3.1	Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas							
IKP 3.1.1	APM SD/SDLB	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKP 3.1.2	APK SD/SDLB/Paket A	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKP 3.1.3	Angka putus sekolah SD	%	1,08	1,04	1,01	0,88	0,68	0,57
IKP 3.1.4	APM SMP/SMPLB	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72
IKP 3.1.5	APK SMP/SMPLB/Paket B	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
IKP 3.1.6	Angka putus sekolah SMP	%	1,15	1,14	1,11	1,08	1,03	1,01
IKP 3.1.7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP	%	83,09	83,40	83,64	84,95	86,89	87,67
IKP 3.1.8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	siswa	3.708	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582
IKP 3.1.9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP 3.1.10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 3.2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C							
IKP 3.2.1	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	%	70.82	73.82	76.68	79.08	80.51	82.18
IKP 3.2.2	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	81.00	81.50	82.00	84.00	86.00	88.00
IKP 3.2.3	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100	100	100	100	100
SP 3.3	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB/ Paket C							
IKP 3.3.1	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	siswa	3.700	3.856.476	3.856.676	3.856.899	3.856.979	3.858.211
IKP 3.3.2	Angka putus sekolah SMA/SMK	%	1,66	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80
SP 3.4	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019							
IKP 3.4.1	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 sekolah menengah	%	71.00	76.60	82.50	88.30	94.20	100.00

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 3.5	Peningkatan kualitas pembelajaran							
IKP 3.5.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	sek	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
IKP 3.5.2	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP 3.5.3	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	medali	140	141	148	152	160	168
IKP 3.5.4	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	15.00	15.00	17.00	24.00	32.00	40.00
IKP 3.5.5	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	21.00	22.00	29.00	37.00	45.00	53.00
IKP 3.5.6	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	60.45	61.13	61.24	61.35	61.46	61.49
IKP 3.5.7	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	73.98	74.89	75.01	75.13	75.25	75.37
IKP 3.5.8	SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja	%	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0
SP 3.6	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten/kota							
IKP 3.6.1	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	21.10	29.4	49.9	70.5	90.0	100.0
IKP 3.6.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	60	65	70	75	80	85
SP 3.7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)							
IKP 3.7.1	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	0	14	29	52	76	95
SP 3.8	Tata kelola ditjen pendidikan dasar dan menengah yang baik							
IKP 3.8.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	%	80	85	87	89	92	95
IKP 3.8.2	Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik)	nilai	70	72	73	75	78	80

d. P4: Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.10

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P4

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 4.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota							
IKP 4.1.1	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	68.10 %	70.06 %	72.13 %	74.28 %	76.44 %	78.67 %
IKP 4.1.2	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	lbg	33,801	34,801	36,051	37,851	40,126	42,926
SP 4.2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota							
IKP 4.2.1	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	org	551,111	602,111	670,111	772,111	908,111	1,061,111
IKP 4.2.2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	lbg	121	1,121	2,621	4,121	5,871	7,871
SP 4.3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota							
IKP 4.3.1	Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	%	96%	97%	97%	97%	97%	98%
IKP 4.3.2	Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi	lbg	309	223	495	795	1,108	1,445

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 4.3.3	Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah	org	-	6,151	54,604	150,746	325,737	556,501
SP 4.4	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota.							
IKP 4.4.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	lbg	0	39,724	52,628	64,224	75,820	87,417
IKP 4.4.2	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	org	0	255,500	970,900	1,890,700	3,014,900	4,343,500
SP 4.5	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota							
IKP 4.5.1	Jumlah model/program PAUD dan Dikmas yang dibakukan dan diterapkan	Nas kah	90	164	250	336	422	508

e. P5: Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 4.11
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P5

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 5.1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan							
IKP 5.1.1	Persentase Hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%		60.0	70.0	80.0	90.0	95.0

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 5.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang digunakan	%		50.0	60.0	70.0	75.0	80.0
IKP 5.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	%		80.0	86.0	92.0	96.0	100.0
SP 5.2	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang kebudayaan							
IKP 5.2.1	Persentase rekomendasi kebijakan kebudayaan yang digunakan	%		50.0	60.0	70.0	75.0	80.0
IKP 5.2.2	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan	%		50.0	60.0	70.0	75.0	80.0
SP 5.3	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi							
IKP 5.3.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%		81.0	86.0	91.0	96.0	98.0
IKP 5.3.2	Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP	%		3.0	5,4	8.0	10,4	13.0
IKP 5.3.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	Jumlah		6	6	6	6	6
IKP 5.3.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
SP 5.4	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/Skor Lakip							
IKP 5.4.1	Perolehan nilai LAKIP Balitbang	nilai		70	74	78	82	85

f. P6: Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 4.12
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P6

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 6.1	Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414							
IKP 6.1.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra	jml		37	43	43	43	43
IKP 6.1.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul	jml		11.224	33.734	33.734	33.734	33.734
IKP 6.1.3	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	jml		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
IKP 6.1.4	Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan	jml		240	240	240	240	240
SP 6.2	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa indonesia di ruang publik (persentase kab/kota penerima anugerah bahasa)							
IKP 6.2.1	Jumlah masyarakat yang terlayani program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra	jml		35.517	109.430	109.430	109.430	109.430
IKP 6.2.2	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	jml		195	195	195	195	195
SP 6.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia							
IKP 6.3.1	Jumlah akses diplomasi kebahasaan	jml		3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
SP 6.4	Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah							
IKP 6.4.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi	jml		24	24	24	24	24
IKP 6.4.2	Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan	jml		81.934	81.934	81.934	81.934	81.934
SP 6.5	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan							
IKP 6.5.1	Nilai Lakip Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	nilai		82	84	86	88	90

g. P7: Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.13

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P7

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 7.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i>, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa							
IKP 7.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	52,52	55,91	62,70	72,88	86,5	100,0
IKP 7.1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	30,00	55,5	63,8	74,6	88,8	100,0
IKP 7.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tendik mencapai 8,0	nilai	4,7	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
IKP 7.1.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	15,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
IKP 7.1.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus	%	15,0	25,0	31,0	43,0	55,0	68,0
SP 7.2	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i>, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa							
IKP 7.2.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	84,44	87,22	89,99	93,07	96,5	100,0
IKP 7.2.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	30,00	55,5	63,8	74,6	88,8	100,0
IKP 7.2.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0	Nilai	4,7	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
IKP 7.2.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	15,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 7.2.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus	%	15,0	42,3	49,8	57,3	64,8	73,2
SP 7.3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota							
IKP 7.3.1	% PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	27,7	31,0	34,2	41,5	48,9	52,4
IKP 7.3.2	% PTK PAUD dan Dikmas memperoleh peningkatan kompetensi	%	23,6	34,8	46,1	61,0	80,7	87,1
IKP 7.3.3	% PTK PAUD dan Dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	27,9	43,9	60,0	67,8	76,3	82,5
IKP 7.3.4	Persentase PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat karirnya	%	23,5	35,1	46,6	58,2	69,8	81,4
IKP 7.3.5	Persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai SNP	%	6,8	8,5	10,2	11,9	13,7	15,4
SP 7.4	Peningkatan manajemen guru, dan pendidikan keguruan							
IKP 7.4.1	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki PTK sesuai SNP	%	78,6	79,6	80,6	91,9	96,0	98,4
IKP 7.4.2	Persentase PTK Dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	66,0	68,1	70,2	72,3	74,4	76,5
IKP 7.4.3	Persentase PTK Dikdas meningkat karirnya	%	12,5	14,6	16,8	18,9	21,0	23,1
IKP 7.4.4	Persentase PTK Dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	40,0	42,4	44,8	47,2	49,5	51,9
SP 7.5	Tersedianya PTK Dikmen pada daerah Khusus							
IKP 7.5.1	Persentase PTK di SM pada daerah khusus	%	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
SP 7.6	Meningkatnya pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan							
IKP 7.6.1	Persentase PTK SM yang meningkat karirnya	%	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0
IKP 7.6.2	Persentase PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	99,0
IKP 7.6.3	Guru SM sesuai Mapel/bidang keahlian	%	29,0	31,0	33,0	35,0	38,0	40,0

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 7.6.4	Persentase PTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	5,0	14,3	28,7	43,0	57,3	71,7
SP 7.7	Meningkatnya jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan							
IKP 7.7.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	%	49,3	69,9	90,4	96,3	98,9	100,0
SP 7.8	Meningkatnya kualitas layanan							
IKP 7.8.1	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

h. P8: Program Pelestarian Budaya

Tabel 4.14

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari P8

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 8.1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Keragaman Budaya (Kebinekaan) untuk Mendukung Terwujudnya Karakter dan Jati Diri Bangsa yang Memiliki Ketahanan Budaya							
IKP 8.1.1	Jumlah mata budaya yang dilestarikan	jml	-	86.720	89.152	91.332	93.462	95.592
IKP 8.1.2	Jumlah negara yang menjamin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia	jml	-	40	43	46	49	52

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangnya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15

Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 4.16 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.16
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I Biaya Investasi Satuan Pendidikan			
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan			
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		Pemerintah/Pemda
2.	Biaya Nonpersonalia		Pemerintah/Pemda
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa		Pemerintah/Pemda
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri		Pemerintah

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.17.

Tabel 4.17

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan		Penyelenggara/Satuan Pendidikan
2.	Biaya Investasi Selain Lahan		Penyelenggara/Satuan Pendidikan
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendikidandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan

anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian, sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kemendikbud Tahun 2015—2019

(dalam Rp. Miliar)

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.887,36	3.187,04	3.537,41	3.876,75	4.243,38	18.731,95
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	212,01	223,06	234,21	245,92	258,27	1.173,47
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.347,82	37.664,01	38.747,36	39.920,94	41.132,42	188.812,55
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	2.589,66	4.386,80	4.616,47	4.835,61	4.830,63	21.258,45
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.577,18	1.643,22	1.643,77	1.707,50	7.914,46
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,23	511,25	521,48	532,25	543,24	2.609,45
7	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	11.817,83	14.390,95	15.108,33	15.788,20	16.498,67	73.603,97
8	Program Pelestarian Budaya	1.714,16	2.378,04	2.550,57	2.365,69	2.373,00	11.381,45
TOTAL		53.412,86	64.317,61	66.959,04	69.209,13	71.587,12	325.485,76

Perkiraan kebutuhan anggaran Kemendikbud selama periode 2015—2019 adalah sebesar Rp325,485 triliun. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan dan kebudayaan.

3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kerangka pendanaan di atas akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan Kemendikbud.

a. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan dan kebudayaan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan, dan anggaran fungsi pendidikan.

b. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

c. Pengendalian dan Pengawasan

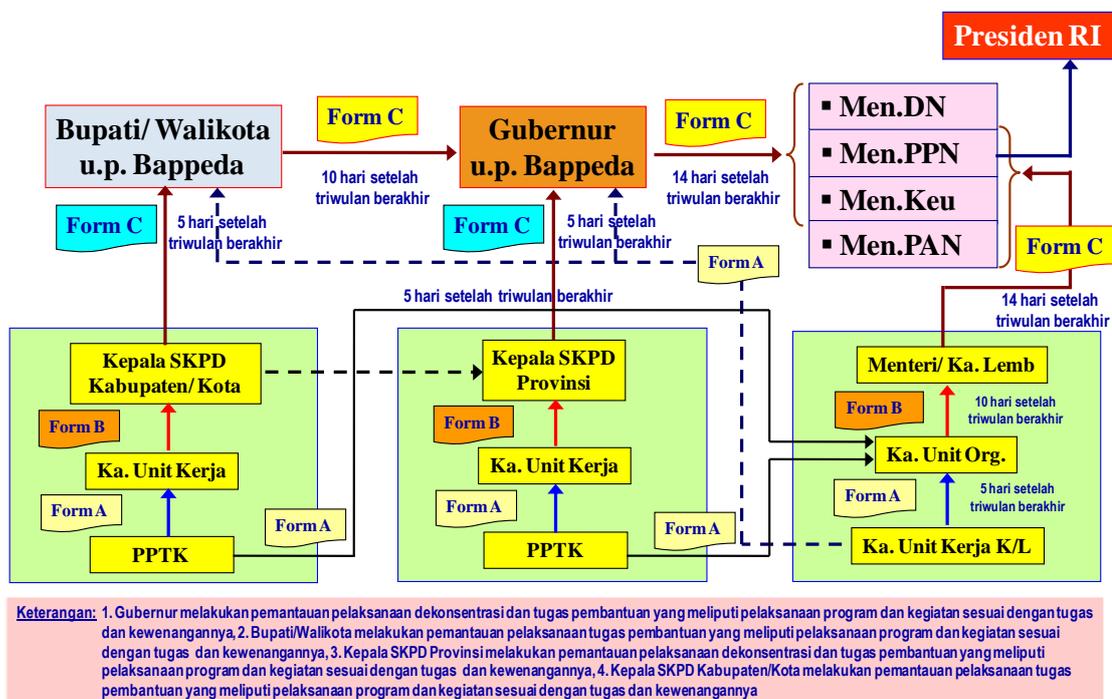
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui

pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemendikbud meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendikbud, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendikbud, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015—2019; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kerja (Satker)

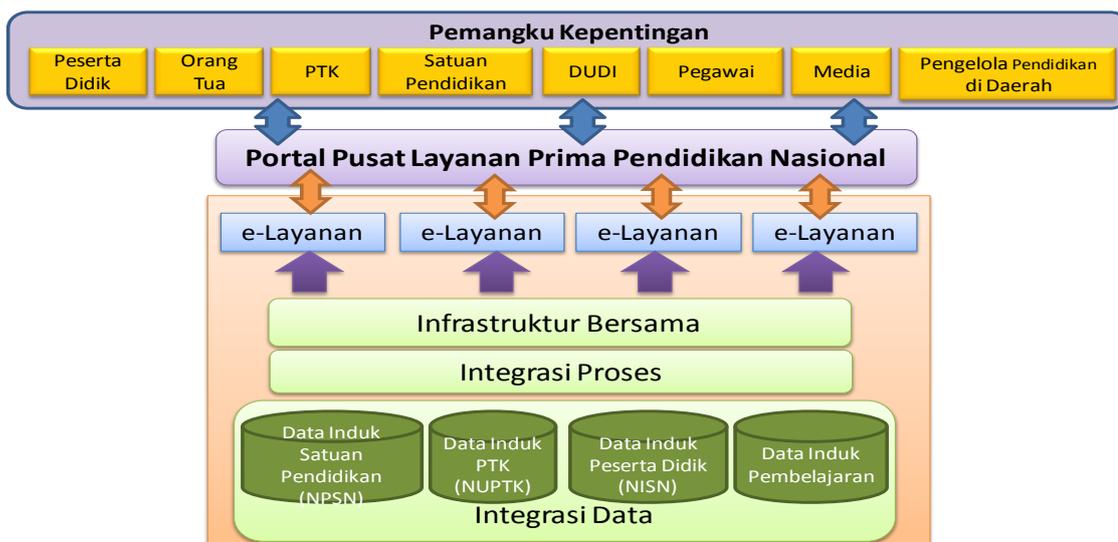
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d) Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional, serta untuk membantu BAN-SM dan BAN-PNF dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

6. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mampu mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 4.20 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.



Gambar 4.20. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) strategi pengembangan sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus selaras dengan visi dan misi Kemendikbud; (ii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (iii) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi; (iv) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*; (v) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, *e-knowledge sharing* dan e-sumber belajar; (vi) sistem dan teknologi informasi Kemendikbud harus mendukung tercapainya sistem tata kelola Kemendikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang andal, efektif dan efisien; dan (vii) guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan *master plan* sistem dan teknologi informasi terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Kemendikbud telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Kemendikbud beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemdikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemendikbud
2. Matriks Kerangka Regulasi

LAMPIRAN-1

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								53,412,860	64,317,611	66,959,041	69,209,133	71,587,117	325,485,762		
SS1	Meningkatnya Perilaku Positif Siswa														
IKSS 1.1	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik	Nilai	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik	Baik							
IKSS 1.2	Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK	indeks	67/67	68/69	70/72	72/74	74/76	77 /78							
IKSS 1.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
SS2	Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan														
IKSS 2.1	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang	orang	0	255.500	970.900	1.890.700	3.014.900	4.343.500							
SS3	Meningkatnya Kualitas Sikap Guru dan Tendik (Kepribadian, Spiritual dan Sosial)														
IKSS 3.1	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik sebanyak 100%	%	15,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%							
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan														
IKSS 4.1	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang	orang	800,000	900,000	1,200,000	1,400,000	1,530,000	1,720,000							
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota														
IKSS 5.1	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%	%	68,10	70,10	72,10	74,30	76,40	78,70							
IKSS 5.2	Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	lembaga	40,00	43,00	46,00	49,00	52,00	54,60							
IKSS 5.3	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga	lembaga	1.050	1.121	2.621	4.121	5.871	7.871							
IKSS 5.4	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%	%	96,10	96,39	96,43	96,51	96,59	96,73							
IKSS 5.5	Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)	%	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	15,60							
SS6	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar dan Menengah														
IKSS 6.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55							
IKSS 6.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20							
IKSS 6.3	APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77							
IKSS 6.4	APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKSS 6.5	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71							
IKSS 6.6	APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05							
IKSS 6.7	Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9	Rasio	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90							
IKSS 6.8	Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6	Rasio	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60							
IKSS 6.9	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun	Tahun	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7	8.8							
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan														
IKSS 7.1	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga	lembaga	33.801	34.801	36.051	37.851	40.126	42.926							
IKSS 7.2	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%	%	51,38	55,00	59,30	63,10	67,20	71,38							
SS 8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah														
IKSS 8.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20							
IKSS 8.2	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%	%	50,50	56,00	62,00	68,00	75,00	81,00							
IKSS 8.3	Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%	%	77,07	78,66	80,24	81,83	83,41	85,00							
IKSS 8.4	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%	%	48,17	51,54	54,90	58,27	61,63	65,00							
IKSS 8.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49							
IKSS 8.6	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	73,50	74,89	75,01	75,13	75,25	75,37							
IKSS 8.7	Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%	%	0,00	0,00	40,00	50,00	60,00	75,00							
IKSS 8.8	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1	%	35,00	45,00	55,00	60,00	65,00	68,00							
IKSS 8.9	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1	%	0,00	60,00	65,00	75,00	80,00	90,00							
IKSS 8.10	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5							
IKSS 8.11	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5							
IKSS 8.12	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0	Nilai	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.5							
IKSS 8.13	Hasil Penelitian dan Pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu	%	55,00	65,00	70,00	73,00	76,00	80,00							
SS9	Meningkatnya Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan														
IKSS 9.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%	%	40.00%	45.00%	53.00%	64.00%	76.00%	95.00%							
IKSS 9.2	Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%	%	11.00%	16.00%	21.00%	26.00%	31.00%	37.00%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKSS 9.3	Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%	%	0.00%	3.00%	6.00%	9.00%	12.00%	15.00%							
IKSS 9.4	Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%	%	66.75%	68.01%	68.13%	68.24%	68.36%	68.43%							
IKSS 9.5	Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%	%	60.50%	63.50%	67.00%	70.50%	74.00%	77.50%							
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga														
IKSS 10.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417	lembaga	0	39.724	52.628	64.224	75.820	87.417							
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya														
IKSS 11.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)	skor	30	32	34	35	36	37,00							
SS 12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia														
IKSS 12.1	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414	skor	396	399	402	406	410	414							
IKSS 12.2	Nilai UN Bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5	nilai	5,5 dan 6	5,8 dan 6	6,3 dan 6	6,6 dan 6	6,9 dan 7,2	7,2 dan 7,5							
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean														
IKSS 13.1	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara	negara	2	2	3	4	5	6							
IKSS 13.2	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang	orang	600	980	1.310	2.100	2.300	2.500							
SS 14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud														
IKSS 14.1	Skor LAKIP minimal sebesar 80	skor	72	80	80	80	80	80							
SS15	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)														
IKSS 15.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan														
IKSS 16.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77	Indeks	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	77.00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								3,887,364	3,187,041	3,537,414	3,876,754	4,243,378	18,731,952	SETJEN	
SP.1.1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal														
IKP.1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	%	80.00	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00							
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN	%	89.00%	92.00%	94.00%	96.00%	98.00%	100.00%							
IKP.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	%	72.00%	78.00%	81.00%	84.00%	87.00%	90.00%							
SP.1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel														
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
SP.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)														
IKP.1.3.1	Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30.00%	47.00%	56.00%	66.00%	77.00%	85.00%							
SP.1.4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif														
IKP.1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	Naskah	162	150	160	170	180	190							
IKP.1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	Masalah Hukum	46	50	60	70	80	85							
IKP.1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Uker	140	140	140	140	140	140							
IKP.1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	Uker	140	140	140	140	140	140							
IKP.1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	Jabatan	425	425	425	425	425	425							
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan														
IKP.1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan	%	47.60%	52.11%	56.62%	61.39%	66.68%	70.61%							
IKP.1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Judul	9,000	10,200	11,400	12,600	13,800	15,000							
IKP.1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	satuan pendidikan	55,063	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800							
IKP.1.5.4	Presentase E-Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%							
SP.1.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN														
IKP.1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60.00%	67.10%	74.20%	81.30%	88.40%	95.50%							
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN	%	50.00%	58.30%	66.60%	74.90%	83.20%	91.50%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP.1.7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan														
IKP.1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan	%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%							
IKP.1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%							
IKP.1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	%	15.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%							
SP.1.8	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat														
IKP.1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	indeks	72	73	74	75	76	77							
IKP.1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25.00%	50.00%	65.00%	80.00%	90.00%	100.00%							
SP.1.9	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film Indonesia														
IKP.1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83.00%	83.00%	86.00%	89.00%	92.00%	95.00%							
SP1.10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman														
IKP.1.10.1	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia	%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%							
IKP.1.10.2	Presentase perizinan dan peredaran film	%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%							
IKP.1.10.3	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman	%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%							
SP.1.11	Terseleenggaranya tata kelola Setjen dan pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel														
IKP.1.11.1	Indeks kepuasan layanan setjen	indeks	60.00%	87.00%	89.00%	91.00%	93.00%	95.00%							
IKP.1.11.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
SP.1.12	Terseleenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai														
IKP.1.12.1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	%	20.00%	30.00%	41.00%	50.00%	60.00%	100.00%							
IKP.1.12.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
SP.1.13	Terseleenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan														
IKP.1.13.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	dokumen	-	1	1	1	1	1							
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian								2,328,702	1,135,010	1,248,511	1,373,362	1,510,698	7,596,281	Biro Umum
SK.1.1985.1	Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Kementerian								2,328,702	1,135,010	1,248,511	1,373,362	1,510,698	7,596,281	
IKK.1.1985.1.1	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Setjen	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.1985.1. 2	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatusaha pimpinan, keprotokolan, serta kearsipan Setjen	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1985.1. 3	Diterapkannya e-office Kementerian	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1985.1. 4	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%	%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%							
IKK.1.1985.1. 5	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
1980	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian								80,688	188,630	207,493	228,242	251,066	956,119	Biro Umum
SK.1.1980.1	Tercapainya Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian								80,688	188,630	207,493	228,242	251,066	956,119	
IKK.1.1980.1. 1	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN	%	35.00	40.00	60.00	70.00	80.00	100.00							
IKK.1.1980.1. 2	Meningkatnya ketertiban pengelolaan BMN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKK.1.1980.1. 3	Meningkatnya keberfungsian sarana dan prasarana kantor	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
1984	Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran, dan kerja sama luar negeri								483,320	431,875	475,062	522,568	574,825	2,487,650	BPKLN
SK.1.1984.1	Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran								83,578	93,578	102,936	113,230	124,553	517,876	
IKK.1.1984.1. 1	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1984.1. 2	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1984.1. 3	Jumlah satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan	%	90.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%							
SK.1.1984.2	Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam kerja sama luar negeri								399,741	338,296	372,126	409,339	450,273	1,969,775	
IKK.1.1984.2. 1	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan	kerjasama	70	71	72	72	73	74							
IKK.1.1984.2. 2	Jumlah layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SILN	layanan	145	150	158	165	174	182							
IKK.1.1984.2. 3	Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI	siswa	6,500	6,579	7,027	7,379	7,730	8,081							
IKK.1.1984.2. 4	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan biro	tamu	30	32	34	35	37	39							
1983	Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas								243,701	243,701	268,071	294,878	324,366	1,374,717	Biro Keuangan
SK.1.1983.1	Tercapainya peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas								243,701	243,701	268,071	294,878	324,366	1,374,717	
IKK.1.1983.1. 1	Persentase daya serap anggaran Kementerian	%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%							
IKK.1.1983.1. 2	Persentase satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.1.1983.1.3	Jumlah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan peningkatan kapasitas	lembaga	400	445	545	600	625	675								
IKK.1.1983.1.4	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan	skor	75	80	80	80	80	80								
1982	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara								59,447	70,199	77,219	84,941	93,435	385,243	Biro Kepegawaian	
SK.1.1982.1	Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)								59,447	70,199	77,219	84,941	93,435	385,243		
IKK.1.1982.1.1	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan	%	45.00%	50.00%	65.00%	70.00%	80.00%	90.00%								
IKK.1.1982.1.2	Persentase jabatan yang telah divalidasi	%	40.00%	45.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%								
IKK.1.1982.1.3	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	%	40.00%	45.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%								
IKK.1.1982.1.4	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi	%	45.00%	50.00%	60.00%	75.00%	80.00%	90.00%								
IKK.1.1982.1.5	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	%	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.1.1982.1.6	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	%	50.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%								
IKK.1.1982.1.7	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	%	50.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%								
IKK.1.1982.1.8	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%								
IKK.1.1982.1.9	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	%	25.00%	30.00%	40.00%	50.00%	65.00%	80.00%								
IKK.1.1982.1.10	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian	%	86.16%	90.00%	95.00%	98.00%	98.00%	98.00%								
1981	Peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi								26,868	31,368	34,505	37,955	41,751	172,447	Biro Hukum	
SK.1.1981.1	Meningkatnya layanan di bidang hukum dan organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan								26,868	31,368	34,505	37,955	41,751	172,447		
IKK.1.1981.1.1	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diterbitkan	naskah	145	150	160	170	180	200								
IKK.1.1981.1.2	Jumlah kasus dan masalah hukum yang diselesaikan	laporan	30	32	35	35	35	37								
IKK.1.1981.1.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	unit	45	50	55	60	60	65								
IKK.1.1981.1.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	unit	35	40	45	50	55	60								
IKK.1.1981.1.5	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang dianalisis dan diukur beban kerjanya	jabatan	25	30	35	40	45	50								
1991	Pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan								270,659	360,469	396,516	436,168	479,785	1,943,597	Pustek kom	
SK.1.1991.1	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan								270,659	360,469	396,516	436,168	479,785	1,943,597		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.1991.1. 1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	sek	23,000	18,000	19,000	20,000	21,000	22,000							
IKK.1.1991.1. 2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi jaringan online	satker	650	650	650	650	650	650							
IKK.1.1991.1. 3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	sek	65,700	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800							
IKK.1.1991.1. 4	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran radio dan televisi pendidikan	sek	107,500	107,571	110,260	113,016	115,842	118,738							
IKK.1.1991.1. 5	Jumlah e-layanan yang menggunakan infrastruktur TIK Kementerian (aplikasi)	layanan	20	35	50	65	80	100							
IKK.1.1991.1. 6	Jumlah model media berbasis audio/radio, video/televisi, dan multimedia	model	30	40	50	60	70	80							
IKK.1.1991.1. 7	Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-administrasi	satker	300	320	340	380	400	450							
IKK.1.1991.1. 8	Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK	bahan ajar	10,000	10,200	11,400	12,600	13,800	15,000							
IKK.1.1991.1. 9	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	orang	30,000	31,000	37,000	43,000	49,000	55,000							
1987	Peningkatan layanan prima di bidang komunikasi dan layanan masyarakat								66,174	92,029	101,232	111,355	122,490	493,280	BKLM
SK.1.1987.1	Peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan								66,174	92,029	101,232	111,355	122,490	493,280	
IKK.1.1987.1. 1	Persentase kebijakan/program Kemendikbud yang terpublikasi ke masyarakat melalui media	%	74.00%	74.00%	78.00%	82.00%	85.00%	87.00%							
IKK.1.1987.1. 2	Persentase Satker Kemendikbud yang arsip dan dokumentasinya terintegrasi dengan pusat arsip dan dokumentasi Kementerian	%	50.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%							
IKK.1.1987.1. 3	Terlayannya permintaan informasi dan dokumen dari pemangku kepentingan	%	87.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%							
IKK.1.1987.1. 4	Persentase layanan kemitraan Kemendikbud dengan lembaga negara, organisasi/lembaga masyarakat dan media	%	87.00%	99.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1987.1. 5	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	pengaduan	4,500	4,000	3,500	3,000	2,500	2,000							
1986	Penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan								55,875	75,844	83,428	91,771	100,948	407,867	PDSPK
SK.1.1986.1	Penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan								55,875	75,844	83,428	91,771	100,948	407,867	
IKK.1.1986.1. 1	Persentase satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang tervalidasi dalam data <i>warehouse</i>	%	65.00%	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%	97.00%							
IKK.1.1986.1. 2	Persentase tersedianya data referensi pendidikan dan wilayah	%	65.00%	70.00%	80.00%	85.00%	90.00%	97.00%							
IKK.1.1986.1. 3	Persentase peserta didik dan PTK yang tervalidasi dalam data <i>warehouse</i>	%	35.00%	40.00%	45.00%	60.00%	75.00%	90.00%							
IKK.1.1986.1. 4	Jumlah publikasi statistik pendidikan nasional	publikasi	11	12	12	13	13	13							
IKK.1.1986.1. 5	Jumlah publikasi hasil pendayagunaan data pendidikan	publikasi	23	25	27	29	31	33							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.1986.1. 6	Layanan data dan statistik pendidikan (skala kepuasan : 1 – 5)	sistem	3.0	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5							
IKK.1.1986.1. 7	Tersedianya sistem pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan.	%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%							
IKK.1.1986.1. 8	Persentase SKPD pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan	%	10.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%							
IKK.1.1986.1. 9	Persentase SKPD pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan	SKPD	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%							
IKK.1.1986.1. 10	Persentase SKPD yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud	%	10.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%							
IKK.1.1986.1. 11	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	dokumen	23	23	23	23	23	23							
IKK.1.1986.1. 12	Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
IKK.1.1986.1. 13	Persentase tertib pencatatan BMN	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
4079	Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia								87,450	93,730	103,103	113,414	124,755	522,453	Seamolec
SK.1.4079.1	Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia								87,450	93,730	103,103	113,414	124,755	522,453	
IKK.1.4079.1. 1	Jumlah model yang dikembangkan di kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	model	35	68	40	43	46	49							
IKK.1.4079.1. 2	Jumlah penelitian pengembangan, dan evaluasi untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	judul	145	99	176	182	188	194							
IKK.1.4079.1. 3	Jumlah institusi di kawasan Asia Tenggara yang terlayani melalui pelatihan untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	institusi	290	104	314	324	334	344							
IKK.1.4079.1. 4	PTK yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	PTK	4,000	4,317	4,596	5,166	5,736	6,306							
IKK.1.4079.1. 5	Jumlah publikasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) di untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	publikasi	43,000	70,058	63,862	64,322	64,552	64,432			333,852	352,942	367,338		
5173	Penyensoran film dan iklan film Indonesia								68,409	344,909	411,069	437,775	460,501	1,722,663	Pusat Perfilman
SK.1.5173.1	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film								44,909	73,179	77,217	84,833	93,163	373,301	
IKK.1.5173.1. 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	film dan iklan	46,000	46,100	46,200	46,300	46,400	46,500							
IKK.1.5173.1. 2	Persentase sosialisasi dan koordinasi kebijakan penyensoran	%	92.00%	94.00%	94.00%	95.00%	95.00%	96.00%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.1.5173.1. 3	Jumlah fasilitasi kelembagaan dan keanggotaan	kali	10	11	12	13	14	15							
5623	Pengembangan Perfilman Indonesia														
SK .1.5623.1	Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)								4,000	32,000	39,316	41,564	43,259	160,139	
IKK.1.5623.1. 1	Perfilman yang difasilitasi	buah	1	2	3	3	3	4							
IKK.1.5623.1. 2	Fasilitasi produksi film panjang	buah	1	2	2	2	2	2							
IKK.1.5623.1. 3	Dialog budaya dengan komunitas Perfilm Indonesia	kali	190	220	1,470	1,470	1,470	1,470							
IKK.1.5623.1. 4	Jumlah kecamatan yang memanfaatkan bioskop keliling untuk pemutaran film	kecamatan	5	8	48	48	48	48							
IKK.1.5623.1. 5	Fasilitasi komunitas perfilman	buah	5	10	36	36	36	36							
IKK.1.5623.1. 6	Fasilitasi produksi film pendek dan dokumenter	buah	-	-	2	2	3	3							
SK .1.5623.2	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perfilman								-	112,730	138,502	146,421	152,394	550,047	
IKK.1.5623.2. 1	Sarana perfilman yang direvitalisasi	sarana	0	-	1	2	2	2							
IKK.1.5623.2. 2	Sarana perfilman yang dibangun	sarana	10	25	56	56	56	57							
IKK.1.5623.2. 3	Jumlah bioskop keliling dalam rangka pembangunan karakter bangsa	bioskop	0	33	33	33	34	35							
IKK.1.5623.2. 4	Kecamatan yang memanfaatkan laboratorium seni budaya	kecamatan	0	3	38	38	38	38							
SK .1.5623.3	Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku film								19,500	109,000	133,919	141,577	147,352	551,348	
IKK.1.5623.1. 1	Apresiasi film oleh masyarakat	film	10	34	68	102	136	170							
SK .1.5623.4	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia bidang perfilman								-	4,000	4,914	5,195	5,407	19,517	
IKK.1.5623.4. 1	Jumlah peserta bimbingan teknis perfilman	orang	-	2	4	6	8	10							
SK .1.5623.5	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar untuk menghaluskan budi pekerti siswa								-	2,000	2,457	2,598	2,704	9,759	
IKK.1.5623.5. 1	Pengkayaan materi ajar melalui media film	materi ajar	-	2	2	3	3	3							
SK .1.5623.6	Pendataan aset budaya khususnya perfilman								-	10,000	12,286	12,989	13,519	48,793	
IKK.1.5623.6. 1	Data perfilman yang dikelola	data	-	-	10	10	10	10							
SK .1.5623.7	Penegakan hukum dalam kewenangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman								-	2,000	2,457	2,598	2,704	9,759	
IKK.1.5623.7. 1	Penanganan kasus perfilman	kasus	-	-	10	10	10	10							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
5624	Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai								66,072	69,277	76,204	83,825	92,207	387,585	Pusdiklat
SK.1.5624.1	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai								66,072	69,277	76,204	83,825	92,207	387,585	
IKK.1.5624.1. 1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional	orang	1.445	2.665	4.300	4.594	4.594	4.594							
IKK.1.5624.1. 2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	orang	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000							
5625	Peningkatan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan								50,000	50,000	55,000	60,500	66,550	282,050	Pusat ASK
SK.1.5625.1	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan								50,000	50,000	55,000	60,500	66,550	282,050	
IKK.1.5625.1. 1	Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	kebijakan	-	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
O2 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENDIKBUD								212,011	223,061	234,210	245,918	258,273	1,173,473	ITJEN	
SP.2.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan														
IKP.2.1.1	Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemdikbud WTP	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
IKP.2.1.2	Tercapainya Skor Lakip Kemendikbud menjadi baik	skor		80	80	80	80	80							
IKP.2.1.3	Satker Kemendikbud WBK	%		3.00%	11.00%	18.00%	25.00%	32.00%							
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I								24,694	34,855	36,598	38,428	40,349	174,924	Inpektorat Wilayah I
SK.2.1993.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat I								24,694	34,855	36,598	38,428	40,349	174,924	
IKK.2.1993.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan di wilayah kerja Inspektorat I	%	20.00%	28.00%	50.00%	65.00%	80.00%	95.00%							
IKK.2.1993.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja di wilayah kerja Inspektorat I	%	30.00%	36.00%	70.00%	75.00%	90.00%	100.00%							
IKK.2.1993.1.3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat I	%		3.00%	11.00%	18.00%	25.00%	32.00%							
IKK.2.1993.1.4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat I	%	40.00%	35.00%	60.00%	70.00%	80.00%	95.00%							
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II								24,528	34,681	36,415	38,236	40,148	174,007	Inpektorat Wilayah II
SK.2.1994.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat II								24,528	34,681	36,415	38,236	40,148	174,007	
IKK.2.1994.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat II	%	30.00%	35.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%							
IKK.2.1994.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat II	%	40.00%	40.00%	70.00%	85.00%	100.00%	100.00%							
IKK.2.1994.1.3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat II	%	0	3.00%	11.00%	18.00%	25.00%	32.00%							
IKK.2.1994.1.4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat II	%	40.00%	35.00%	60.00%	70.00%	80.00%	95.00%							
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III								25,505	34,539	36,266	38,079	39,983	174,372	Inpektorat Wilayah III
SK.2.1995.1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja Inspektorat III								25,505	34,539	36,266	38,079	39,983	174,372	
IKK.2.1995.1.1	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan laporan keuangan berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat III	%	20.00%	28.00%	60.00%	75.00%	90.00%	100.00%							
IKK.2.1995.1.2	Jumlah satker yang mendapatkan pembinaan akuntabilitas kinerja berkategori baik di wilayah kerja Inspektorat III	%	30.00%	36.00%	70.00%	75.00%	90.00%	100.00%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.2.1995.1. 3	Jumlah satker yang melaksanakan indikator WBK di wilayah kerja Inspektorat III	%	0	3.00%	11.00%	18.00%	25.00%	32.00%								
IKK.2.1995.1. 4	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektorat III	%	40.00%	35.00%	60.00%	70.00%	80.00%	100.00%								
1996	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi								12,929	14,025	14,722	15,455	16,287	73,418	Inpektorat Wilayah IV	
SK.2.1996.1	Menguatnya mutu audit investigasi yang disertai dengan tindak lanjut dan pembinaan satuan kerja								12,929	14,025	14,722	15,455	16,287	73,418		
IKK.2.1996.1. 1	Jumlah permasalahan khusus yang dilakukan audit khusus	%	90.00%	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
IKK.2.1996.1.	Jumlah hasil audit khusus yang ditindaklanjuti baik Kasus ataupun	%	70.00%	60.00%	80.00%	85.00%	90.00%	100.00%								
IKK.2.1996.1. 3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam program pencegahan fraud/kecurangan	%	10.00%	15.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%								
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen								124,355	104,961	110,209	115,720	121,506	576,751	Sekretariat	
SK.2.1998.1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Inspektorat Jenderal Kemendikbud								124,355	104,961	110,209	115,720	121,506	576,751	ITJEN	
IKK.2.1998.1. 1	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan BPK-RI	%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%								
IKK.2.1998.1. 2	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan BPKP	%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%								
IKK.2.1998.1. 3	Jumlah temuan audit yang diselesaikan tindak lanjutnya internal & eksternal baik temuan Itjen	%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%								
IKK.2.1998.1. 4	Persentase ketercapaian indikator WBK di Inspektorat Jenderal	%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.2.1998.1. 5	Persentase RKA Itjen sesuai peraturan perundangan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.2.1998.1. 6	Itjen melaksanakan tata kelola kinerja yang baik	%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.2.1998.1. 7	Persentase penyerapan anggaran	%	80.00%	85.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%								
IKK.2.1998.1. 8	Jumlah BMN yang dikelola	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.2.1998.1. 9	Persentase pegawai Itjen yang disertifikasi dari lembaga sertifikasi	%	5.00%	15.00%	25.00%	35.00%	45.00%	55.00%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
03 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH								31,347,818	37,664,011	38,747,365	39,920,945	41,132,417	188,812,555	Ditjen DIKASMEN	
SP .3.1	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas														
IKP.3.1.1	APM SD/SDLB	%	81.92	82.00	82.51	82.88	84.52	85.20							
IKP.3.1.2	APK SD/SDLB/Paket A	%	97.31	97.65	97.85	98.02	99.92	100.55							
IKP.3.1.3	Angka Putus Sekolah SD	%	1.08	1.04	1.01	0.88	0.68	0.57							
IKP.3.1.4	APM SMP/SMPLB	%	59.18	71.88	72.69	73.07	73.70	73.72							
IKP.3.1.5	APK SMP/SMPLB/Paket B	%	74.29	80.73	81.89	82.40	83.61	83.77							
IKP.3.1.6	Angka Putus Sekolah SMP	%	1.15	1.14	1.11	1.08	1.03	1.01							
IKP.3.1.7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	83.09	83.40	83.64	84.95	86.89	87.67							
IKP.3.1.8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	3,708	15,380,582	15,380,582	15,380,582	15,380,582	15,380,582							
IKP.3.1.9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100	100	100	100	100	100							
IKP.3.1.10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100	100	100	100	100	100							
SP .3.2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C														
IKP.3.2.1	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	%	70.82	73.82	76.68	79.08	80.51	82.18							
IKP.3.2.2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	81.00	81.50	82.00	84.00	86.00	88.00							
IKP.3.2.3	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100	100	100	100	100							
SP .3.3	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB/ Paket C														
IKP.3.3.1	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	3,700	3,856,476	3,856,676	3,856,899	3,856,979	3,858,211							
IKP.3.3.2	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1.66	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80							
SP .3.4	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019														
IKP.3.4.1	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Sekolah Menengah	%	71.00	76.60	82.50	88.30	94.20	100.00							
SP .3.5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran														
IKP.3.5.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Sekolah	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300							
IKP.3.5.2	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
IKP.3.5.3	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali Tertimba	140	141	148	152	160	168							
IKP.3.5.4	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	15.00	15.00	17.00	24.00	32.00	40.00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.3.5.5	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	21.00	22.00	29.00	37.00	45.00	53.00							
IKP.3.5.6	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	60.45	61.13	61.24	61.35	61.46	61.49							
IKP.3.5.7	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	73.98	74.89	75.01	75.13	75.25	75.37							
IKP.3.5.8	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0							
SP.3.6	Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota														
IKP.3.6.1	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	21.10	29.4	49.9	70.5	90.0	100.0							
IKP.3.6.2	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	60	65	70	75	80	85							
SP.3.7	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)														
IKP.3.7.1	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	-	14	29	52	76	95							
SP.3.8	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik														
IKP.3.8.1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan	%	80	85	87	89	92	95							
IKP.3.8.2	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	Nilai	70	72	73	75	78	80							
2003	Pembinaan Sekolah Dasar								6,776,961	6,929,145	7,007,587	7,401,579	7,542,028	35,657,300	Dit.
SK.3.2003.1	Tersedianya layanan pendidikan SD								2,216,195	2,480,098	2,558,540	2,952,532	3,092,981	13,300,347	SD
IKK.3.2003.1.1	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	Ruang	2,000	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015							
IKK.3.2003.1.2	Jumlah Sekolah SD yang dibangun	Sekolah	13	15	15	17	20	20							
IKK.3.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	Ruang	8,439	4,260	5,875	5,875	5,875	5,875							
IKK.3.2003.1.4	Jumlah siswa pendidikan dasar di luar negeri yang menerima bantuan (SILN/CLC)	Siswa	7,190	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							
IKK.3.2003.1.5	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	Siswa	9,044	487	531	531	531	531							
IKK.3.2003.1.6	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	671	2,174	2,174	2,174	2,174	2,174							
IKK.3.2003.1.7	Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD yang dibangun	Ruang	3,000	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220							
IKK.3.2003.1.8	Jumlah Sekolah SD yang melaksanakan ekstrakurikuler	Sekolah	11,985	9,698	12,750	12,750	12,750	12,750							
IKK.3.2003.1.9	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	10,540	34,192	34,192	34,192	34,192	34,192							
IKK.3.2003.1.10	Jumlah SD yang menerapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku	Sekolah	63,260	8,880	31,526	68,535	123,168	148,053							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.3.2003.1. 11	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	3,220	2,292	4,000	5,000	10,000	13,000								
IKK.3.2003.1. 12	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	2,085	2,085	5,576	4,737	4,906	6,215								
IKK.3.2003.1. 13	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD	Kegiatan	14	14	14	14	14	14								
SK .3.2003.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin								4,560,765	4,449,047	4,449,047	4,449,047	4,449,047	22,356,953		
IKK.3.2003.2. 1	Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP	Siswa	6,046,921	10,685,614	10,685,614	10,685,614	10,685,614	10,685,614								
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama								5,843,000	7,383,604	7,421,907	7,483,521	7,543,168	35,675,200		Dit. Pembinaan SMP
SK .3.2000.1	Tersedianya layanan pendidikan SMP								2,699,200	4,062,249	4,100,552	4,162,165	4,221,813	19,245,978		
IKK.3.2000.1. 1	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan operasional SMP terbuka	Siswa	136,679	468,948	123,847	117,185	111,326	105,760								
IKK.3.2000.1. 2	Jumlah SMP terbuka yang menerima bantuan operasional	Sekolah	1,532	1,305	1,200	1,100	1,000	910								
IKK.3.2000.1. 3	Jumlah Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang menerima bantuan operasional	Sekolah	50	50	55	55	60	60								
IKK.3.2000.1. 4	Jumlah sekolah berasrama yang dibangun	Sekolah	15	17	19	21	23	25								
IKK.3.2000.1. 5	Jumlah sekolah SMP yang dibangun	Sekolah	131	176	180	190	190	190								
IKK.3.2000.1. 6	Jumlah sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun	Sekolah	105	176	110	120	130	140								
IKK.3.2000.1. 7	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	Ruang	1,650	1,693	3,386	3,386	3,386	3,386								
IKK.3.2000.1. 8	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	Ruang	2,835	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
IKK.3.2000.1. 9	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	7,222	2,171	7,760	16,986	30,735	37,196								
IKK.3.2000.1. 10	Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun	Ruang	1,000	788	1,250	1,455	1,500	1,500								
IKK.3.2000.1. 11	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	Ruang	1,500	700	700	700	700	700								
IKK.3.2000.1. 12	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	42,813	9,353	9,380	9,401	9,422	9,443								
IKK.3.2000.1. 13	Jumlah SMP yang melaksanakan ekstrakurikuler	Sekolah	3,765	1,850	4,072	4,235	4,405	4,581								
IKK.3.2000.1. 14	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	Siswa	10,252	10,252	10,752	11,252	11,752	12,252								
IKK.3.2000.1. 15	Jumlah Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
IKK.3.2000.1. 16	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	710	710	750	750	750	750								
IKK.3.2000.1. 17	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	1,337	1,337	1,500	1,500	1,500	1,500								
IKK.3.2000.1. 18	Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	Ruang	39	70	100	100	200	250								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.3.2000.1. 19	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP	Kegiatan	20	20	20	20	20	20								
SK .3.2000.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin								3,143,801	3,321,355	3,321,355	3,321,355	3,321,355	16,429,222		
IKK.3.2000.2. 1	Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	Siswa	2,169,890	4,694,968	4,694,968	4,694,968	4,694,968	4,694,968								
2006	Pembinaan Sekolah Menengah Atas								8,010,000	9,432,897	9,803,759	10,118,011	10,452,033	47,816,700	Dit. Pembinaan SMA	
SK .3.2006.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota								8,010,000	9,432,897	9,803,759	10,118,011	10,452,033	47,816,700		
IKK.3.2006.1. 1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	4,384,026	4,456,077	4,844,702	4,977,085	5,102,070	5,243,419								
IKK.3.2006.1. 2	Jumlah RKB SMA yang dibangun	Ruang	1,853	1,514	3,028	3,028	3,028	3,028								
IKK.3.2006.1. 3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Siswa	30	60	103	103	103	103								
IKK.3.2006.1. 4	Jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	425,033	1,692,559	1,692,559	1,692,559	1,692,559	1,692,559								
IKK.3.2006.1. 5	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA	Sekolah	33	66	2,557	2,061	1,547	1,032								
IKK.3.2006.1. 6	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMA	Ruang	151	131	257	200	143	86								
IKK.3.2006.1. 7	Pengadaan sarana pembelajaran SMA	Sekolah	169	200	200	200	200	200								
IKK.3.2006.1. 8	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	12,311	12,311	12,461	12,611	12,761	12,911								
IKK.3.2006.1. 9	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	bahan ajar	16	16	17	18	19	21								
IKK.3.2006.1. 10	Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan	Sekolah	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320								
IKK.3.2006.1. 11	Jumlah SMA rujukan	Sekolah	91	121	1,100	1,200	1,300	1,400								
IKK.3.2006.1. 12	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	Sekolah	-	-	1,100	1,200	1,300	1,400								
IKK.3.2006.1. 13	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	siswa	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094								
IKK.3.2006.1. 14	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	Siswa	2,942	10,757	2,942	2,942	2,942	2,942								
IKK.3.2006.1. 15	Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMA	satker	34	35	35	35	35	35								
IKK.3.2006.1. 16	Jumlah Siswa SMA yang menerapkan pendidikan karakter	Siswa	12,311	754	12,461	12,611	12,761	12,911								
2007	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan								9,009,000	11,542,632	12,060,600	12,390,842	12,972,781	57,975,855	Dit. Pembinaa n SMK	
SK.3.2007.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota								9,009,000	11,542,632	12,060,600	12,390,842	12,972,781	57,975,855		
IKK.3.2007.1. 1	Jumlah siswa SMK penerima BOS SM	Siswa	4,303,201	4,824,973	5,086,607	5,287,199	5,434,428	5,558,261								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.3.2007.1. 2	Jumlah RKB SMK yang dibangun	Ruang	3,100	3,100	6,450	5,373	3,749	3,065							
IKK.3.2007.1. 3	Jumlah unit SMK baru yang dibangun	Sekolah	32	35	126	126	126	126							
IKK.3.2007.1. 4	Pembangunan prasarana pembelajaran SMK	Sekolah	257	300	5,799	5,799	5,799	5,799							
IKK.3.2007.1. 5	Rehabilitasi ruang pembelajaran SMK	Ruang	60	130	3,309	3,309	3,309	3,309							
IKK.3.2007.1. 6	Pengadaan sarana pembelajaran	Sekolah	1,000	11,200	2,277	2,277	2,277	2,277							
IKK.3.2007.1. 7	Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	11,384	870	11,384	11,384	11,384	11,384							
IKK.3.2007.1. 8	Jumlah bahan ajar SMK yang disusun	bahan ajar	128	350	355	360	365	370							
IKK.3.2007.1. 9	Jumlah SMK yang menerapkan standar penilaian pendidikan	Sekolah	-	182	187	192	197	202							
IKK.3.2007.1. 10	Jumlah SMK rujukan	Sekolah	109	117	375	350	300	300							
IKK.3.2007.1. 11	Jumlah SMK yang melaksanakan <i>teaching factory/technopark</i>	Sekolah	51	200	200	200	200	200							
IKK.3.2007.1. 12	Jumlah SMK berbasis pesantren/komunitas/industri	Sekolah	83	340	300	400	500	600							
IKK.3.2007.1. 13	Jumlah SMK yang mendapat intervensi perluasan akses dan peningkatan mutu di Papua/Papua Barat	Sekolah	96	96	96	96	96	96							
IKK.3.2007.1. 14	Jumlah siswa yang melaksanakan praktik kerja industri	Siswa	1,359,600	-	1,527,200	1,624,448	1,656,961	1,720,481							
IKK.3.2007.1. 15	Persentase SMK yang menyediakan layanan BKK yang menjembatani dengan DU/DI	%	8	8	10	20	30	40							
IKK.3.2007.1. 16	Jumlah SMK menyediakan layanan kewirausahaan	Sekolah	50	-	100	150	200	250							
IKK.3.2007.1. 17	Jumlah sekolah yang menerapkan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Institusi lainnya	Sekolah	-	-	4,250	5,500	7,000	8,250							
IKK.3.2007.1. 18	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional	Siswa	1,032	1,150	2,350	2,400	2,450	2,500							
IKK.3.2007.1. 19	Jumlah siswa SMK yang memperoleh beasiswa	Siswa	16,784	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655							
IKK.3.2007.1. 20	Jumlah sekolah SMK yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	2,557	4,346	4,346	4,346	4,346	4,346							
IKK.3.2007.1. 21	Revitalisasi paket keahlian di Kabupaten/Kota	paket	-	-	75	110	138	158							
IKK.3.2007.1. 22	Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMK	satker	34	35	35	35	35	35							
IKK.3.2007.1. 23	Jumlah siswa SMK penerima KIP	Siswa	642,970	2,154,167	2,154,167	2,154,167	2,154,167	2,154,167							
IKK.3.2007.1. 24	Jumlah SMK pariwisata dan kelautan/maritim yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing	Sekolah	-	40	140	140	140	140							
IKK.3.2007.1. 25	Jumlah SMK Pertanian yang dikembangkan untuk mendukung poros ketahanan pangan	Sekolah	-	60	160	160	160	160							
1999	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus								912,000	1,542,642	1,566,613	1,592,098	1,620,047	7,233,400	Dit. Pembinaan
SK .3.1999.1	Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB/SMLB								912,000	1,542,642	1,566,613	1,592,098	1,620,047	7,233,400	PK dan PLK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.3.1999.1. 1	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	Siswa	125,062	137,938	150,172	158,080	166,169	175,516							
IKK.3.1999.1. 2	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS		2,422	1,941	2,100	2,100	2,100	2,100							
IKK.3.1999.1. 3	Jumlah pusat pengembangan PKLK yang dibangun	Sekolah	5	3	43	43	43	43							
IKK.3.1999.1. 4	Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang direhabilitasi	Unit	125	278	500	500	500	500							
IKK.3.1999.1. 5	Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	Ruang	3	3	6	6	6	6							
IKK.3.1999.1. 6	Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	Unit	10	22	20	20	20	20							
IKK.3.1999.1. 7	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	Unit	200	140	258	281	281	281							
IKK.3.1999.1. 8	Jumlah asrama siswa yang dibangun	Ruang	2	4	20	20	20	20							
IKK.3.1999.1. 9	Jumlah paket layanan pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	Unit	1,744	1,124	1,576	2,332	3,475	4,036							
IKK.3.1999.1. 10	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Sekolah	215	59	120	131	140	150							
IKK.3.1999.1. 11	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Ruang	215	75	100	100	100	100							
IKK.3.1999.1. 12	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan ekstrakurikuler	Ruang	300	962	1,500	1,500	1,500	1,500							
IKK.3.1999.1. 13	Jumlah siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Sekolah	3,643	3,747	3,747	3,747	3,747	3,747							
IKK.3.1999.1. 14	Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	Siswa	133	110	206	206	206	206							
IKK.3.1999.1. 15	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	Paket	25	17	79	54	54	79							
IKK.3.1999.1. 16	Jumlah provinsi/kabupaten/kota berwawasan pendidikan inklusif	Ruang	34	35	35	35	35	35							
IKK.3.1999.1. 17	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	Prov/Kab /Kota	50	34	206	206	206	206							
IKK.3.1999.1. 18	Jumlah sekolah/lembaga daerah 3 T dan Klaster 4 mendapat pendidikan layanan khusus yang berkualitas	Sekolah	250	250	350	400	350	300							
IKK.3.1999.1. 19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Sekolah	100	100	450	450	450	450							
IKK.3.1999.1. 20	Jumlah lembaga yang mendapat pendidikan layanan khusus (termasuk lapas/lapas anak)	Daerah	42	44	110	110	110	110							
IKK.3.1999.1. 21	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK	Lembaga	19	19	19	19	19	19							
IKK.3.1999.1. 22	Jumlah siswa SM yang mendapatkan program afirmasi/layanan khusus pendidikan menengah	Siswa	959	4,261	4,261	4,261	4,261	4,261							
IKK.3.1999.1. 23	Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter	sekolah	950	950	950	950	950	950							
IKK.3.1999.1. 24	Jumlah Sekolah Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan/atau Sekolah Darurat	sekolah	36	30	30	30	30	30							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.3.1999.1. 25	Jumlah kab/kota yang mendapat dukungan bidang pendidikan menengah terhadap kawasan-kawasan khusus dan strategis	kab/kota	-	20	20	20	20	20								
IKK.3.1999.1. 26	Jumlah bidang lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi SMLB tingkat nasional dan internasional	bidang lomba	12	15	15	15	15	15								
IKK.3.1999.1. 27	Jumlah SMLB rujukan	sekolah	-	74	74	74	74	74								
2005	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Dikdasmen								386,757	405,991	442,798	473,794	506,960	2,216,300	Setditjen Dikdasmen	
SK .3.2005.1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pendidikan Dasar dan Menengah								386,757	405,991	442,798	473,794	506,960	2,216,300		
IKK.3.2005.1. 1	Persentase layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100								
IKK.3.2005.1. 2	Jumlah layanan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah	Layanan	16	18	18	18	18	18								
IKK.3.2005.1. 3	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	Layanan	6	6	6	6	6	6								
IKK.3.2005.1. 4	Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang	Dokumen	25	25	25	25	25	25								
IKK.3.2005.1. 5	Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri	Layanan	13	13	13	13	13	13								
4002	Pembinaan penjaminan mutu pendidikan								35,100	37,100	39,100	41,100	43,100	195,500	Setditjen Dikdasmen	
SK .3.4002.2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan								35,100	37,100	39,100	41,100	43,100	195,500		
IKK.3.4002.2. 1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	90.15%	90.15%	100%	100%	100%	100%								
IKK.3.4002.2. 2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	5%	15%	40%	75%	95%								
IKK.3.4002.2. 3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48%	71.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK.3.4002.2. 4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20%	35%	60%	80%	95%								
IKK.3.4002.2. 5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41%	71.41%	100%	100%	100%	100%								
IKK.3.4002.2. 6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20%	35%	60%	80%	95%								
IKK.3.4002.2. 7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.60%	59.60%	65%	80%	90%	100%								
IKK.3.4002.2. 8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	10%	25%	45%	70%	95%								
IKK.3.4002.2. 9	Persentase TK yang telah dipetakan mutunya	%	16.82%	25%	40%	60%	80%	100%								
IKK.3.4002.2. 10	Persentase TK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	15%	35%	55%	75%	95%								
IKK.3.4002.2. 11	Jumlah Dewan Pendidikan yang terbina	dewan pendidik	10	350	350	350	350	350								
4005	Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan								375,000	390,000	405,000	420,000	452,300	2,042,300	LPMP	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK .3.4005.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan								375,000	390,000	405,000	420,000	452,300	2,042,300	
IKK.3.4005.1. 1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%							
IKK.3.4005.1. 2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%							
IKK.3.4005.1. 3	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%							
IKK.3.4005.1. 4	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%							
IKK.3.4005.1. 5	Persentase TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
04 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD dan Dikmas)								2,589,662.9	4,386,075.8	4,616,465.6	4,835,607.5	4,830,634.0	21,258,446	DITJEN PAUD DAN DIKMAS	
SP.4.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota														
IKP.4.1.1	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	68.10%	70.06%	72.13%	74.28%	76.44%	78.67%							
IKP.4.1.2	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	Lembaga	33,801	34,801	36,051	37,851	40,126	42,926							
SP.4.2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota														
IKP.4.2.1	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	Orang	551,111	602,111	670,111	772,111	908,111	1,061,111							
IKP.4.2.2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	Lembaga	121	1,121	2,621	4,121	5,871	7,871							
SP.4.3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota														
IKP.4.3.1	Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	%	96%	97%	97%	97%	97%	98%							
IKP.4.3.2	Jumlah lembaga PKBM siap diakreditasi	Lembaga	309	223	495	795	1,108	1,445							
IKP.4.3.3	Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah	Orang	-	6,151	54,604	150,746	325,737	556,501							
SP.4.4	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota.														
IKP.4.4.1	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	Lembaga	-	39,724	52,628	64,224	75,820	87,417							
IKP.4.4.2	Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	Orang	-	255,500	970,900	1,890,700	3,014,900	4,343,500							
SP.4.5	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota														
IKP.4.5.1	Jumlah model/program PAUD dan Dikmas yang dibakukan dan diterapkan	Naskah	90	164	250	336	422	508							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
2019	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas									115,996.3	121,796.2	127,886.0	134,280.3	140,994.3	640,953	Setditjen PAUD & DIKMAS
SK.4.2019.1	Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PAUD dan DIKMAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku									115,996.3	121,796.2	127,886.0	134,280.3	140,994.3	640,953	
IKK.4.2019.1.1	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota	Dokumen	532	545	545	545	545	545								
IKK.4.2019.1.2	Jumlah kabupaten/kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Kab/Kota	160	300	350	400	450	511								
IKK.4.2019.1.3	Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas	Dokumen	46	47	47	47	47	47								
IKK.4.2019.1.4	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas	Dokumen	46	47	47	47	47	47								
IKK.4.2019.1.5	Jumlah dokumen pengelolaan keungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	13	13	13	13	13	13								
IKK.4.2019.1.6	Jumlah dokumen laporan keungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	2	2	2	2	2	2								
IKK.4.2019.1.7	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	Dokumen	18	18	16	18	21	21								
IKK.4.2019.1.8	Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	13	13	13	13	13	13								
IKK.4.2019.1.9	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	Dokumen	3	11	11	11	11	11								
IKK.4.2019.1.10	SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	Orang	104	104	117	130	130	117								
IKK.4.2019.1.11	Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga/satuan PAUD-Dikmas memperoleh penguatan kapasitas	Lembaga	340	34	40	40	40	40								
IKK.4.2019.1.12	Jumlah dokumen kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
IKK.4.2019.1.13	Jumlah dokumen ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
IKK.4.2019.1.14	Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Dokumen	12	12	12	12	12	12								
IKK.4.2019.1.15	Jumlah peralatan dan fasilitas perkatoran	Unit	1	1	1	1	1	1								
IKK.4.2019.1.16	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	6	-	2	-	2	2								
IKK.4.2019.1.17	Gedung/bangunan	M2	-	-	4,000	2,000		2,000								
4074	Layanan pengkajian, pengembangan model/program, dan pemetaan mutu PAUD Dikmas									129,364.0	200,550.0	203,734.0	204,531.0	206,083.0	944,262	Balai dan Pusat PAUD
SK.4.4074.1	Fasilitas, komptensi pendidik/tenaga kependidikan dan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global									129,364.0	200,550.0	203,734.0	204,531.0	206,083.0	944,262	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.4.4074.1. 1	Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Naskah		20	132	132	132	132							
IKK.4.4074.1. 2	Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan	Lembaga		2,895	2,895	2,895	2,895	2,895							
IKK.4.4074.1. 3	Dokumen NSPK pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Dokumen		-	64	45	30	30							
IKK.4.4074.1. 4	Jumlah peralatan dan fasilitas perkatoran	Unit	8	8	8	8	8	8							
IKK.4.4074.1. 5	Kendaraan operasional perkantoran	Unit		-	8	-	8	-							
IKK.4.4074.1. 6	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	16	16	16	16	16	16							
IKK.4.4074.1. 7	Dokumen keuangan, kepeawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dokumen	32	32	32	32	32	32							
IKK.4.4074.1. 8	Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas	Dokumen	8	8	8	8	8	8							
IKK.4.4074.1. 9	Bangunan gedung	M2		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000							
2016	Penyediaan layanan PAUD								598,788.0	1,426,577.6	1,522,048.0	1,638,428.0	1,690,842.0	6,876,684	Dit. Pembinaan PAUD
SK.4.2016.1	Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PAUD yang berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global								598,788.0	1,426,577.6	1,522,048.0	1,638,428.0	1,690,842.0	6,876,684	
IKK.4.2016.1. 1	Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	Lembaga	45,000	73,000	159,118	170,000	185,000	190,000							
IKK.4.2016.1. 2	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi	Lembaga	-	-	70	70	70	70							
IKK.4.2016.1. 3	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	Lembaga		350	400	400	400	400							
IKK.4.2016.1. 4	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	Ruang Kelas		50	100	140	150	200							
IKK.4.2016.1. 5	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	Lembaga		1,100	2,500	3,000	3,500	4,000							
IKK.4.2016.1. 6	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	Lembaga		-	6,982	6,982	6,982	6,982							
IKK.4.2016.1. 7	Jumlah dokumen NSPK PAUD	Dokumen	20	20	15	10	10	10							
IKK.4.2016.1. 8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkatoran	Unit	1	1	1	1	1	1							
IKK.4.2016.1. 9	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	2	2	-	-	2	-							
IKK.4.2016.1. 10	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	2	2	2	2	2							
IKK.4.2016.1. 11	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dokumen	4	4	4	4	4	4							
IKK.4.2016.1. 12	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	3	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.4.2016.1. 13	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD	Kab/ Kota			20	40	70	110								
IKK.4.2016.1. 14	Kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	Kab/ Kota			100	150	200	225								
IKK.4.2016.1. 15	Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk	Lembaga			2,000	2,000	2,500	3,000								
2015	Penyediaan layanan kursus dan pelatihan								186,069.5	509,239.6	614,664.4	648,633.8	665,342.8	2,623,950	Dit.	
SK.4.2015.1	Fasilitas Kursus dan Pelatihan, kompetensi penyelenggara/pendidik Kursus dan pelatihan, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global								186,069.5	509,239.6	614,664.4	648,633.8	665,342.8	2,623,950	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	
IKK.4.2015.1. 1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	Orang		40,000	90,000	90,000	90,000	90,000								
IKK.4.2015.1. 2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha	Orang		20,000	30,000	50,000	50,000	50,000								
IKK.4.2015.1. 3	Jumlah kabupaten dan kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan	Kab/ Kota	-	-	15	20	20	20								
IKK.4.2015.1. 4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	Naskah		18	36	37	40	38								
IKK.4.2015.1. 5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga		33	900	900	900	900								
IKK.4.2015.1. 6	Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	Naskah		3	5	5	5	5								
IKK.4.2015.1. 7	Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	Lembaga		50	263	350	438	525								
IKK.4.2015.1. 8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	Orang		51,773	108,000	140,000	140,000	140,000								
IKK.4.2015.1. 9	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	Lembaga		-	1,022	1,022	1,022	1,022								
IKK.4.2015.1.	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	Lembaga		2,000	5,093	5,194	5,298	5,404								
IKK.4.2015.1.	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	Lembaga		1,800	2,500	3,000	3,500	4,000								
IKK.4.2015.1. 12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	Orang		100	175	250	325	357								
IKK.4.2015.1. 13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	Orang		-	26,000	30,000	40,000	45,000								
IKK.4.2015.1.	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	1								
IKK.4.2015.1.	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	2	-	2	-	2	-								
IKK.4.2015.1.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	2	2	2	2	2								
IKK.4.2015.1.	Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dokumen	4	4	4	4	4	4								
2018	Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan								1,159,445.0	1,327,912.4	1,348,133.2	1,409,734.5	1,327,372.0	6,572,597	Dit.	
															Pembinaan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK.4.2018.1	Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global								1,159,445.0	1,327,912.4	1,348,133.2	1,409,734.5	1,327,372.0	6,572,597	Pendidikan Masyarakat
IKK.4.2018.1.1	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Orang		150,525	150,525	150,525	150,525	150,525							
IKK.4.2018.1.2	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	Orang	-	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200							
IKK.4.2018.1.3	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang		3,140	2,635	2,345	2,245	2,025	4,710.0	3,952.5	3,517.5	3,367.5	3,037.5		(46,013)
IKK.4.2018.1.4	Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional	Orang		652,213	169,660	156,558	143,456	130,354		254,490.0	234,837.0	215,184.0	195,531.0		
IKK.4.2018.1.5	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (paket C) dan vokasional	Orang		25,200	407,070	427,449	433,308	429,611							
IKK.4.2018.1.6	Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lembaga		-	35	45	50	50							
IKK.4.2018.1.7	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa		-	68	68	68	68							
IKK.4.2018.1.8	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa		-	68	68	68	68							
IKK.4.2018.1.9	Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Orang		10,000	13,000	15,500	18,000	20,500							
IKK.4.2018.1.10	Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	Lembaga		260	307	307	307	102							
IKK.4.2018.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga		445	545	600	625	675							
IKK.4.2018.1.12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	Lembaga		-	214	235	257	280							
IKK.4.2018.1.13	Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	Lembaga		-	97	125	125	42							
IKK.4.2018.1.14	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lembaga		-	20	10	25	25							
IKK.4.2018.1.15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lembaga		-	68	80	100	120							
IKK.4.2018.1.	Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	Naskah	20	20	15	10	10	10							
IKK.4.2018.1.	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	1							
IKK.4.2018.1.	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	2	2	-	-	2	-							
IKK.4.2018.1.	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	2	2	2	2	2							
IKK.4.2018.1.	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dokumen	4	4	4	4	4	4							
IKK.4.2018.1.	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	Dokumen	3	1	1	1	1	1							
xxxx	Penyediaan layanan pendidikan keluarga								400,000.0	800,000.0	800,000.0	800,000.0	800,000.0	3,600,000	Dit. Pembiayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
SK.4.xxxx.1	Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik, orangtua/wali peserta didik, dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keluarga yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global									400,000.0	800,000.0	800,000.0	800,000.0	800,000.0	3,600,000	Pendidikan Keluarga
IKK.4.xxxx.1.1	Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi	Lembaga		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000								
IKK.4.xxxx.1.2	Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orangtua	Lembaga	0	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
IKK.4.xxxx.1.3	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak	Lembaga	-	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
IKK.4.xxxx.1.4	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali dan pengasuh memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga	Orang	-	72,000	180,000	324,000	432,000	540,000								
IKK.4.xxxx.1.5	Jumlah konten/materi diunggah ke kanal pendidikan keluarga	konten	-	145	165	185	215	225								
IKK.4.xxxx.1.6	Jumlah dokumen NSPK pendidikan keluarga	Dokumen	-	20	15	10	10	10								
IKK.4.xxxx.1.7	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	-	1	1	1	1	1								
IKK.4.xxxx.1.8	Kendaraan operasional perkantoran	Unit	-	2	-	-	2	-								
IKK.4.xxxx.1.9	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen		2	2	2	2	2								
IKK.4.xxxx.1.10	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	Dokumen		4	4	4	4	4								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
05 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									1,342,787	1,577,180	1,643,220	1,643,773	1,707,505	7,914,464	BALITBANG
SP.5.1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan														
IKP.5.1.1	Persentase Hasil pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%		60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	95.0%							
IKP.5.1.2	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang digunakan	%		50.0%	60.0%	70.0%	75.0%	80.0%							
IKP.5.1.3	Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	%		80.0%	86.0%	92.0%	96.0%	100.0%							
SP.5.2	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang kebudayaan														
IKP.5.2.1	Persentase rekomendasi kebijakan kebudayaan yang digunakan	%		50.0%	60.0%	70.0%	75.0%	80.0%							
IKP.5.2.2	Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi untuk pelestarian arkeologi yang dimanfaatkan	%		50.0%	60.0%	70.0%	75.0%	80.0%							
SP.5.3	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan Akreditasi														
IKP.5.3.1	Persentase Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%		81.0%	86.0%	91.0%	96.0%	98.0%							
IKP.5.3.2	Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP	%		3.0%	5,4%	8.0%	10,4%	13.0%							
IKP.5.3.3	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan	Jumlah		6	6	6	6	6							
IKP.5.3.4	Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
SP.5.4	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/Skor Laki														
IKP.5.4.1	Perolehan nilai LAKIP Balitbang	Skor		70	74	78	82	85							
2027	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan								100,858	107,861	117,801	133,059	144,922	604,501	Puskur
SK.5.2027.1	Terselenggaranya pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan buku pelajaran								27,162	23,698	26,553	29,435	33,413	140,261	
IKK.5.2027.1.1	Jumlah model perbukuan	Dokumen	196	130	106	111	115	122							
SK.5.2027.2	Tersusunnya kurikulum dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan								73,696	84,163	91,248	103,624	111,510	464,241	
IKK.5.2027.1.1	Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUD Dikmas	Dokumen	104	60	74	75	80	80							
IKK.5.2027.1.2	jumlah model kurikulum dan pembelajaran	Dokumen	5	9	10	10	10	10							
IKK.5.2027.1.4	persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan	%	94.4%	19.0%	37.0%	56.0%	78.0%	95.0%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.5.2027.1. 5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	16	4	4	4	4	4								
IKK.5.2027.1. 6	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12								
2028	Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan								62,461	58,668	63,261	68,645	74,934	327,969	Puslitjak	
SK .5.2028.1	Tersedianya kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian pendidikan								50,194	46,557	50,476	55,149	60,685	263,061		
IKK.5.2028.1. 1	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian pendidikan	Dokumen	25	25	25	25	25	25								
IKK.5.2028.2. 2	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	5	4	4	4	4	4								
IKK.5.2028.2. 3	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12								
SK .5.2028.2	Tersedianya kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian kebudayaan								12,267	12,111	12,784	13,496	14,249	64,907		
IKK.5.2028.2. 1	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian kebudayaan	Dokumen	14	10	11	11	12	12								
IKK.5.2028.2. 2	Jumlah hasil dokumentasi dan publikasi Puslitbang kebudayaan	Dokumen	0	8	8	8	8	8								
2029	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan								71,326	76,698	82,445	88,631	95,293	414,393	Puspendik	
SK .5.2029.1	Terseleenggaranya pengembangan penilaian dalam mengukur mutu pendidikan								71,326	76,698	82,445	88,631	95,293	414,393		
IKK.5.2029.1. 1	Jumlah soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional	Soal	121,850	129,830	130,000	130,000	130,000	130,000								
IKK.5.2029.1. 2	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan tes berbasis komputer (CBT)	sek		540	540	540	540	540								
IKK.5.2029.1. 3	Jumlah laporan hasil analisis penilaian sebagai bahan kebijakan	Dokumen	17	8	8	8	8	8								
IKK.5.2029.1. 4	Jumlah model Penilaian Pendidikan	Dokumen	10	5	5	5	5	5								
IKK.5.2029.1. 5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	3	4	4	4	4	4								
IKK.3.2029.5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12								
2030	Penelitian dan pengembangan bidang arkeologi								69,252	74,446	80,029	86,031	92,483	402,242	Pusat Arkeologi	
SK .5.2030.1	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi								69,252	74,446	80,029	86,031	92,483	402,242		
IKK.5.2030.1. 1	Jumlah dokumen Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin dan tematis	Dokumen		164	125	127	129	131								
IKK.5.2030.1. 2	Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi	Dokumen		6	10	14	18	22								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.5.2030.1. 3	Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeolog	Dokumen		2,360	3,500	3,500	3,500	3,500								
IKK.5.2030.1. 4	Jumlah Rumusan Kebijakan dan rekomendasi Penelitian dan pengembangan Arkeologi	Dokumen		29	29	29	29	29								
IKK.5.2030.1. 5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen		4	4	4	4	4								
IKK.5.2030.6	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan		12	12	12	12	12								
2031	Fasilitas Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi								981,271	1,197,824	1,231,552	1,192,051	1,216,422	5,819,119	BSNP dan BAN	
SK .5.2031.1	Sekolah/Madrasah yang terakreditasi sesuai SNP								167,368	435,685	429,090	335,953	311,742	1,679,838		
IKK.5.2031.1. 1	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	sek	19,000	28,000	51,140	48,000	33,690	29,807								
SK .5.2031.2	Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai SNPT								190,852	-	-	-	-	190,852		
IKK.5.2031.2. 1	Jumlah Perguruan Tinggi yang diakreditasi Sesuai SNPT	Prodi/Institusi/ LAM	3,560	4,709	-	-	-	-								
SK .5.2031.3	Akreditasi Program/Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP								44,504	174,571	204,903	248,316	286,434	958,728		
IKK.5.2031.3. 1	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP	Program/Satuan PNF	900	5,000	20,000	22,000	25,000	27,000								
SK .5.2031.4	SNP dikembangkan yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan								20,000	21,400	22,898	24,501	26,216	115,015		
IKK.5.2031.4. 1	Jumlah SNP yang dikembangkan (yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan)	Dokumer	6	6	6	6	6	6								
SK .5.2031.5	Terselenggaranya Pelaksanaan pencapaian kompetensi Peserta Didik Sesuai SNP								558,547	566,168	574,661	583,281	592,030	2,874,687		
IKK.5.2031.5. 1	Jumlah Peserta Didik yang dinilai Kompetensinya sesuai SNP untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	Peserta Didik	7,335,629	7,437,351	7,548,911	7,662,145	7,777,077	7,893,733								
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud								57,620	61,682	68,133	75,355	83,451	346,240	Set BALITBAN	
SK .5.2032.6	Tercapainya efisiensi dan efektifitas tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Badan								57,620	61,682	68,133	75,355	83,451	346,240		
IKK.5.2032.6. 1	Jumlah dokumen perencanaan, kerjasama, anggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	20	15	15	15	15	15								
IKK.5.2032.6. 2	Jumlah dokumen hukum, tata laksana,dan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	31	4	4	4	4	4								
IKK.5.2032.6. 3	Jumlah dokumen umum, dan simak BMN yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	3	4	4	4	4	4								
IKK.5.2032.6. 4	Jumlah dokumen keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Dokumen	8	5	5	5	5	5								
IKK.5.2032.6. 5	Jumlah bulan untuk layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
06 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA								501,226.8	511,251.3	521,476.3	532,247.7	543,244.8	2,609,447	BADAN BAHASA	
SP.6.1	Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414														
IKP.6.1.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra			37	43	43	43	43							
IKP.6.1.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul			11,224	33,734	33,734	33,734	33,734							
IKP.6.1.3	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			44,600	44,600	44,600	44,600	44,600							
IKP.6.1.4	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan			240	240	240	240	240							
SP.6.2	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik (persentase kab/kota penerima anugerah bahasa)														
IKP.6.2.1	Jumlah masyarakat yang terlayani Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			35,517	109,430	109,430	109,430	109,430	35,517	109,430	109,430	109,430	109,430		
IKP.6.2.2	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya			195	195	195	195	195							
SP.6.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia														
IKP.6.3.1	Jumlah akses diplomasi kebahasaan			3,623	3,623	3,623	3,623	3,623							
SP.6.4	Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah														
IKP.6.4.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi			24	24	24	24	24							
IKP.6.4.2	Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan			81,934	81,934	81,934	81,934	81,934							
SP.6.5	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan														
IKP.6.5.1	Nilai Lakip Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			82	84	86	88	90							
2020	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra								135,607	138,319	141,086	143,907	146,785	705,704	Set Badan Bahasa
SK.6.2020.1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan								135,607.0	138,319.2	141,085.5	143,907.3	146,785.4	705,704	
IKK.6.2020.1.1	Jumlah bahan kebijakan kebahasaan			12	12	12	12	12							
IKK.6.2020.1.2	Jumlah SDM yang ditingkatkan mutunya			200	200	200	200	200							
IKK.6.2020.1.3	Persentase tindak lanjut hasil temuan			70	75	80	85	100							
IKK.6.2020.1.4	Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan			70	75	80	85	100							
IKK.6.2020.1.5	Jumlah Tempat Uji Kemahiran (TUK) berbahasa			6	6	6	6	6							
IKK.6.2020.1.6	Jumlah pengunjung perpustakaan			500	550	600	650	700							
2021	Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								27,701	28,255	28,820	29,396	29,984	144,157	Pusat Pengemban

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
SK.6.2021.1	Meningkatnya jumlah dan mutu kajian kebahasaan dan kesastraan									7,646.5	7,799.4	7,955.4	8,114.5	8,276.8	39,793	rgan Infrastruktur dan Perlindungan Bahasa	
IKK.6.2021.1.1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan			22	16	10	4	2									
IKK.6.2021.1.2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra			11	11	11	11	11									
IKK.6.2021.1.3	Jumlah artikel terpublikasi dalam jurnal terakreditasi			10	10	10	10	10									
IKK.6.2021.1.4	Jumlah jurnal kebahasaan dan kesastraan terakreditasi			2	2	2	2	2									
SK.6.2021.2	Meningkatnya jumlah dan mutu bahan ajar bahasa dan sastra									2,566.8	2,618.1	2,670.5	2,723.9	2,778.3	13,358		
IKK.6.2021.2.1	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa dan sastra terkembangkan			3	3	3	3	3									
IKK.6.2021.2.2	Jumlah bahan ajar bahasa dan sastra daerah			2	2	2	2	2									
IKK.6.2021.2.3	Jumlah bahan ajar BIPA			1	1	1	1	1									
SK.6.2021.3	Meningkatnya jumlah dan mutu alat uji kebahasaan									3,299.2	3,365.2	3,432.5	3,501.2	3,571.2	17,169		
IKK.6.2021.3.1	Jumlah baterai (butir) UKBI terkembangkan			8	4	4	4	4									
SK.6.2021.4	Meningkatnya jumlah dan mutu kosakata bahasa Indonesia									5,744.8	5,859.7	5,976.9	6,096.4	6,218.3	29,896		
IKK.6.2021.4.1	Jumlah kosakata Indonesia			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000									
IKK.6.2021.4.2	Jumlah lema KBBI			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000									
IKK.6.2021.4.3	Jumlah lema kamus bidang ilmu			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000									
IKK.6.2021.4.4	Jumlah lema glosarium			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500									
IKK.6.2021.4.5	Jumlah lema ensiklopedia			100	100	100	100	100									
IKK.6.2021.4.6	Jumlah lema tesaurus			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000									
IKK.6.2021.4.7	Jumlah lema kamus ekabahasa			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000									
IKK.6.2021.4.8	Jumlah lema kamus dwibahasa			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000									
IKK.6.2021.4.9	Jumlah lema kamus bahasa daerah			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000									
IKK.6.2021.4.10	Jumlah lema kamus pelajar			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000									
SK.6.2021.5	Meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi									5,401.2	5,509.2	5,619.4	5,731.8	5,846.4	28,108		
IKK.6.2021.5.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi			5	5	5	5	5									
IKK.6.2021.5.2	Jumlah bahasa dan sastra terevitalisasi			9	9	9	9	9									
SK.6.2021.6	Meningkatnya jumlah lembaga terfasilitasi dalam penanganan pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra									3,042.5	3,103.3	3,165.4	3,228.7	3,293.3	15,833		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.6.2021.6. 1	Jumlah lembaga yang terkoordinasi dan terfasilitasi dalam pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra			9	9	9	9	9								
IKK.6.2021.6. 2	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan perlindungan bahasa dan sastra			4	4	4	4	4								
2022	Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra								32,860	33,517	34,188	35,213	36,270	172,047		Pusat Pembinaan dan Pemasarak atan Bahasa dan Sastra
SK.6.2022.1	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa dan apresiasi sastra								3,018.4	3,078.8	3,140.4	3,234.6	3,331.6	15,804		
IKK.6.2022.1. 1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan			7	20	20	20	20								
IKK.6.2022.1. 2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra			38	40	45	50	55								
IKK.6.2022.1. 3	Jumlah artikel terpublikasi dalam jurnal terakreditasi			30	50	50	50	50								
IKK.6.2022.1. 4	Jumlah Bahan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra			3	1	1	1	1								
SK.6.2022.2	Meningkatnya mutu dan jumlah pendidik yang terbina penggunaan bahasa dan sastra								18,592.9	18,964.8	19,344.1	19,924.4	20,522.1	97,348		
IKK.6.2022.2. 1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600								
IKK.6.2022.2. 2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI			240	240	240	240	240								
SK.6.2022.3	Meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra								2,185.2	2,228.9	2,273.5	2,341.7	2,412.0	11,441		
IKK.6.2022.3. 1	Jumlah bahan ajar pengayaan pengajaran (pembelajaran) bahasa dan sastra			240	240	240	240	240								
SK.6.2022.4	Meningkatnya mutu penyuluhan bahasa dan sastra								2,063.8	2,105.1	2,147.2	2,211.6	2,277.9	10,805		
IKK.6.2022.4. 1	Jumlah bahan penyuluhan bahasa dan sastra			12	12	12	12	12								
SK.6.2022.5	Meningkatnya mutu dan jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra								2,767.7	2,823.1	2,879.5	2,965.9	3,054.9	14,491		
IKK.6.2022.5. 1	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			3,839	3,839	3,839	3,839	3,839								
IKK.6.2022.5. 2	Jumlah pengapresiasi sastra			410	410	410	410	410								
IKK.6.2022.5. 3	Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra			12	12	12	12	12								
SK.6.2022.6	Meningkatnya mutu dan jumlah lembaga yang terbina dalam penggunaan bahasa								4,232.0	4,316.6	4,402.9	4,535.0	4,671.1	22,158		
IKK.6.2022.6. 1	Jumlah satuan kerja pemerintah yang terbina penggunaan bahasanya			68	68	68	68	68								
IKK.6.2022.6. 2	Jumlah lembaga pendidikan yang terbina penggunaan bahasanya			102	102	102	102	102								
IKK.6.2022.6. 3	Jumlah lembaga yang terkoordinasi dan terfasilitasi dalam pembinaan bahasa dan sastra			25	25	25	25	25								
XXXX	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan								57,644	58,797	59,973	61,172	62,396	299,982		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
SK.6.XXXX.1	Meningkatnya mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan									26,522.9	27,053.3	27,594.4	28,146.3	28,709.2	138,026	
IKK.6.XXXX.1.1	Jumlah pedoman kebahasaan dan kesastraan			10	8	6	4	2								
IKK.6.XXXX.1.2	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra			10	10	10	10	10								
IKK.6.XXXX.1.3	Jumlah bahasa dan sastra terpetakan			14	14	14	14	14								
IKK.6.XXXX.1.4	Jumlah naskah terjemahan			10	10	10	10	10								
IKK.6.XXXX.1.5	Jumlah bahan ajar BIPA			6	6	6	6	6								
IKK.6.XXXX.1.6	Jumlah bahan ajar bahasa asing strategis			5	5	5	5	5								
SK.6.XXXX.2	Meningkatnya mutu dan jumlah pemelajar bahasa asing strategis									3,418.9	3,487.3	3,557.0	3,628.2	3,700.7	17,792	
IKK.6.XXXX.2.1	Jumlah pemelajar bahasa asing strategis			400	400	400	400	400								
SK.6.XXXX.3	Meningkatnya mutu dan jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi orang asing									14,016.4	14,296.8	14,582.7	14,874.4	15,171.9	72,942	
IKK.6.XXXX.3.1	Jumlah guru bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di luar negeri			20	20	20	20	20								
IKK.6.XXXX.3.2	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi orang asing (BIPA)			200	200	200	200	200								
SK.6.XXXX.4	Meningkatnya mutu dan jumlah akses diplomasi kebahasaan									12,906.6	13,164.7	13,428.0	13,696.6	13,970.5	67,166	
IKK.6.XXXX.4.1	Jumlah pengunjung laboratorium kebinekaan bahasa dan perpustakaan			-	300	350	400	450								
IKK.6.XXXX.4.2	Jumlah institusi penyelenggara pengajaran Bahasa Indonesia di luar negeri			5	5	5	5	5								
IKK.6.XXXX.4.3	Jumlah lembaga internasional pengguna bahasa Indonesia			2	2	2	2	2								
IKK.6.XXXX.4.4	Jumlah bahan kebijakan teknis strategi dan diplomasi kebahasaan			2	2	2	2	2								
SK.6.XXXX.5	Meningkatnya mutu dan jumlah penerjemah									779.3	794.8	810.7	827.0	843.5	4,055	
IKK.6.XXXX.5.1	Jumlah penerjemah tulis dan lisan (interpreter)			27	27	27	27	27								
YYYY	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra di Daerah									247,415	252,363	257,410	262,558	267,810	1,287,556	Balai Bahasa
SK.6.YYYY.1	Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah									8,294.0	8,459.9	8,629.1	8,801.7	8,977.7	43,162	
IKK.6.YYYY.1.1	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra			331	331	331	331	331								
IKK.6.YYYY.1.2	Jumlah kosakata Indonesia			48,334	48,334	48,334	48,334	48,334								
SK.6.YYYY.2	Meningkatnya akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah									400.3	408.3	416.5	424.8	433.3	2,083	
IKK.6.YYYY.2.1	Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan sastra daerah			9	9	9	9	9								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
SK.6.YYYY.3	Meningkatnya akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah									119,273.6	121,659.1	124,092.2	126,574.1	129,105.6	620,705	
IKK.6.YYYY.3. 1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			36,367	36,367	36,367	36,367	36,367								
IKK.6.YYYY.3. 2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI			6,393	6,393	6,393	6,393	6,393								
IKK.6.YYYY.3. 3	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			31,678	31,678	31,678	31,678	31,678								
IKK.6.YYYY.3. 4	Jumlah pengapresiasi sastra			10,235	10,235	10,235	10,235	10,235								
IKK.6.YYYY.3. 5	Jumlah pemelajar BIPA			2,951	2,951	2,951	2,951	2,951								
IKK.6.YYYY.3. 6	Jumlah penerjemah lisan dan tulis (Interpreter)			8	8	8	8	8								
IKK.6.YYYY.3. 7	Jumlah lembaga yang penggunaan bahasanya terkendali			96	96	96	96	96								
SK.6.YYYY.4	Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah									119,446.8	121,835.8	124,272.5	126,757.9	129,293.1	621,606	
IKK.6.YYYY.4. 1	Jumlah pengunjung perpustakaan Balai/Kantor Bahasa			14,270	14,270	14,270	14,270	14,270								
IKK.6.YYYY.4. 2	Persentase tindak lanjut hasil temuan			70	70	70	70	70								
IKK.6.YYYY.4. 3	Nilai Lakip Balai/Kantor Bahasa			80	80	80	80	80								
IKK.6.YYYY.4. 4	Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan			75	75	75	75	75								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
07- PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								11,817,832	14,390,948	15,108,325	15,788,200	16,498,669	73,603,975	DITJEN GURU DAN PTK	
SP.7.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan Paud dan Dikmas dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa														
IKP.7.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	52.52	55,91	62,70	72,88	86,45	100.00							
IKP.7.1.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	30.00	55.48	63.80	74.64	88.82	100.00							
IKP.7.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0	%	47.00	55.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
IKP.7.1.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	15.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
IKP.7.1.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus	%	15.00	25.00	31.00	43.00	55.00	68.00							
SP.7.2	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdasmen dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge , yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa														
IKP.7.2.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	84.44	87.22	89.99	93.07	96.46	100.00							
IKP.7.2.2	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	%	30.00	55.48	63.80	74.64	88.82	100.00							
IKP.7.2.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0	%	47.00	55.00	65.00	70.00	75.00	80.00							
IKP.7.2.4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	%	15.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00							
IKP.7.2.5	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus	%	15.00	42.33	49.81	57.29	64.77	73.20							
SP.7.3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD dan Dikmas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota														
IKP.7.3.1	Persentase PTK PAUD dan Dikmas berkualifikasi S1/D4	%	27,7	30.97	34.21	41.51	48.89	52.36							
IKP.7.3.2	Persentase PTK PAUD dan Dikmas memperoleh peningkatan kompetensi	%	23,6	34.85	46.06	60.95	80.75	87.08							
IKP.7.3.3	Persentase PTK PAUD dan Dikmas memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	27,9	43.91	59.96	67.85	76.33	82.51							
IKP.7.3.4	Persentase PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat karirnya	%	23,5	35.05	46.64	58.23	69.81	81.40							
IKP.7.3.5	Persentase PAUD dan Dikmas yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	%	6,8	8.49	10.21	11.94	13.66	15.39							
SP.7.4	Peningkatan manajemen guru dan pendidikan keguruan														
IKP.7.4.1	Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki GTK sesuai dengan SNP	%	78,6	79.60	80.60	91.90	96.00	98.40							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.7.4.2	Persentase GTK dikdas memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	66,0	68.14	70.24	72.33	74.43	76.52							
IKP.7.4.3	Persentase GTK dikdas meningkat kariernya	%	12,5	14.63	16.77	18.87	20.97	23.06							
IKP.7.4.4	Persentase GTK dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	40,0	42.39	44.77	47.16	49.55	51.93							
SP.7.5	Tersedianya PTK Dikmen pada daerah Khusus														
IKP.7.5.1	Persentase GTK di SM pada daerah khusus	%	40,00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00							
SP.7.6	Meningkatnya pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan														
IKP.7.6.1	Persentase PTK SM yang meningkat karirnya	%	60,0	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00							
IKP.7.6.2	Persentase PTK Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	%	90,0	92.00	94.00	96.00	98.00	99.00							
IKP.7.6.3	Guru SM sesuai Mapel/bidang keahlian	%	29,0	31.00	33.00	35.00	38.00	40.00							
IKP.7.6.4	Persentase PTK Dikmen memperoleh penghargaan dan perlindungan	%	5,0	14.33	28.67	43.00	57.34	71.67							
SP.7.7	Meningkatnya jaminan hidup bagi guru dan tenaga kependidikan														
IKP.7.7.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup	%	49,3	69.86	90.42	96.33	98.86	100.00							
SP.7.8	Meningkatnya kualitas layanan														
IKP.7.8.1	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Guru dan Tendik meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya	%	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00							
XXXX	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan								77,260	99,593	104,573	109,279	114,196	504,902	Setditjen GURU dan PTK
SK.7.XXXX.1	Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan								77,260	99,593	104,573	109,279	114,196	504,902	
IKK.7.XXXX.1. 1	Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	%		95	95	95	95	95							
IKK.7.XXXX.1. 2	Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	Data		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000							
IKK.7.XXXX.1. 3	Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80	Nilai		80	80	80	80	80							
IKK.7.XXXX.1. 4	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	Kab/Kota		549	549	549	549	549							
IKK.7.XXXX.1. 5	Laporan Keuangan Ditjen sesuai peraturan perundangan	Prov/Kab		95	95	95	95	95							
IKK.7.XXXX.1. 6	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	Orang		95	95	95	95	95							
IKK.7.XXXX.1. 7	Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen berjalan efektif dan efisien	buah		95	95	95	95	95							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.7.XXXX.1. 8	Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN	Unit		95	95	95	95	95								
IKK.7.XXXX.1. 9	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen	Bulan	12	12	12	12	12	12								
2017	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas								2,384,889	2,487,105	2,611,460	2,728,976	2,851,779	13,064,208	Dit. PTK PAUD dan DIKMAS	
SK.7.2017.1	Meningkatnya profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas								24,144	102,877	108,021	112,882	117,961	465,885		
IKK.7.2017.1. 1	Jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik	Orang		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								
IKK.7.2017.1. 2	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK mencapai 8.0	Nilai	5	6	7	7	8	8								
IKK.7.2017.1. 3	Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya	Orang		169,468	197,713	225,958	254,202	282,447								
SK.7.2017.2	PTK PAUD dan Dikmas meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis PTK PAUD dan dikmas untuk mewujudkan revolusi mental								2,360,745	2,384,228	2,503,439	2,616,094	2,733,818	12,598,323		
IKK.7.2017.2. 1	Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4	Orang		10,565	15,162	15,292	20,455	20,653								
IKK.7.2017.2. 2	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmas memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4	Orang		480	777	859	1,337	1,913								
IKK.7.2017.2. 3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas memiliki kemampuan teknis pelaksanaan PAUD Inklusif dan penanganan bencana	Orang		0	6,757	8,521	9,901	10,283								
IKK.7.2017.2. 4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mengikuti diklat fungsional	Orang		0	4,221	5,962	6,702	8,444								
IKK.7.2017.2. 5	Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi	Orang		61,150	73,380	84,387	92,826	97,467								
IKK.7.2017.2. 6	Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional	Orang		15,269	23,233	42,586	31,939	21,296								
IKK.7.2017.2. 7	Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus	Orang		1,900	2,430	2,430	2,430	2,430								
IKK.7.2017.2. 8	Jumlah Guru Bantu penerima bantuan honor	Orang		1,310	1,310	1,210	1,110	1,010								
IKK.7.2017.2. 9	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	Orang		1,057	623	654	686	721								
IKK.7.2017.2. 10	Jumlah Guru KB/TPA memperoleh peningkatan kesejahteraan	Orang		22,610	31,222	38,200	39,422	40,888								
IKK.7.2017.2. 11	Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Dokumen		26	15	15	15	15								
IKK.7.2017.2. 12	Jumlah PTK PAUD dan Dikmas yang terfasilitasi peningkatan karirnya	Orang		9,844	3,010	3,010	3,010	3,010								
IKK.7.2017.2. 13	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Bulan		12	12	12	12	12								
3999	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar								4,502,207	5,184,705	5,443,940	5,688,918	5,944,919	26,764,689	Dit.	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
SK.7.3999.1	Meningkatnya profesionalisme Guru Pendidikan Dasar									144,863	495,852	520,645	544,074	568,557	2,273,990	Pembinaan Tendik Dasar	
IKK.7.3999.1.1	Jumlah guru Dikdas yang bersertifikat pendidik	Orang		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000									
IKK.7.3999.1.2	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru Dikdas mencapai 8.0	Nilai	5	6	7	7	8	8									
IKK.7.3999.1.3	Persentase guru Dikdas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya	%	-	60%	70%	80%	90%	100%									
SK.7.3999.2	Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar									4,357,344	4,688,853	4,923,296	5,144,844	5,376,362	24,490,699		
IKK.7.3999.2.1	Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan fungsional	Orang		59,916	59,916	59,916	59,916	59,916									
IKK.7.3999.2.2	Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan profesi	Orang		71,038	107,328	106,563	105,599	104,310									
IKK.7.3999.2.3	Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan khusus	Orang		53,375	92,464	92,464	92,464	92,464									
IKK.7.3999.2.4	Jumlah PTK di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Orang		755	785	816	849	883									
IKK.7.3999.2.5	Jumlah Guru Dikdas yang terfasilitasi peningkatan karirnya	Orang		327,485	375,463	422,396	469,329	516,262									
IKK.7.3999.2.6	Jumlah Guru Dikdas dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4	Orang		1,525,317	1,572,250	1,619,183	1,666,116	1,713,049									
IKK.7.3999.2.7	Jumlah Guru Dikdas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	Orang		1,430	1,430	1,430	1,430	1,430									
IKK.7.3999.2.8	Tersedianya NSPK dan sistem perencanaan kebutuhan Guru Dikdas	Dokumen		14	14	14	14	14									
IKK.7.3999.2.9	Guru Dikdas yang mendapatkan tunjangan guru bantu	Orang		2,754	2,754	2,754	2,754	2,754									
IKK.7.3999.2.10	Dukungan manajemen pelaksanaan pembinaan guru Dikdas	Bulan		12	12	12	12	12									
4000	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah									2,653,228	2,784,745	2,923,982	3,055,561	3,193,061	14,610,577	Dit.	
SK.7.4000.1	Meningkatnya profesionalisme Guru Pendidikan Menengah									164,692	220,500	231,525	241,943	252,831	1,111,490	Pembinaan Tendik Menengah	
IKK.7.4000.1.1	Jumlah Guru Dikmen yang bersertifikat pendidik	orang		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000									
IKK.7.4000.1.2	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru Dikmen mencapai 8.0	Nilai	5	6	7	7	8	8									
IKK.7.4000.1.3	Jumlah guru Dikmen yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya	Orang	-	1,989,901	2,048,242	2,106,582	2,164,923	2,223,264									
SK.7.4000.2	Meningkatnya kesejahteraan dan ketersediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menengah									2,488,536	2,564,245	2,692,457	2,813,618	2,940,231	13,499,088		
IKK.7.4000.2.1	Jumlah Guru Dikmen pada SM terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan sekolah darurat	Orang		650	750	850	950	1,050									
IKK.7.4000.2.2	Jumlah Guru Dikmen yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Orang		9,067	9,067	9,067	9,067	9,067									
IKK.7.4000.2.3	Guru Dikmen yang mendapatkan tunjangan profesi	Orang		74,042	86,223	93,436	93,436	93,436									
IKK.7.4000.2.4	Guru Dikmen yang mendapatkan tunjangan khusus	Orang		7,116	7,116	7,116	7,116	7,116									
IKK.7.4000.2.5	Guru Dikmen yang mendapatkan tunjangan fungsional	Orang		19,394	19,394	19,394	19,394	19,394									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKK.7.4000.2. 6	Guru Dikmen yang mendapatkan tunjangan guru bantu	Orang		2,305	2,305	2,305	2,305	2,305							
IKK.7.4000.2. 7	Jumlah Guru Dikmen yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	Orang		1,020	1,020	1,020	1,020	1,020							
IKK.7.4000.2. 8	Jumlah Guru Dikmen yang sesuai Mapel	Orang		1,564	1,564	1,564	1,564	1,564							
IKK.7.4000.2. 9	Guru Dikmen yang sesuai bidang Keahlian	Orang		2,225	2,225	2,225	2,225	2,225							
IKK.7.4000.2. 10	Guru Dikmen SMLB yang sesuai dengan ketunaannya dan layanan khusus	Orang		740	740	740	740	740							
IKK.7.4000.2. 11	Jumlah Guru Dikmen yang terfasilitasi peningkatan karirnya	Orang		2,472	2,472	2,472	2,472	2,472							
IKK.7.4000.2. 12	Tersedianya NSPK dan sistem perencanaan kebutuhan guru Dikmen	Dokumen		18	18	18	18	18							
IKK.7.4000.2. 13	Dukungan manajemen pelaksanaan pembinaan guru Dikmen	Bulan		12	12	12	12	12							
IKK.7.4000.2. 14	Jumlah PTK Dikmen yang berkualifikasi akademik S2	Orang		400	400	400	400	400							
YYYY	Pembinaan tenaga kependidikan Dikdasmen								103,643	526,986	551,165	575,968	601,886	2,359,648	Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen
SK.7.YYYY.1	Meningkatnya profesionalisme tenaga kependidikan								103,643	526,986	551,165	575,968	601,886	2,359,648	
IKK.7.YYYY.1. 1	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah mencapai 8.0	Nilai		5.6	6.6	7.1	7.6	8.0							
IKK.7.YYYY.1. 2	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pengawas sekolah mencapai 8.0	Nilai		5.7	6.7	7.2	7.6	8.0							
IKK.7.YYYY.1. 3	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan Tendik lainnya mencapai 8.0	Nilai		4.7	5.2	6.0	7.0	8.0							
IKK.7.YYYY.1. 4	Jumlah kepala sekolah yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya	%		246,556	246,556	246,556	246,556	246,556							
IKK.7.YYYY.1. 5	Jumlah pengawas sekolah yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya	%		34,065	34,065	34,065	34,065	34,065							
IKK.7.YYYY.1. 6	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang kompeten	%		369,409	369,409	369,409	369,409	369,409							
IKK.7.YYYY.1. 7	Jumlah pengawas Dikmen yang berkualifikasi akademik S2	Orang		400	400	400	400	400							
IKK.7.YYYY.1. 8	Jumlah tenaga kependidikan Dikdasmen yang meningkat kualifikasinya	Orang		400	400	400	400	400							
IKK.7.YYYY.1. 9	Jumlah Tenaga Kependidikan Dikdasmen yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	Orang		27,781	27,781	27,781	27,781	27,781							
IKK.7.YYYY.1. 10	Jumlah Tenaga Kependidikan Dikdasmen yang terfasilitasi peningkatan karirnya	Orang		18,521	18,521	18,521	18,521	18,521							
IKK.7.YYYY.1. 11	Tersedianya NSPK dan sistem perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan Dikdasmen	Dokumen		4	4	4	4	4							
IKK.7.YYYY.1. 12	Dukungan manajemen pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan Dikdasmen	Bulan		12	12	12	12	12							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
4004	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan									2,096,606	3,307,814	3,473,205	3,629,499	3,792,826	16,299,950	P4TK
SK.7.4004.1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya									2,096,606	3,307,814	3,473,205	3,629,499	3,792,826	16,299,950	
IKK.7.4004.1.1	Jumlah guru yang berkompeteren bidang TK/PLB	%	481	112,091	168,136	224,182	280,227	280,227								
IKK.7.4004.1.2	Jumlah guru yang berkompeteren bidang IPA	%	81,452	58,634	80,622	102,610	124,598	146,586								
IKK.7.4004.1.3	Jumlah guru yang berkompeteren bidang IPS dan Kewarganegaraan	%	52,980	191,264	262,989	334,713	406,437	478,161								
IKK.7.4004.1.4	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Matematika	%	12,422	46,092	63,376	80,660	97,945	115,229								
IKK.7.4004.1.5	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Penjas dan BK	%	25,154	68,353	91,137	113,921	136,705	170,882								
IKK.7.4004.1.6	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Bahasa	%	34,119	110,597	152,071	193,545	235,019	276,493								
IKK.7.4004.1.7	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Seni dan Budaya	%	25,906	52,125	69,500	86,875	104,250	130,313								
IKK.7.4004.1.8	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Bisnis dan Pariwisata	%	4,309	10,994	14,658	18,323	21,987	27,484								
IKK.7.4004.1.9	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Pertanian	%	982	1,409	1,878	2,348	2,817	3,521								
IKK.7.4004.1.10	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Mesin dan Teknik Industri	%	1,588	1,864	2,486	3,107	3,728	4,661								
IKK.7.4004.1.11	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Otomotif dan Elektronika	%	3,349	4,553	6,070	7,588	9,106	11,382								
IKK.7.4004.1.12	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Bangunan dan Listrik	%	1,747	2,317	3,090	3,862	4,634	5,793								
IKK.7.4004.1.13	Jumlah guru yang berkompeteren bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi	%	9,986	14,714	19,618	24,523	29,428	36,785								
IKK.7.4004.1.14	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten	%	75,212	110,823	147,764	184,705	221,645	277,057								
IKK.7.4004.1.15	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	%	-	14,300	26,628	49,804	85,308	117,114								
IKK.7.4004.1.16	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	%	-	7,460	10,594	16,624	22,687	28,785								
IKK.7.4004.1.17	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Tematik	Orang	-	594,810	594,810	594,810	594,810	594,810								
IKK.7.4004.1.18	Dukungan manajemen dan pelaksanaan Diklat pendidik dan tenaga kependidikan	Bulan	0	12	12	12	12	12								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
08 - PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA (SATKER BIDANG KEBUDAYAAN YG BERADA DI UNIT ESELON 1 LAIN)								1,714,158	2,378,043	2,550,565	2,365,688	2,372,997	11,381,451	DITJEN KEBUDAYA N	
SP.8.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya														
IKP.8.1.1	Jumlah mata budaya yang dilestarikan			86,720	89,152	91,332	93,462	95,592							
IKP.8.1.2	Jumlah negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia			40	43	46	49	52							
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya								219,646	277,246	210,298	179,885	159,142	1,046,217	Setditjen Kebudayaa n
SK.8.5180.1	Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan								4,200	8,457	4,021	3,440	3,043	23,161	
IKK.8.5180.1.1	Dokumen layanan bidang hukum	Peraturan		6	6	6	6	6							
SK.8.5180.2	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas SDM Bidang kebudayaan								116,716	133,041	111,748	95,588	84,565	541,658	
IKK.8.5180.2.1	Dokumen perencanaan dan evaluasi program	Laporan		14	14	14	14	14							
IKK.8.5180.2.2	Jumlah fasilitasi tata kelola bidang kebudayaan	Laporan		34	34	34	34	34							
IKK.8.5180.2.3	Dokumen keuangan	Laporan		15	15	15	15	15							
IKK.8.5180.2.4	Dokumen kepegawaian	Laporan		10	10	10	10	10							
IKK.8.5180.2.5	5. Pembangunan Pusat Pendidikan Tenaga Konservasi Koleksi Museum dan Cagar Budaya	Unit		1	1	1	1								
SK.8.5180.3	Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha								19,879	52,112	19,033	16,281	14,403	121,709	
IKK.8.5180.3.1	Dokumen kerjasama antar instansi	Laporan		4	4	4	4	4							
IKK.8.5180.3.2	Jumlah fasilitasi program yang diinisiasi oleh masyarakat	Laporan		20	60	60	60	60							
SK.8.5180.4	Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan								78,851	83,635	75,495	64,577	57,130	359,689	
IKK.8.5180.4.1	Dokumen kehumasan	Laporan		8	8	8	8	8							
IKK.8.5180.4.2	Dokumen data dan statistik kebudayaan	Laporan		5	5	5	5	5							
IKK.8.5180.4.3	Jumlah penyuluh budaya	Penyuluh		150	150	150	150	150							
IKK.8.5180.4.4	Jumlah bioskop keliling dalam rangka pembangunan karakter bangsa	Unit		31											
5182	Pelestarian cagar budaya dan permuseuman								231,737	319,129	343,616	371,304	413,389	1,679,175	Dit. Cagar Budaya dan Permuseum an
SK.8.5182.1	Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (cagar budaya)								42,590	68,152	63,151	68,240	75,974	318,107	
IKK.8.5182.1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya		2,500	2,500	2,500	2,502	2,505							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.8.5182.1. 2	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	Cagar Budaya		13	20	25	28	30								
SK .8.5182.2	Peningkatan kepercayaan antarwarga dengan ruang dialog di museum dan cagar budaya								9,766	22,828	14,481	15,648	17,422	80,145		
IKK.8.5182.2. 1	Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat	Even		15	9	9	9	9								
SK .8.5182.3	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi (permuseuman dan pelestarian cagar budaya)								14,834	14,437	21,995	23,768	26,462	101,496		
IKK.8.5182.3. 1	Kompetensi SDM kebudayaan bidang cagar budaya dan permuseuman (tersertifikasi)	Orang		1,000	1,125	1,125	1,125	1,125								
SK .8.5182.4	Pendataan aset budaya khususnya cagar budaya dan koleksi museum								14,975	16,274	22,205	23,995	26,714	104,164		
IKK.8.5182.4. 1	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditetapkan (registrasi dan ditetapkan)	Cagar Budaya		2,030	4,030	6,030	8,030	10,030								
IKK.8.5182.4. 2	Jumlah Koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasi)	Koleksi		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
IKK.8.5182.4. 3	Jumlah Museum yang distandarisasi	Museum		100	133	105	105	143								
SK .8.5182.5	Pembangunan dan revitalisasi museum								136,741	184,447	202,758	219,095	243,929	986,970		
IKK.8.5182.5. 1	Jumlah museum yang didirikan (non kumulatif)	Museum		11	10	10	10	10								
IKK.8.5182.5. 2	Jumlah museum yang direvitalisasi	Museum		11	15	15	15	15								
SK .8.5182.6	Penegakkan hukum dalam kewenangan pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya								12,831	12,992	19,025	20,558	22,888	88,294		
IKK.8.5182.6. 1	Jumlah Penanganan kasus pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Dokumen		10	10	10	10	10								
5183	Pembinaan kesenian								212,146	302,288	337,766	384,793	395,090	1,632,083	Dit. Kesenian	
SK .8.5183.1	Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)								9,686.4	4,723.5	15,422.2	17,569.4	18,039.6	65,441		
IKK.8.5183.1. 1	Kesenian yang difasilitasi	Laporan		35	100	105	110	115								
SK .8.5183.2	Pembangunan dan revitalisasi sarana kesenian								49,463.2	141,210.9	78,752.3	89,716.9	92,117.8	451,261		
IKK.8.5183.2. 1	Jumlah taman budaya yang direvitalisasi	Taman Budaya		3	4	5	5	5								
IKK.8.5183.2. 2	Jumlah taman budaya yang dibangun	Taman Budaya			2	2	2	3								
IKK.8.5183.2. 3	Penyusunan masterplan dan pembangunan pusat kesenian indonesia	Dokumen			1	1	1	1								
SK .8.5183.3	Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku seni								80,324.5	70,728.0	127,887.8	145,693.4	149,592.3	574,226		
IKK.8.5183.3. 1	Apresiasi karya seni oleh masyarakat	Even		13	30	30	30	30								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.8.5183.3. 2	Fasilitasi komunitas kesenian	Even			148	148	148	148								
SK .8.5183.4	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi								2,109.0	2,349.4	3,357.9	3,825.4	3,927.8	15,570		
IKK.8.5183.4. 1	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kesenian	Peserta		286	320	320	320	320								
SK .8.5183.5	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan								57,055.0	66,129.3	90,839.6	103,487.0	106,256.4	423,767		
IKK.8.5183.5. 1	Kesenian di sekolah yang difasilitasi	Unit		180	340	510	680	850								
IKK.8.5183.5. 2	Fasilitasi seni budaya laboratorium seni budaya dan film	Unit		6	28	30	40	46								
SK .8.5183.6	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar kesenian untuk menghaluskan budi pekerti siswa								1,680.8	1,872.3	2,676.0	3,048.6	3,130.2	12,408		
IKK.8.5183.6. 1	Pengkayaan materi ajar seni	Dokumen		8	10	10	11	11								
SK .8.5183.7	Pendataan aset budaya khususnya kesenian								1,314.6	1,464.4	2,093.0	2,384.4	2,448.2	9,704		
IKK.8.5183.7. 1	Data kesenian yang dikelola	Dokumen		6	5	6	6	6								
SK .8.5183.8	Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khsanah budaya bangsa								10,512.6	13,809.7	16,737.5	19,067.8	19,578.1	79,706		
IKK.8.5183.8. 1	Jumlah karya seni yang direvitalisasi	Karya Seni		2	2	3	4	5								
5184	Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi								153,864	208,000	210,147	212,371	224,215	1,008,597	Dit. Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	
SK .8.5184.1	Penguatan lembaga adat (pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya)								71,617	90,200	97,814	98,849	104,363	462,844		
IKK.8.5184.1. 1	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi	Komunitas Budaya		173	175	180	180	180								
IKK.8.5184.1. 2	Jumlah desa adat yang direvitalisasi	Desa Adat		118	118	120	120	120								
SK .8.5184.2	Peningkatan kepercayaan antarwarga antara lain dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan dialog dengan masyarakat adat dan kepercayaan terhadap Tuhan YME								5,667	11,800	7,740	7,822	8,258	41,286		
IKK.8.5184.2. 1	Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi yang diapresiasi masyarakat	Karya Budaya		1,105	1,105	1110	1110	1120								
SK .8.5184.3	Pencegahan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara								44,597	60,000	60,910	61,555	64,988	292,050		
IKK.8.5184.3. 1	Dialog pengakuan hak-hak sipil komunitas adat dan penghayat kepercayaan	Even		8	8	8	8	8								
SK .8.5184.4	Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khsanah budaya bangsa								9,798	9,000	13,382	13,524	14,278	59,983		
IKK.8.5184.4. 1	Pengetahuan dan ekspresi budaya kepercayaan dan tradisi yang direvitalisasi	Dok PTEBT		83	83	85	85	88								
SK .8.5184.5	Peningkatan peran lembaga keluarga, lembaga adat dan pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa								13,020	26,500	17,782	17,971	18,973	94,246		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.8.5184.5. 1	Pemberdayaan kepercayaan dan tradisi	Even		8	8	8	8	8								
SK .8.5184.6	Pendataan aset budaya khususnya kepercayaan dan tradisi								9,165	10,500	12,518	12,650	13,356	58,189		
IKK.8.5184.6. 1	Aset budaya kepercayaan dan tradisi yang terdata	Dokumen		1,000	1,000	1,250	1,250	1,500								
IKK.8.5184.6. 2	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kepercayaan dan tradisi	Peserta		100	100	100	100	100								
5185	Pengembangan sejarah								67,116	80,409	88,170	96,442	106,051	438,187		
SK .8.5185.1	Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal								11,780	14,356	15,475	16,927	18,613	77,150	Dit. Sejarah	
IKK.8.5185.1. 1	Jumlah buku sejarah (termasuk atlas dan buku sejarah)	Buku		12	12	12	12	12								
IKK.8.5185.1. 2	Dokumen sumber sejarah	Dokumen		11	12	12	12	12								
IKK.8.5185.1. 3	Penyusunan buku tokoh inspiratif	Buku			6	3	3	3								
SK .8.5185.2	Pemahaman peningkatan kompetensi SDM tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan								8,365	9,685	10,989	12,020	13,218	54,277		
IKK.8.5185.2.	Kompetensi SDM kebudayaan bidang kesejarahan	Peserta		2,413	2,413	2,413	2,413	2,413								
SK .8.5185.3	Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya								2,692	3,713	3,536	3,868	4,254	18,064		
IKK.8.5185.3. 1	Even sejarah yang difasilitasi	Even		33	34	34	34	34								
SK .8.5185.4	Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan								24,463	28,325	32,137	35,152	38,655	158,732		
IKK.8.5185.4. 1	Nilai sejarah yang diapresiasi oleh masyarakat	Peserta		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000								
SK .8.5185.5	Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan								737	1,485	969	1,060	1,165	5,417		
IKK.8.5185.5. 1	Data sejarah yang diinventarisir	Dokumen		100	150	175	200	225								
SK .8.5185.6	Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri								19,079	22,844	25,063	27,415	30,146	124,547		
IKK.8.5185.6. 1	Jumlah fasilitasi pengembangan rumah budaya nusantara	Rumah Budaya		40	45	45	45	45								
5186	Pengelolaan warisan dan diplomasi budaya								190,330	135,400	154,410	203,439	193,000	876,578		
SK .8.5186.1	Penguatan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal								2,500	2,299	2,028	2,672	2,535	12,034	Dit. Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	
IKK.8.5186.1. 1	Peserta internalisasi nilai warisan budaya dunia			1,201,200	1,205,000	1,207,000	1,209,000	1,211,000								
IKK.8.5186.1. 2	Penghargaan tokoh inspiratif bidang kebudayaan			5	5	5	5	5								
IKK.8.5186.1. 3	Penghargaan Bintang Budaya Paramadharma dan Satyalancana			15	15	15	15	15								
IKK.8.5186.1. 4	Anugerah Kebudayaan dan Maestro	Tokoh		80	80	80	80	80								
SK .8.5186.2	peningkatan diplomasi budaya luar negeri								54,900	69,516	44,539	58,681	55,670	283,306		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.8.5186.2. 1	Negara yang mengapresiasi diplomasi budaya Indonesia	Negara		36	43	46	49	52								
IKK.8.5186.2. 3	Even diplomasi budaya yang difasilitasi	Even		19	21	23	25	27								
SK .8.5186.3	Pengembangan pusat kebudayaan di luar negeri								107,300	36,781	87,050	114,690	108,805	454,626		
IKK.8.5186.3. 1	Negara yang mengapresiasi rumah budaya Indonesia	Rumah Budaya		10	11	11	12	12								
SK .8.5186.4	Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (benda dan tak benda)								25,630	26,804	20,793	27,395	25,989	126,612		
IKK.8.5186.4. 1	Kekayaan budaya yang ditetapkan	Kekayaan Budaya		100	150	200	250	300								
IKK.8.5186.4. 2	Warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola	Warisan Budaya		20	22	24	26	28								
IKK.8.5186.4. 3	Dialog dengan stakeholder warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola	Even		-	2	2	2	2								
5178	Pengelolaan Permuseuman								210,229	440,452	495,800	221,982	244,182	1,612,644	Dit. Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .8.5178.1	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum								4,991	6,612	11,771	5,270	5,797	34,441		
IKK.8.5178.1. 1	Jumlah koleksi museum yang dikelola (termasuk Koleksi museum yang direinventarisasi dan diakuisisi)	Koleksi Museum		75,448	76,000	76,500	77,000	77,500								
SK .8.5178.2	Meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi								203,594	431,542	480,152	214,976	236,475	1,566,739		
IKK.8.5178.2. 1	Masyarakat yang mengapresiasi museum	Orang		294,347	300,697	300,697	300,697	300,697								
IKK.8.5178.2. 2	Jumlah museum yang direvitalisasi	Museum		1	2	2	-	-								
IKK.8.5178.2. 3	Museum nasional yang dibangun dan ditata (M2/non akumulatif)	M2		39,000	39,000	39,000	-	-								
SK .8.5178.3	Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman								1,644	2,297	3,877	1,736	1,910	11,464		
IKK.8.5178.3. 1	Jumlah kajian pengembangan permuseuman (tata pameran, pengunjung, dan koleksi)	Kajian		23	25	26	27	28								
5181	Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala								299,010	335,597	362,556	396,673	435,672	1,829,508	Dit. Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya	
SK .8.5181.1	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya								299,010	335,597	362,556	396,673	435,672	1,829,508		
IKK.8.5181.1. 1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dikelola dan diinventarisasi)	Cagar Budaya		5,734	5,738	5,738	5,738	5,738								
IKK.8.5181.1. 2	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	Naskah		77	95	95	95	95								
IKK.8.5181.1. 3	Peserta internalisasi cagar budaya	Peserta		121,918	122,000	122,000	122,000	122,000								
IKK.8.5181.1. 4	Dokumen pelestarian cagar budaya	Dokumen		1,995	1,995	1,995	1,995	1,995								
IKK.8.5181.1. 5	Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat	LOKASI		4	4	4	4	4								
5179	Pelestarian nilai budaya								91,080	166,942	111,312	121,435	131,879	622,649	Dit. Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .8.5179.1	Peningkatan penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan								91,080	166,942	111,312	121,435	131,879	622,649		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.8.5179.1. 1	Jumlah Naskah hasil kajian pelestarian sejarah dan nilai budaya	Naskah		116	124	124	124	124								an
IKK.8.5179.1. 2	Dokumen pelestarian sejarah dan nilai budaya	Dokumen		363	306	306	306	306								
IKK.8.5179.1. 3	Jumlah Karya budaya yang diinventarisasi	Karya Budaya		695	990	990	990	990								
IKK.8.5179.1. 4	Peserta internalisasi nilai budaya	Peserta		19,481	19,481	19,481	19,481	19,481								
IKK.8.5179.1. 5	Dialog Budaya dengan komunitas			22	22	22	22	22								
5172	Pengembangan Galeri Nasional								24,000	86,480	206,156	142,696	33,468	492,800		
SK .8.5172.1	Meningkatnya apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya								19,164	19,297	164,614	113,942	26,724	343,741	Dit. Cagar Budaya dan Permuseuman	
IKK.8.5172.1. 1	Jumlah Karya Seni Rupa yang dipamerkan	Karya		450	450	450	450	450								
IKK.8.5172.1. 2	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi	Fasilitasi		15	9	9	9	9								
IKK.8.5172.1. 3	Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional			6,760	7,000	8,000	9,000	10,000								
SK .8.5172.2	Meningkatnya pelestarian karya seni rupa sebagai aset budaya bangsa								4,836	67,183	41,542	28,754	6,744	149,059		
IKK.8.5172.2. 1	Jumlah karya seni rupa yang dikelola	Karya		3,127	3,473	3,487	3,501	3,515								
IKK.8.5172.2. 2	Jumlah karya seni rupa yang diakuisisi	Karya		12	12	12	12	12								
IKK.8.5172.2. 3	Pengembangan dan pembangunan Galeri Nasional (M2)	M2		371	7,925	21,228	14,695									
IKK.8.5172.2. 4	Jumlah koleksi Galeri Nasional yang dikaji			-	10	10	10	10								
xxxx	Pengelolaan Museum Kepresidenan								15,000	26,100	30,335	34,669	36,908	143,012	Dit. Cagar Budaya dan Permuseuman	
SK .8.xxxx.1	Pengelolaan Museum Kepresidenan sebagai sarana edukasi dan rekreasi								15,000	26,100	30,335	34,669	36,908			
IKK.8.xxxx.1. 1	Koleksi Museum Kepresidenan yang dikelola	Karya		1,000	2,050	2,100	2,150	2,200								
IKK.8.xxxx.1. 2	Masyarakat yang mengapresiasi Museum Kepresidenan	Fasilitasi		15,000	30,000	50,000	75,000	100,000								
IKK.8.xxxx.1. 3	Kajian pengelolaan Kepresidenan (tata pameran, pengunjung, dan koleksi)			3	4	5	6	7								
IKK.8.xxxx.1. 4	Kemitraan pengelolaan Museum Kepresidenan			2	2	2	3	3								

LAMPIRAN-2

LAMPIRAN II. KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar 12 tahun)	Balitbang	Biro Hukor, DPR, Kemenkumham	2018
2.	RUU Kebudayaan	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan hasil budaya mempunyai arah yang jelas	Ditjen Kebudayaan	Balitbang, Biro Hukor, DPR, Kemenkumham	2017
3.	RPP tentang pelestarian cagar budaya	Agar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Ditjen Kebudayaan	Balitbang, Biro Hukor, DPR, Kemenkumham	2018
4.	RPP tentang museum	Agar dalam pengembangan, dan pemanfaatan museum mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga mudah di implementasikan	Ditjen Kebudayaan	Balitbang, Biro Hukor, DPR, Kemenkumham	2018
5.	RPP tentang pengelolaan guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah	Ditjen Guru dan Tendik	Balitbang, Biro Hukor, DPR, Kemenkumham	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dlm pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2018
7.	Peraturan perundangan tentang pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi satuan pendidikan, lembaga maupun program studi	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2019
8.	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan dikbud	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2018
9.	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016
10.	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepd pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dlm peningkatan profesionalisme & kinerja guru	Biro Keuangan	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11.	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan baik di satuan pendidikan maupun K/L	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham, Perpusnas	2019
12.	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015-2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019	Biro Perencanaan	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016
13.	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota	Biro Hukor	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016
14.	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap Mapel berbeda. b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.	Ditjen Guru dan Tendik	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
15.	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan	Ditjen Guru dan Tendik	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016
16.	Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya	Ditjen Guru dan Tendik	Unit Utama Dikbud, DPR, Kemenkumham	2016



“ Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai Gerakan Pencerdasan dan
Pembentukan Generasi
Berjiwa Pancasila ”